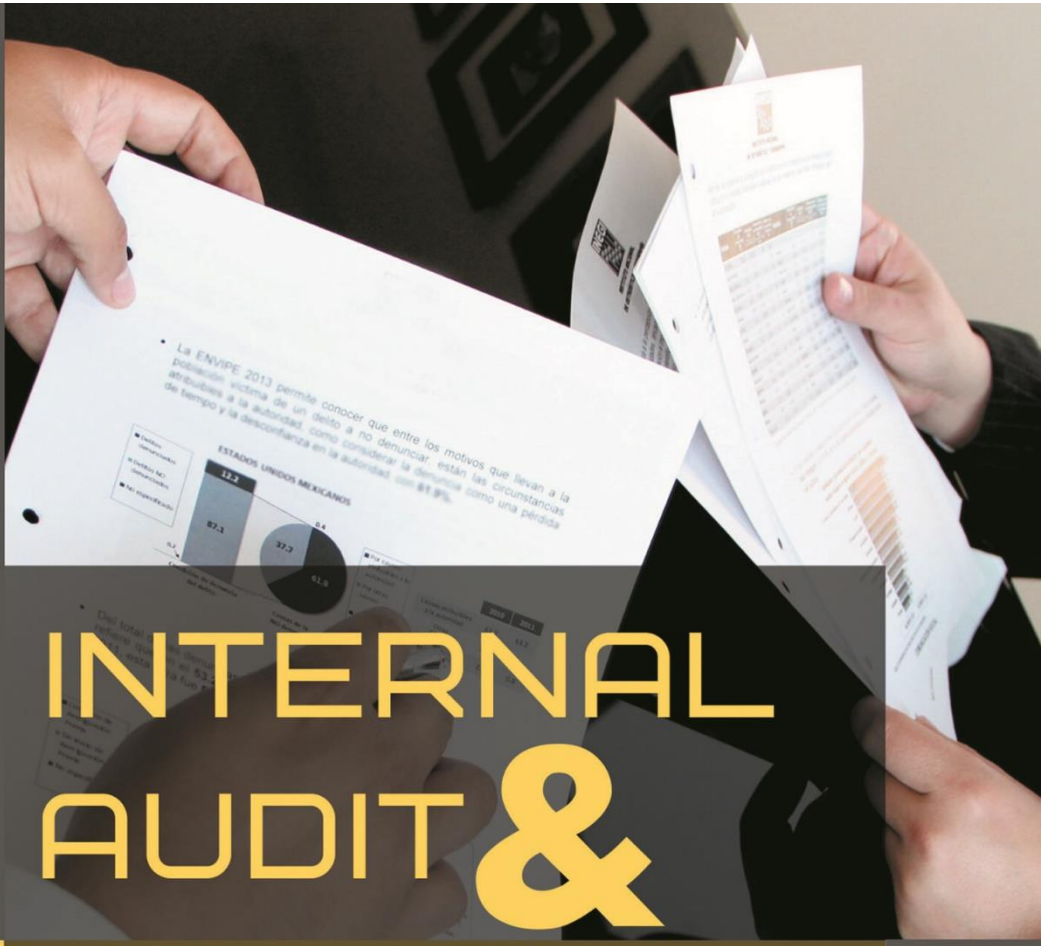

INTERNAL AUDIT &

PENDETEKSIAN KECURANGAN

RAHMAWATI
ZIKRA SUPRI

INTERNAL AUDIT &

PENDETEKSIAN KECURANGAN

INTERNAL AUDIT &
PENDETEKSIAN KECURANGAN

Rahmawati
Zikra Supri

Penerbit:

LEMBAGA PENERBITAN DAN PUBLIKASI ILMIAH (LPPI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO
Jl. Jend. Sudirman Km. 03 Binturu
Kec. Wara Selatan Kota Palopo
Telp. (0471)-327429 Fax. (0471)-327429
E-mail: lppi@umpalopo.ac.id

INTERNAL AUDIT &
PENDETEKSIAN KECURANGAN

Penulis :
Rahmawati dan Zikra Supri

Editor :
Harmita Sari

Tata letak :
Rahmawati Nur Annisa

Desain sampul :
Rahmawati Nur Annisa

ISBN : 978-623-91725-6-5

Penerbit :
LPPI UM Palopo

Kantor :
Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Muhammaadiyah Palopo
Lt.2 Gedung MCC Universitas Muhammadiyah Palopo Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Binturu, Palopo, Telp. 0471-327429, e-mail: lppi@umpalopo.ac.id

Cetakan pertama, *2019*

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan buku ini. Buku ini terinspirasi dari masih tingginya terjadi kecurangan (*Fraud*) di berbagai organisasi dan berbagai faktor terjadinya kecurangan (*fraud*).

Buku ini diharapkan bisa membuka wawasan bagi pembaca tentang pentingnya pengendalian internal, auditor internal dan perangkat sistem lainnya yang bisa membantu manajemen untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*. Muatan tulisan ini memadukan antara fenomena yang terjadi dan referensi yang menopang penyelesaian masalah lemahnya pengendalain internal baik riset maupun prosedur pengendalian internal.

Demikianlah prakata ini dn kami juga mengcapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkhusus rektor Universitas Muhammadiyah Palopo yang membantu secara materil dn non-materil dalam penyelesaian buku ini, semoga bisa bermanfaat kepada semua pihak yang berkepentingan dengan materi ini meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Palopo, November 2019

Rahmawati

DAFTAR ISI

BAB 1

AUDIT INTERNAL DAN AUDITOR INTERNAL: UPAYA MENDETEKSI KECURANGAN (FRAUD)

Auditing berasal dari kata audit yang merupakan suatu proses evaluasi bukti-bukti secara sistematis terkait dengan kejadian ekonomi untuk menyandingkan antara bukti dan kriteria yang telah ada pada standar. Audit dilakukan oleh tenaga professional atau auditor dengan maksud memberikan pendapat ataupun rekomendasi audit sebagai bahan pengambilan keputusan tentang keberlanjutan perusahaan dan kesehatan perusahaan. Audit dilakukan secara internal oleh internal audit dan audit secara independen dilakukan oleh eksternal audit. Fungsi audit sangat penting bukan hanya untuk internal perusahaan, namun juga untuk *stakeholders* perusahaan untuk pengambilan keputusan seperti: pemerintah, pemegang saham, analis keuangan, banker, investor, dan masyarakat.

Menurut (Arens, 2000;9) Audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengertian Audit lainnya juga dijelaskan oleh *The American Accounting Association's Committee on Basic Auditing Concepts, (*Auditing*: Theory And Practice*, edisi 9, 2001:1-2), bahwa audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan dan kriteria. Keseluruhan pelaksanaan proses audit ini harus bersifat independen dan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Sejalan dengan definisi dari audit yang menjadi proses independen dalam mengevaluasi bukti-bukti hingga menghasilkan sebuah laporan audit, namun sejak kasus Enron

independensi auditor juga menjadi sebuah hal yang dipertaruhakan dengan sebuah ketamakan dalam menjalankan manajemen perusahaan sifat-sifat materialitas, kekuasaan masih menjadi sesuatu yang dominan menguasai individu dalam melakukan tugasnya baik secara internal maupun secara eksternal. Moralitas individu masih memengaruhi kelompok sehingga sering terjadi kecurangan akuntansi dalam sebuah organisasi.

Kecurangan inipun, sering terjadi dengan berbagai motif dalam pengelolaan keuangan sehingga audit menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam menunjang transparansi dan akuntabilitas sebuah perusahaan, menjadi jaminan tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan atau pemerintahan. Audit dilakukan oleh perusahaan oleh akuntan yang professional dan memiliki integritas yang tinggi (Wardana, 2016). Kepercayaan *stakeholders* atas laporan keuangan tergantung pada kualitas audit. Hal tersebut biasa terwujud dengan tetap menjaga objektivitas, integritas dan etika auditor.

Akuntan dituntut untuk menjamin audit yang mereka berikan berkualitas dan dapat dipercaya. Perusahaan yang listing di Bursa Efek juga akan melampirkan laporan keuangan setelah diaudit oleh kantor akuntan publik, sehingga informasi yang terkandung dalam laporan tersebut dianggap bahwa sudah bebas dari keraguan. Lebih lanjut lagi bahwa peran penting auditor sangat penting dalam kelangsungan hidup perusahaan. Profesionalisme, independensi, etika, karakter dan moral yang membentuk individu auditor menjadi tumpuan hasil audit yang berkualitas. Perusahaan melakukan pengendalian internal sebaik mungkin agar hasil akhir saat diaudit oleh eksternal audit akan lebih baik.

Independensi dan mental auditor harus ditunjang oleh profesionalisme serta keahlian yang diperolah secara formal. Audit interen sekalipun menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang sistem pengendalian internal organisasi, menilai, mengevaluasi secara independen. Auditor internal tetap dituntut tanggungjawabnya secara independen untuk meningkatkan kinerja organisasi meski tidak jarang harus diperhadapkan dengan dilema antara etika dan keinginan pimpinan organisasi. Tercapainya perencanaan hingga pada tujuan organisasi membutuhkan internal audit yang lebih independen (Hardiningsih, 2010).

Aktivitas internal auditor juga dituntut wawasan yang lebih luas, pengetahuan bidang ekonomi, pajak dan audit itu sendiri. Penguasaan akan memberi kemampuan dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan. Pengalaman auditor juga menjadi hal yang membentuk individu auditor dalam pengambilan keputusan dan rekomendasi auditnya.

Auditor internal audit menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan dan fungsi audit internal diantaranya, menurut Mulyadi (2002, 211):

> *"Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian interen dan efisiensi pelaksanaan fungsi sebagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan pengendalian yang fungsinya adalah mengukur dan menilai efektivitas unsure-unsur pengendalian interen yang lain".*

Dari fungsi tersebut jelas fungsi auditor internal bahwa untuk memperoleh bukti dan informasi yang terkait dengan jalannya fungsi masing-masing unit organisasi dan pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Sehingga jangkauan internal audit bukan hanya pada catatan akuntansinya, namun lebih luas pada semua fungsi dan sistem yang ada dalam organisasi, fungsi pengendalain internal dan peran semua unit.

Internal audit sebagai salah satu unit kerja dalam perusahaan atau organisasi yang bersifat independen melakukan pengawasan terhadap jalannya SOP (Standar Operasional Prosedur) setiap unit dan mengevaluasi keseluruhan sistem organisasi. Selain itu mengevaluasi fungsi setiap level untuk pencapaian tujuan perusahaan secara efisien. Internal audit mengevaluasi proses yang dilakukan semua unit. Fungsi internal audit adalah pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan dilakukan terhadap fungsi agar tidak terjadi *misfunction* atau penyalahgunaan fungsi yang dikenal dengan penyalah gunaan wewenang, power dan jabatan. Internal audit dalam mereview data dan selain menyesuaikan bukti juga menyesuaikan dengan kebijakan organisasi pada tingkat strategik level (Kumaat, 2010).

Strategic level policy sebagai tempat dimulainya untuk melihat arah yang akan ditempuh oleh internal audit:

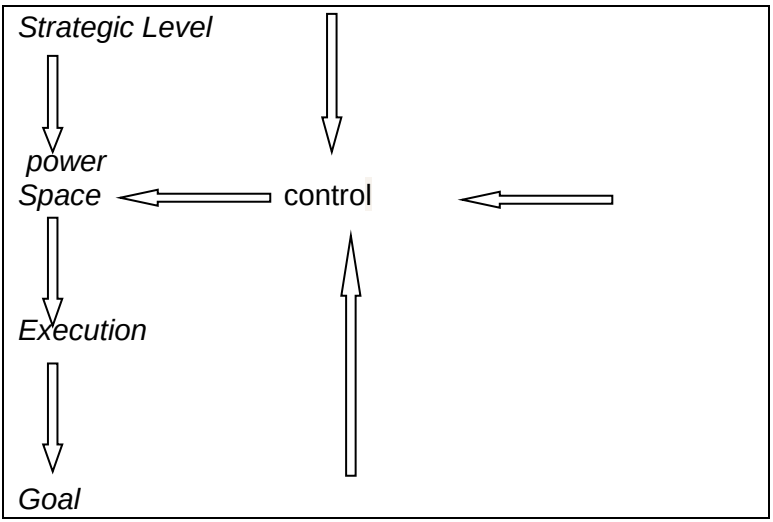

Gambar. 1.1. Peluang adanya *space* untuk melakukan kecurangan

Bahwa dari *strategic level* sudah membuat kebijakan organisasi sebaik mungkin, namun jangan sampai diikuti dengan *power* secara individu untuk melakukan penekanan kekuasaan untuk melakukan sesuai kehendak bukan sesuai dengan perencaan untuk pencapaian tujuan. Sehingga penekanan pada internal control juga pada perilaku individu dalam organisasi (Floyd & Lane, 2000), (Edmondson, 2002).

Auditor memiliki kecakapan dan keahlian untuk mengevaluasi *space* atau peluang terjadinya penyelewengan. Penilaian efektivitas yang dilakukan oleh internal audit bukanlah selesainya pekerjaan tepat waktu saja tetapi ketepatan waktu, bukti yang relevan dan revansi tujuan serta niat dalam proses penyelesaian pekerjaan (Rustendi, 2018).

Auditor internal juga memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas kinerja setiap unit dengan pengawasan terhadap: SOP, *internal policy* dan sistem informasi yang mengikuti perkembangan pasar. Tiga hal tersebut akan memberi peran dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif tentunya ditunjang dengan budaya organisasi yang baik (Kumaat, 2010).

Budaya organisasi yang baik akan menunjang pekerjaan internal audit untuk *join control* pada fungsi pengawasan dan menghindari kelalaian atas pekerjaan lapangan. Mengurangi risiko atau memprediksi resiko, *risk management.* Banyak

terjadinya resiko kecurangan dilakukan oleh orang dalam juga, sehingga berbagai celah harus dibuatkan SOP seefektif mungkin. Jika hal tersebut terjadi, maka internal audit harus melakukan pengumpulan data, mengidentifikasi akar masalah dan dampak yang akan ditimbulkan baik secara organisasi maupun individu, rekomendasi tindak perbaikan dan pengendalian yang perlu di *review* (M.Hanafi, 2014).

Terjadinya suatu kecurangan adalah tindakan yang disengaja, jika kecurangan tersebut tidak dapat dideteksi dalam suatu pengauditan akan memberikan efek yang merugikan serta cacat pada proses pelaporan keuangan dan memberikan kerugian yang besar bagi perusahaan. SAS No.99 menjelaskan bahwa kecurangan pelaporan keuangan (*financial statement fraud*) dapat berupa:

1. Manipulasi, pemalsuan, atau mengubah catatan akuntansi, serta dokumen pendukung dari laporan keuangan,
2. Kekeliruan maupun kelalaian yang disengaja dalam informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan,
3. Secara sengaja menyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, pengungkapan atau cara penyajian. Penyalahgunaan wewenang dan penguasaan informasi biasanya dilakukan oleh pengelola yang dikenal dengan asimeteri informasi sehingga muncul *agency theory,* Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan *agency theory* (Teori Agensi), sebagai teori yang mendeskripsikan mengenai pemegang saham yang bertindak sebagai principal serta manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham dan bekerja demi kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan yang terbaik pemegang saham serta manajer harus bertanggungjawab kepada pemegang saham.Teori keagenan menggunakan kontrak yang melandasi hubungan antara principal dan agen sebagai unit analisisnya. Fokusnya yaitu penentuan kontrak paling efisien yang mendasari hubungan agen dan principal. Kontrak yang efisien maksudnya adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu: Agen dan principal memiliki informasi yang simetris dimana baik agen maupun principal memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak

terdapat informasi yang disembunyikan yang dapat digunakan untuk keuntungan diri sendiri (Jefri, 2014).

Pada konteks skandal keuangan, muncul pertanyaan apakah trik-trik rekayasa tersebut tidak mampu terdeteksi ketika mengaudit laporan keuangan, atau memang telah terdeteksi tetapi auditor justru ikut mengamankan praktik kecurangan tersebut. jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan maka yang menjadi inti permasalahannya adalah lemahnya kompetensi atau keahlian auditor tersebut, akan tetapi jika akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, maka selain keahlian auditor, independensi dalam menghadapi setiap skandal yang diperiksa juga perlu dipertanyakan (Pertiwi & Agusti, 2013), (Lastanti, 2005).

Tanggung jawab dalam pendeteksian kecurangan (fraud detection) akan mendukung terwujudnya penerapan standar yang memadai untuk pendeteksian kecurangan serta membantu terwujudnya lingkungan kerja audit serta metode dan prosedur audit yang cukup efektif untuk tanggung jawab pendeteksian kecurangan sehingga tidak terjadi kegagalan audit. Standar Audit (SA) seksi 110 (PSA No. 02) menjelaskan tangggung jawab auditor adalah merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun karena kecurangan. Sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, menjadi alasan auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun tidak mutlak, bahwa salah saji material dapat terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan serta melaksanakan audit dan memperoleh sebuah keyakinan tentang deteksi salah saji, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, maupun yang tidak material terhadap laporan keuangan (Rahman, 2011). Kecurangan yang di sengaja maupun yang tidak, dapat berakibat fatal dan membawa banyak kerugian, karena itu auditor harus dapat mendeteksi kecurangan tersebut. Statement on Auditing Standard (SAS) No. 99 tentang*Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit* menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendeteksi kecurangan yaitu dengan merencanakan dan melaksanakan audit dalam rangka memperoleh kepastian, apakah laporan keuangan yang diperiksa bebas dari salah saji (*misstatement*) secara material, baik yang disebabkan oleh

kesalahan ataupun kecurangan (ACIPA, 2002), (Norsain, 2014), (Lukman & Harun, 2018).

Tanggung jawab akuntan publik untuk melindungi kepentingan publik akan semakin bertambah, seiring dengan bertambahnya investor di pasar modal, hubungan yang semakin erat antara para manajer korporat dan pemegang saham, serta sejalan dengan pemerintah dalam meningkatkan ketergantungannya pada informasi akuntansi (Minaryanti, 2015). Di zaman teknologi saat ini, penipuan telah menjadi sangat rumit, dan semakin sulit untuk dideteksi, terutama ketika itu adalah kolusi di alam dan dilakukan oleh manajemen puncak yang mampu menyembunyikan itu. Akibatnya, auditor berpendapat bahwa deteksi penipuan tidak menjadi tanggung jawab mereka.Penipuan mungkin didefinisikan sebagai penipuan yang disengaja, kecurangan atau mencuri dan dapat dilakukan terhadap pengguna seperti investor, kreditur, pelanggan atau badan pemerintah. Auditor mengklaim bahwa mereka tidak bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan, tetapi bahwa deteksi penipuan adalah tanggung jawab manajemen. SAS 1 (AU110) Prosedur dan Standar Audit menyatakan bahwa :

> "Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan atau penipuan. Karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh wajar, namun tidak mutlak, jaminan bahwa salah saji material terdeteksi." (Arens et al., 2003, hal. 138).

Fakta bahwa auditor di Barbados tidak melihat deteksi penipuan sebagai tanggung jawab mereka, melainkan melihat peran mereka sebagai mengekspresikan pendapat yang independen atas laporan keuangan merupakan indikasi bahwa mereka masih perlu menyadari bahwa penipuan terdeteksi bisa mendistorsi temuan mereka dan memengaruhi keandalan laporan mereka. Di atas semua, dari sudut pandang etika, auditor eksternal serta auditor internal harus melaporkan setiap dugaan penipuan daripada tetap diam (Alleyne, 2005).

Profesi mengambil posisi bahwa deteksi penipuan adalah tanggungjawab manajemen karena manajemen memiliki tanggungjawab untuk menerapkan system pengendalian internal yang tepat untuk mencegah penipuan dalam organisasi mereka. Hal ini sebagai akibat dari peningkatan ukuran dan volume

transaksi perusahaan yang membuatnya hampir tidak mungkin bagi auditor untuk memeriksa semua transaksi (Porter, 1997).

Deteksi penipuan adalah tanggung jawab manajemen sedangkan auditor bertanggung jawab untuk mengungkapkan penipuan. Auditor yang tidak memiliki sikap independen, kompetensi, serta tanggung jawab dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan, akan mengakibatkan terjadinya kecurangan. Kecurangan tersebut merupakan sebuah kegagalan audit (*audit failure*). Jadi dalam proses evaluasi bukti dan intrumen yang ada auditor seharusnya tetap bersikap independen. Auditor bertanggung jawab dalam mendeteksi perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran yang dilakukan dengan sengaja. Perbuatan tersebut dapat berupa pemanfaatan dokumen yang salah, menyembunyikan informasi yang seharusnya diungkapkan, serta pengelolaan dana yang tidak benar untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak yang seharusnya. Pendeteksian kecurangan yang dilakukan oleh auditor selalu menerapkan metode audit untuk mendeteksi kekeliruan atau kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan. Selain itu *professional judgment* seorang auditor harus tetap digunakandalam mendeteksi kecurangan. Sebagian besar auditor seharusnya tidak mudahpuas/percaya dengan jawab yang diberikan dari pihak manajemen. saat menanyakan kepada pihak manajemen yang berhubungan dengan pengumpulan dan penilaian bukti audit (Minaryanti, 2015).

1.1 Deteksi Kecurangan: Efektivitas Informan

Auditor harus mempunyai intuisi yang tajam dalam melihat aspek internal dan celah yang akan menjadi peluang bagi oknum untuk melakukan kecurangan. Auditor menerapkan audit berbasis risiko dengan melakukan pemetaan (*mapping*), pengamatan (*Observing*), serta verifikasi data dan analisis. Auditor internal akan lebih mudah dalam memeroleh data awal jika informan dekat dengan pelaku, auditor jeli dan fokus pada tujuan audit, serta cermat dalam memeroleh bukti (Kumaat, 2010).

Validitas informan sebagai hal yang penting dalam memperoleh bukti dilanjutkan dengan observasi dan analisis. Adapun yang menjadi poin utama yang menjadi point risiko terjadinya kecurangan adalah:

a. Transparansi Sistem;
b. Konsentrasi asset baik asseta lancer maupun asset

tetap dan biaya;

c. Integritas Sumber daya manusia dan pelimpahan wewenang;
d. Kepatuhan pada SOP serta peraturan lainnya.

Hal tersebut di atas, yang menjadi poin sekaligus celah oknum dalam melakukan manipulasi, *mark-up* dan penyalah gunaan wewenang, manipulasi data sistem, *mark-up* pada pembelian barang dan kecurangan lain yang biasa dilakukan. Keahlian deteksi kecurangan dan pemilihan informan menjadi titik data awal oleh auditor. Selain itu, pengembangan jaringan informan dan penelusuran bukti, komunikasi informan, dan keandalan informan serta pemberian ruang untuk membuka media masukan untuk audit sebagai informasi awal bagi auditor.

Indikasi awal menjadi hal penting sebelum melakukan investigasi yang membutuhkan saksi dan bukti fisik, namun, kerahasiaan investigasi menjadi milik auditor. Selanjutnya dilakukan pendalaman indikasi dan konfrontasi kepelaku. Langkah akhir adalah *treatment* terhadap pelaku dan rekomendasi.

Cressey pada tahun 1970-an, yang merupakan kriminolog dan sosiolog asal Amerika Serikat, menyatakan bahwa ada tiga faktor penyebab terjadinya kecurangan akuntansi, yaitu:

a. Kesempatan (oportunity),
   Kecurangan biasanya terjadi karena adanya kesempatan baik itu karena jabatan atau dengan moment yang diakibatkan oleh lemahya pengendalian intern, biasanya pihak manajemen perusahaan itu sendiri yang potensi besar melakukan kecurangan. Kesempatan melakukan kecurangan ada pada setiap kedudukan atau jabatan (Kurniawati & Raharja, 2012).
b. Rasionalisasi,
   Rasionalisasi Rasionalisasi yaitu sikap yang ditunjukkan oleh pelaku dengan melakukan justifikasi atas perbuatan yang dilakukan. Pelaku merasionalkan kecurangan yang dilakukan dengan alasan menurutnya sendiri justifikasi yang tdk berdasar pada aturan (Mardianto & Tiono, 2019), (Johnson, Kuhn, Apostolou, & Hassell, 2013).
c. Dorongan/tekanan (Pressure).
   Dorongan atau tekanan biasanya terjadi karena adanya tekanan secara financial yang bukan sekedar need atau

kebutuhan tapi gaya hidup, fraud ini biasanya banyak dilakukan oleh bagian keuangan, (Murphy & Dacin, 2011), (Lin, Chiu, Huang, & Yen, 2015).

Masing-masing level management memiliki space untuk melakukan kecurangan, dan memungkinkan menggunakan ketiga *triangle fraud,* baik di level manajer, middle dan bagian operasional.

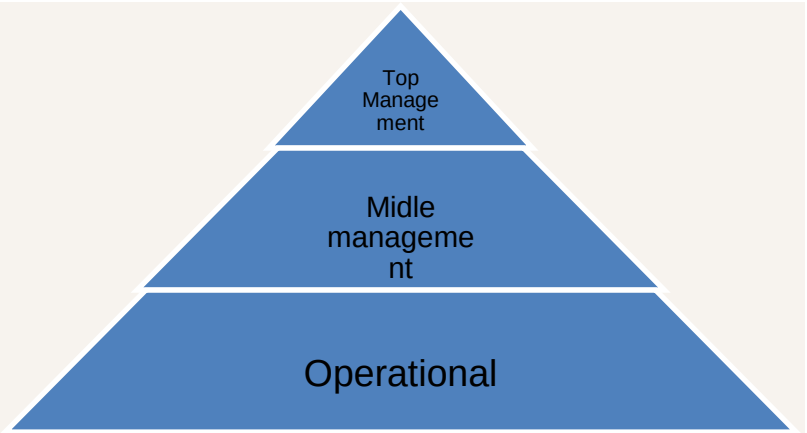

Faktor–faktor tersebut disebut *fraud triangle* (segitiga kecurangan). Tahun 1980-an, Albrecht mencetuskan *fraud scale* yang berisi tiga faktor penyebab terjadinya *fraud*, yaitu tekanan situasional *(situasional pressure*), kesempatan untuk melakukan *fraud* dan *integritas personal*. Studi dari Albrecht ini memperkuat penyataan Cressey sebelumnya. Albrecht mengganti faktor *rationalization* dengan *personal integrity* untuk lebih dapat diobservasi. *Personal integrity* lebih mengacu kepada kode etik personal yang dimiliki oleh individu. *Personal integrity* dapat diobservasi melalui teori perkembangan moral seperti halnya dalam penelitian-penelitian etika. Semua hal tersebut di atas merupakan faktor ketamakan oknum terhadap dorongan materi dan ketidakpercayaan terhadapkemampuan kerja secara normal (C. Albrecht, Holland, Malagueño, Dolan, & Tzafrir, 2015), (W. S. Albrecht, Albrecht, Albrecht, & Zimbelman, 2009).

Penelitian di bidang etika beberapa menggunakan teori perkembangan moral untuk mengobservasi alasan individu melakukan suatu tindakan. Salah satu yang paling sering digunakan adalah teori mengenai level penalaran moral Kohlberg, dengan mengetahui level penalaran moral

seseorang akan menjadi dasar untuk mengetahui kecenderungan individu melakukan suatu tindakan tertentu, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Selain faktor rasionalisasi, faktor lain yang menjadi penyebab kecurangan yang berkaitan erat dengan etika adalah faktor kesempatan. Salah satu penyebab adanya kesempatan dalam melakukan kecurangan akuntansi adalah kurangnya pengawasan serta lemahnya pengendalian internal (Normile, 2001), (Rafinda, Arofah, Mustafa, & Ompusunggu, 2015). Coram *et al.* (2008) menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki fungsi internal audit akan lebih mudah dalam mendeteksi kecurangan akuntansi. Penelitian Hogan *et al*. (2008) menemukan bahwa auditor berperan dalam mengurangi faktor kesempatan *(opportunity)* dalam kecurangan akuntansi.

Kasus Enron menjadi contoh sebuah manipulasi dan kecurangan, laporan keuangan Enron sebelumnya dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh KAP Arthur Anderson, akan tetapi secara mengejutkan pada 2 Desember 2001, perusahaan ini dinyatakan pailit. Selain itu, kasus lain yang dimuat di media online dikutip melalui kompas.com mengenai Kredit Macet Rp 52 Miliar, Akuntan Publik Diduga Terlibat, Kasus ini melibatkan akuntan publik bernama Biasa Sitepu yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada tahun 2009, dan diduga terlibat dalam kasus korupsi kredit macet.. Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi pada akuntan publik tidak terlepas dari mutu yang diterapkan oleh Akuntan yang bersangkutan. Selain itu kurangnya mutu dan sistem pengendalian internal dalam perusahaan yang tidak bekerja dengan baik. Oleh karena itu, mutu Akuntan harus lebih ditingkatkan. Sehingga, dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Hingga saat ini belum ada definisi yang pasti tentang kualitas audit. Hal ini disebabkan oleh, tidak adanya pemahaman umum mengenai faktor penyusun kualitas audit dan sering menjadi konflik peran antara berbagai pengguna laporan audit (Wardana, 2016).

1.2 Pentingnya Audit pada Perusahaan

Pihak internal perusahaan merupakan manajemen dan semua pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan perusahaan. Manajemen memerlukan informasi keuangan untuk mengetahui

kondisi/kinerja keuangan perusahaan, pengambilan keputusan. Serta, memudahkan dalam mengelola perusahaan. Pihak eksternal perusahaan meliputi: kreditor, calon kreditor, investor, calon investor, kantor pajak, serta pihak-pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan perusahaan akan tetapi memiliki kepentingan dalam perusahaan dan ingin mengetahui kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Manajemen harus membuat sistem pengandalian intern, untuk mengecek ketelitian serta kebenaran data-data akuntansi yang digunakan, sehingga perusahaan dapat bersaing dan bahkan mampu meningkatkan mutunya. Pengendalian internal merupakan proses pengawasan terhadap kualitas kinerja stafnya. Contohnya usaha manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penggelapan dana terhadap kekayaan perusahaan (NOVIAN TEDJASUKMA, 2012).

Audit internal suatu langkah awal dalam mengurangi kecurangan, meningkatkan pengendalain intern perusahaan sebelum diaudit secara eksternal. Adapun, siklus audit internal (*internal audit cycle):*

a. Perencanaan audit/program audit;
b. Pelaksanaan audit;
c. Penyajian hasil audit;
d. Peninjauan kembali.

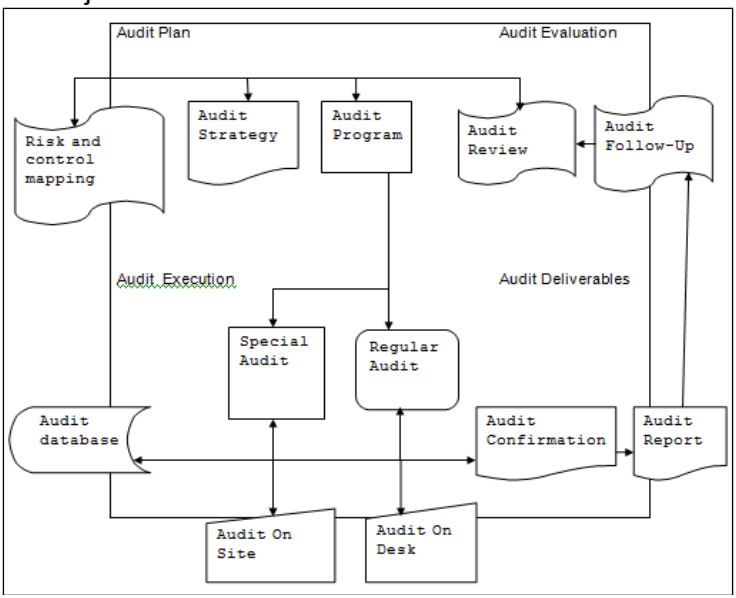

Tujuan pemetaan risiko sebagai aktivitas awal sebuah perencanaan audit dan merupakan hal yang paling menentukan arah pelaksanaan audit internal. Acuan pemetaan adalah strategi korporasi, strategi bisnis, umpan balik. Audit dilaksanakan *on site* dan *desk evaluation*. Sesuai dengan program audit (jadwal, panduan, *man power*) hingga akhirnya menjadi laporan audit (Kumaat, 2010), (Moyes & Hasan, 1996).

Kasus Enron dianggap sebagai akibat dari kesalahan Akuntan yang tidak bisa mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Dalam konteks tersebut, memunculkan pertanyaan apakah kecurangan hanya dilakukan oleh manajemen ataukan pihak auditor juga terlibat. Jika auditor melakukan hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa seberapa bagusnya hasil audit yang diberikan tidak akan berpengaruh terhadap risiko yang akan dihadapi oleh investor dan kreditor. Faktor Independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan karena selain untuk mematangkan pertimbangan dalam penyusunan laporan hasil audit, juga untuk mencapai kinerja yang berkualitas (Nandari & Latrini, 2015).

Independensi merupakan sikap mental yang tidak mudah dipengaruhi. seorang Akuntan tidak dibenarkah untuk mudah terpengaruh oleh kepentingan siapapun baik manajemen ataupun pemilik perusahaan ketika menjalankan tugasnya. Akuntan juga harus bebas dari intervensi berupa kepentingan-kepentingan yang menginginkan hasil audit yang tidak akan merugikan pihak berkepentingan. Profesionalisme juga merupakan syarat utama seorang auditor. Baotham (2007) menjelaskan profesionalisme auditor mengarah pada kemampuan serta perilaku profesional. Kemampuan dapat diartikan sebagai pengetahuan, kemampuan beradaptasi, pengalaman, kemampuan teknis, serta kemampuan teknologi.

Perilaku profesional auditor juga mencakup faktor-faktor tambahan seperti transparansi dan tanggung jawab, hal ini tentunya penting untuk memeroleh kepercayaan publik. Selain profesionalisme, auditor juga harus menjunjung tinggi etika dalam praktek audit. Auditor yang menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak melakukan kecurangan,

sehingga dapat memberikan hasil audit yang sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan. Auditor dalam menjalankan pekerjaannya, dituntut untuk mematuhi Etika Profesi. sehingga tidak terjadi persaingan di antara para Akuntan yang menjurus pada sikap curang. Penerapan etika profesi diharapkan dapat membuat auditor memberikan hasil audit yang benar benar sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Semakin tinggi Etika Profesi dijunjung oleh auditor, maka diharapkan kualitas audit yang dilakukan juga akan semakin bagus (Futri, 2014).

*****

BAB 2

INTEGRITAS AUDITOR INTERNAL

Integritas merupakan konsep yang berkaitan dengan konsistensi seorang auditor yang terkait dengan tindakan-tindakan, nilai-nilai, prinsip yang dihasilkan melalui karakter yang kuat. Profesi akuntan berperan penting dalam peran *social* sehubungan tugas dan tanggung jawab oleh auditor. Auditor memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud).*

Fraud merupakan suatu masalah yang sangat umum dan sering kita jumpai dalam dunia bisnis bahkan cukup sulit untuk dihindari. Tidak bisa dipungkiri, *fraud* banyak di lakukan oleh meraka dari jajaran tinggi dan profesional, dengan berbagai motif yang berbeda . Berdasarkan gambaran tersebut sepertinya sangat sulit untuk mencegah permasalahan yang tak kunjung usai dan yang sangat merugikan ini, karena pihak-pihak yang terkait didalamnya yaitu mereka dari jajaran tinggi, dimana mereka akan berusaha semaksimal mungkin agar tindakan mereka dapat tetap berjalan.

Oleh sebab itu, selain para pelaku *fraud* yang semakin pandai dalam menjalankan kejahatannya, perlu di terapkannya sistem yang ketat, salah satunya seperti ketikapara auditor melaksanakan tugasnya, dalam memeriksa laporan keuangan harus memperhatikan segala aspek dari yang terkecil hingga yang terbesar yang bisa saja memicu terjadinya *fraud,* atau bahkan dapat pula diterapkan sistem yang dapat membuat efek jerah para pelaku. Seperti langkah yang diambil oleh Amerika yaitu membuat aturan baru seperti yang dikemukakan oleh Fitrawansyah (2014) bahwa pada tahun 2002 Amerika mengeluarkan aturan yang dikenal dengan *Sarbanes-OxleyAct (*SOA) yang diterapkanbagi perusahaan yang terdaftar di NYSE seperti perusahaan *Enron* dan *WorlCom* atas kecurangan dalam pelaporan keuangan. Peraturan yang dikeluarkan Amerika

merupakan suatu tanda bahwa sangat penting untuk mencegah maraknya kasus *fraud* (Li, 2010).

Dari berbagai bentuk *fraud* yang ada, salah satu kasus *fraud* yang paling sering ditemui yaitu *financial statement fraud a*tau yang biasa dikenal dengan kecurangan laporan keuangan. Ketika perusahaan menerbitkan laporan keuangan, maka sangatlah wajar setiap perusahaan menginginkan kondisi perusahaan digambarkan dalam kondisi yang baik. Sehingga, para pengguna laporan keuangan menilai bahwa kinerja manajemen selama ini berjalan sesuai apa yang diharapkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan perusahaan memanipulasi laporan keuangan untuk terlihat lebih baiksehingga informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan menjadi bias. Laporan keuangan yang bias tentu saja memberikan Informasi yang tidak *valid* atau tidak relevan jika digunakan sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan sebab analisis tidak berdasarkan informasi yang benar.

Sementara laporan keuangan merupakan hal yang paling penting dan menjadi perhatian di dalam sebuah perusahaan karena laporan keuangan merupakan gambaran kemajuan suatu perusahaan dalam suatu periode pada suatu perusahaan. Sehingga, dalam dunia bisnis dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Bagi para investor laporan keuangan digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan investasi dan bagi para pihak manajemen dijadikan arah untuk mengetahui stabilitas keberlangsungan perusahaan. Hal tersebut, sering menjadi alasan bagi pihak manajer melakukan manipulasi laporan keungan agar laporan keuangan perusahaan terlihat bernilai.

Hal tersebut, dapat dihilangkan dengan membentuk internal audit atau menempatkan auditor dalam sebuah perusahaan yang memiliki sikap yang jujur, tekun dan profesionalisme. Auditor harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Semua perusahaan bisa menjadi korban dari *fraud* (Purba, 2015:3). *Fraud* bisa terjadi di perusahaan besar, kecil, swasta, negeri, maupun organisasi *non-profit*. Namun, banyak perusahaan/organisasi tidak menyadari atau meremehkan ancaman/bahaya dari *fraud* yang dapat terjadi setiap saat (Purba, 2015:3).

Kasus *fraud* yang cukup popular dan menarik perhatian di Indonesia adalah yang dilakukan oleh Malinda Dee, seorang

manager relationship Citibank. Malinda Dee didakwah atas tindak pidana penggelapan dana para nasabah serta pencucian uang sebanyak Rp 16,63 miliar. Selain itu, kasus *fraud* dan perbankan Indonesia dan sektor keuangan yang pernah menjadi perbincangan yaitu *fraud* yang terjadi di Bank Century dimana para pelaku *fraud* itu sendiri adalah jajaran eksekutif di Indonesia. Berdasarkan contoh kasus yang dikemukan di atas, menunjukkan bahwa kasus *fraud* sangat marak terjadi pada sektor perbankan di Indonesia. Padahal bank merupakan lembaga penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana *(surplus of funds)* dengan pihak yang membutuhkan maupun kekurangan dana *(lack of fund).* Bank melakukan usaha dengan dana yang berasal masyarakat dan disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu untuk menjaga kesehatan usahanya dengan tetap memelihara serta mempertahankan kepercayaan dari masyarakat (Arie dan Basuki 2016).

2.1 Teori *Fraud Triangle*

Teori *fraud triangle* adalah sebuah gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya *fraud*. *Fraudtriangle* mengemukakantentang faktor apa saja yang dapat menyebabkan individu melakukan *fraud*, adapun faktor yang termuat dalam *fraud triangle*diantaranya yaitu: *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rasionalization* (pembenaran) gagasan ini dicetuskan oleh Cressey (1953) dan menamakannya*fraud triangle* atau segitiga kecurangan yang kemudian dimuat didalam SAS no.99. pernyataan tersebut diperkuat dengan tulisan Karyono (2013:9) yang menjelaskan tentang *fraud triangle* dimana tiga unsur yang terdapat dalam *fraud triangle* di gambarkan dalam segitiga sama sisi.

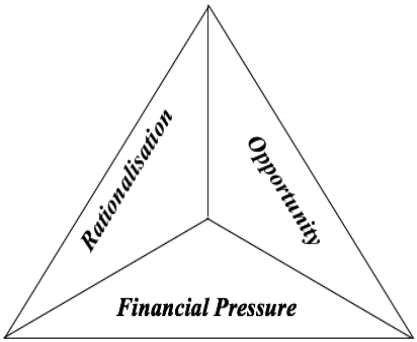

Gambar 2.1**:** *Fraud Triangle* (Cressey 1953)

2.1.1 *Pressure* (Tekanan)

Presssure (Tekanan), yaitu suatu keadaan yang dialami manajer, tekanan tersebut dapat berupa tuntutan ekonomi, gaya hidup dan lain-lain. Tekanan yang paling sering dialami seseorang sehingga mendorong untuk melakukan *fraud* adalah tekanan ekonomi yaitu kebutuhan keuangan, misalnya disaat seseorang mengalami penurunan keuangan, mereka mungkin akan cenderung ragu dan malu untuk dapat meminta bantuan atau membagi masalah mereka tersebut kepihak lain dengan sikap tersebut mereka cenderung berusaha menyelesaikan tekanan tersebut dan akan terfikir bagi dirinya untuk mengambil jalan pintas yang pada akhirnya mengarah pada *fraud*. Secara umum SAS No.99 menjelaskan, empat jenis kondisi umum yang behubungan dengan *pressure* (tekanan) yang dapatmengakibatkanterjadinya kecurangan (*fraud*), yaitu *financial stability*, *external pressure, personal financial need,* serta*financial targets* (Lukman & Harun, 2018).

Financial stability (Stabilitas keuangan) adalah keadaan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan berada pada titik yang stabil. Seperti yang dijelaskan, kondisi keuangan sebuah perusahaan dapat dikatakan stabil jika perusahaan dapat mencukupi kebutuhan rutinnya saat ini, kebutuhan akan datang, hingga kebutuhan yang sifatnya mendadak/tiba-tiba. Perusahaan yang berada dalam kondisi stabil akan menaikkan nilai perusahaan dalam pandangan investor, kreditur serta publik (Wahyuni, 2017).

External pressure (tekanan eksternal)*,* adalah tekanan yang dialami manajemen atas persyaratan yang diajukan oleh

pihak ketiga, dengan alasan tersebut manajemen akan mengambil tindakan apapun agar kinerja yang dilakukan tetap terlihat baik dan kestabilan keuangan perusahaan tetap terjaga sehingga apa yang di syaratkan pihak ketiga dapat terpenuhi. Adapun cara, yang mungkin saja akan dilakukan oleh pihak manajemen untuk syarat tersebut salah satunya yaitu dengan menambahkan modal peusahaan dengan sumber pembiayaan, seperti yang dikemukakan Yayuk (2014) yang menyatakan bahwa untuk mengatasi tekanan seperti ini, perusahaan membutuhkan tambahan dalam sumber pembiayaan eksternal.

Personal financial need merupakan suatu keadaaan dimana ada kebutuhan pribadi yang dibutuhkan oleh eksekutif perusahaan, dalam kaitannya terdapat kondisikeuangan personal manajemen ataupun pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terancam oleh kinerja keuangan perusahaan, dimana bagian yang signifikan dari kompensasi mereka (contohnya, bonus, opsi saham, dan pengaturan *earn-out*) dipengaruhioleh pencapaian target yang agresif atas harga saham, hasil operasi, serta posisi keuanganatau arus kas. Seperti yang dikemukakan Skousen *et.,al* (2008) yang mengemukakan bahwa *personal financial need* yaitu keadaan keuangan perusahaan yang turut dipengaruhi oleh kondisi keuangan para eksekutif perusahaan.

Financial targets adalah merupakan tekanan yang dihadapi manajemen yang diberikan oleh pihak eksekutif sehingga manajemen cenderung melakukan *fraud* atas tekanan berlebihan yang diterima, Prisca (2013) juga mengemukakan hal yang sama yaitu *financial targets* (target keuangan) adalah tekanan yang berlebihan pada pihak manajemen dalam mencapai target keuangan yang diinginkan oleh direksi ataupara eksekutif perusashaan.

2.1.2 *Opportunity* (Peluang)

Opportunity (Peluang) yaitu suatu keadaan yang memberikan peluang bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Seperti yang dikatakan Arie dan Basuki (2016) peluang yaitu situasi yang membuka kesempatan dan memungkinkan kecurangan terjadi. Peluang *Financial statement fraud* dapat terjadi pada tiga kategori kondisi, yaitu *nature of industry, ineffective monitoring,* dan

organizational structure, sesuai dengan yang disebutkan pada SAS No.99.

Nature of industry merupakan kondisi yang berkaitan dengan munculnya risiko bagi perusahaan yang berkecimpung dalam industri yang melibatkan estimasi serta pertimbangan yang signifikan jauh lebih besar (Prisca 2013). Kondisi kedua yaitu *Ineffective monitoring* atau efektifitas pengawasan menggambarkan kondisiperusahaan yang tidak memiliki unit pengawas yang efektif dalam memantau kinerja perusahaan Yayuk (2014). Jadi faktor yang menyebabkan peluang dari *ineffective monitoring* lebih berhubungan dengan kurangnya efektifitas pengawasan serta pengendalian internal dalam perusahaan. Kondisi yang ketiga adalah *Organizational structure* menjelaskan tentang struktur organisasi yang lebih kompleks dan tidak stabil (Prisca, 2013). Keadaan tersebut membuka peluang bagi mereka yang memanfaatkan organisasi yang tidak terstruktur.

Faktor–faktor yang menyebabkan munculnya peluang, umumnya yang terjadi berasal dari *internal control* lebih berkaitan dengan *internal control* yang kurang memadai dari aspek kepegawaian, dan teknologi informasi, sistem informasi, serta aspek-aspek lain yang melibatkan defisiensi pengendalian internal atau pengawasan yang kurang efektif. Semakin tidak efektifnya *internal control* akan mempermudah para pelaku untuk melakukan tindakan *fraud* (Diany, 2014).

2.1.3 *Rationalization* (Pembenaran)

Rationalization (Pembenaran), menjelaskan mengenai sikap, karakter, maupun serangkaian nilai-nilai etis yang membenarkan pihak-pihak tertentu melakukan tindakan kecurangan ataupun kondisi orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup tertekan dan membuat mereka merasionalisasi dan mencari pembenaranatas tindakan *fraud* (Arie dan Basuki 2016). Sikap tersebut membuat manajemen akan membenarkan segala tindakan yang dilakukan meskipun perbuatan tersebut melanggar. *Rasionalization* dalam SAS No.99 merupakan sikap atau rasionalisasi anggota dewan, manajemen, ataupun karyawan yang memungkinkan mereka ikut terlibat dalam membenarkan *fraud*. Haryono (2014) juga menjelaskan bahwa perilaku pihak manajemen atas pengendalian serta tindakan etis bisa menjadi penyebabpihak

karyawan dan manajer untuk membenarkan pencurian yang mereka lakukan.

Pelaku kecurangan bersikap rasionalization karena mereka merasa bahwa yang dilakukan merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan oleh orang lain, pelaku menganggap dirinya berjasa besar terhadap perusahaan/organisasi sehingga seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang diterimanya.Pelaku juga terkadang menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, dan akan mengembalikan (Karyono 2013:10).

Penelitian juga yang dilakukan oleh Siti Subaedah di Malaysia untuk mengetahui ketersediaan pengungkapan integritas dalam laporan tahunan Badan hukum Federal Malaysia dengan memusatkan perhatian pada bagian non-keuangan dari laporan tersebut. Tujuannya adalah untuk melakukan analisis isi bagian non-keuangan untuk eksistensi integritas diungkapkan dalam mendukung inisiatif pemerintah. Berdasarkan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah mengenai penerapan budaya integritas dalam organisasi sektor publik, Studi ini mengungkapkan bahwa sebagian besar badan hukum tersebut mengungkapkan unsur-unsur integritas di dalamnya laporan tahunan meskipun tidak ada persyaratan khusus untuk pengungkapan tersebut.

Penemuan-penemuan ini juga berimplikasi kepada pemerintah dalam memberikan penekanan lebih pada pengungkapan informasi khususnya aspek integritas. Pihak otoritas terkait seperti kementrian harus mendorong pengungkapan integritas sejalan dengan inisiatif pemerintah terhadap integritas dalam rangka membangun dan memelihara budaya dan integritas etis di antara semua tingkatan masyarakat. Hal ini juga bisa dijadikan tolok ukur bagi instansi pemerintah lainnya di negara mereka pengungkapan informasi tentang praktik integritas untuk menjaga integritas dan memelihara pekerjaan budaya disiplin tinggi dan peningkatan profesionalisme dalam rangka menjaga citra yang baik dari instansi pemerintah. Mengingat laporan tahunan yang diterbitkan dapat memengaruhi persepsi dan citra badan hukum Federal kepada publik pada umumnya, maka perlu untuk memberikan yang lebih baik pemahaman tentang praktik sehubungan dengan pengungkapan integritas di masyarakat Malaysia laporan tahunan sektoral (Siti, 2017).

2.2 Jujur, Tekun Dan Profesionalisme

Hal utama yang disyaratkan harus dipunyai setiap anggota profesi dalam hubungannya dengan profesionalisme dalam profesi, yaitu:

a. Memiliki keahlian, berpengetahuan, serta berkarakter (Machfoedz, 1997). Karakter dapat menunjukkan personalitas seorang professional.
b. Memiliki Sikap dan tindakan yang etis. Sikap dan tindakan etis akuntan sangat menentukan posisinya nanti dimasyarakat yang akan pemakai jasa profesionalnya.

Berbagai skandal akuntansi yang menimpa sebagian besar perusahaan publik seperti Enron, World Con, Xerox dan lainnya di Wall Street Amerika Serikat, serta kasus- kasus yang terjadi di Indonesia beberapa tahunini seperti Bank Bali, Bank Lippo, Telkom dan lainnyamenyebabkan krisis kredibilitas profesi akuntan dimana pelanggaran etikatersebut melibatkan sikap independensi yaitu sikap obyektivitas, kejujuran dan integritasnya. Dampaknya membuat masyarakat sekarang menganggap akuntan kurang berhasil dalam melindungi kepentingan publik.

Profesi Akuntan menetapkan dalam Kode Etik agar akuntan menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari masyarakat. Penilaian serta anggapan dari masyarakat atas independensi auditor ditekankan. Karena independensi merupakan masalah yang merujuk pada mutu pribadi auditor untuk dapat mempertahankan kebebasan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Pembahasan mengenai independensi selalu berhubungan dengan sikap mental ataupun moral, Independen disini yaitu tidak mudah dipengaruhi serta tidak dibenarkan untuk memihak kepentingan siapapun karena hal tersebut sangat krusial dalam mempertahankan judgement audit yang diputuskan oleh auditor atas kewajaran laporan keuangan (Roberts, 2009).

Benbasaat dan Dexter 1982 menjelaskan bahwa independensi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi hasil audit dari auditor. Kode etik menegaskan independensi adalah sikap yang harus dimiliki oleh Akuntan dalam menjalankan profesinya. Standar audit juga telah menetapkan bahwa independensi adalah suatu keharusan yang harus dipertahankan. Sikap independen dalam hal ini termasuk independen secara fakta (*in fact*) dan independen sesuai dengan yang terlihat (*in appearance).* Lubis (2002) menjelaskan

Independence in fact yaitu Akuntan harus bersifat obyektif (*objective*), tidak berpihak pada klien dan pihak manapun dan secara intelektual bersifat jujur serta mampu mempetahankan integritasnya (*integrity*) (Bernardi, 1994), (Wardana & Ariyanto, 2016).

Profesionalitas seorang Akuntan dalam melakukan audit akan memengaruhi kualitas hasil audit. Standar umum pemeriksaan menjelaskan bahwa auditor diwajibkan menggunakan dengan cermat dan seksama keahlian atau kemahiran profesionalnya dalam melakukan audit. Standar tersebut menuntut auditor memiliki keahlian di bidang akuntansi yang berlaku secara umum yang berkaitan dengan entitas yang akan diperiksanya (Batubara, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2009) memberikan bukti bahwa kecakapan professional *(due professional care)* adalah faktor yang paling memengaruhi kualitas audit. Kecakapan auditor dalam melakukan pemeriksaan merupakan kecakapan dalam berpikir dan selalu mempertanyakan serta melakukan evaluasi bukti auditnya secara lebih kritis dan teliti. Sehingga, seorang auditor dapat menghasilkan kualitas hasil audit sesuai dengan yang diharapkan.

2.3 Tanggung jawab Profesi sebagai Akuntan

Wewenang dan tanggung jawab audit internal dalam Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15), menjelaskan bahwa “Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam *charter* audit internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi”. Maksud dari penyataan tersebut bahwa tujuan, kewenangan serta tanggung jawab audit internal harus dinyatakan didalam dokumen tertulis secara formal. Sementara itu tanggung jawab audit internal dalam Standar Profesional Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001:322.1) secara terperinci menjelaskan “Audit Internal bertanggung jawab untuk menyediakan data analisis dan evaluasi, memberi keyakinan dan rekomendasi, menginformasikan kepada manajemen satuan usaha dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut. Audit Internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya”.

Kesimpulan atas wewenang dan tanggung jawab audit internal berdasarkan uraian di atas yaitu:

a. Auditor dapat memberikan saran-saran kepada manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab tentunya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik profesi yang berlaku sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
b. Audit internal juga bertanggung jawab memperoleh persetujuan dari manajemen senior serta dewan mengenai dokumen tertulis yang formal untuk bagian audit internal. (Tri Wulandari, 2017).

Tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai auditor harus dijalankan dengan tetap menjaga independensinya. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak tergantung pada orang lain dan tidak dikendalikan oleh pihak lain. Karenanya, dalam melaporakan hasil audit mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, auditor harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan Akuntan publik itu sendiri. Independensi dalam profesi Akuntan terdiri dari:

a. Independensi dalam sikap mental, yang merujuk pada kejujuran yang di dalam diri akuntan, mempertimbangkan fakta-fakta, bersikap obyektif tidak memihak di dalam diri Akuntan dalam menyatakan pendapatnya.
b. Penampilan, yang berarti adanya kesan masyarakat bahwa Akuntan publik bertindak independent. Sehingga, akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya. Independensi penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik, serta berpengaruh terhadap loyalitas seorang auditor dalam menjalankan tugas profesinya.
c. Komitmen profesi adalah tingkat loyalitas individu dalam pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman bagaimana berhubungan dengan klien, masyarakat, sesama rekan akuntan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Bagi akuntan publik, sangat penting untuk meyakinkan kualitas dasar profesionalnya baik kepada klien, masyarakat atau pemakai jasa. Hal ini disebabkan karena, semenjak awal tenaga profesional telah dididik untuk menjalankan tugas-tugas yang kompleks secara independen dan memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas dengan menggunakan keahlian dan dedikasi mereka secara

professional (Rezky, 2013).

Salah satu tanggung jawab yang dimiliki oleh auditor yaitu untuk mencegah dan mendeteksi adanya salah saji yang diakibatkan oleh kesalahan maupun kecurangan atau *fraud* tersebut. Untuk meminimalisir adanya salah saji yang tidak terungkap, maka auditor melakukan penilaian risiko terhadap klien (Dewi, 2014). Auditor harus secara khusus menaksir resiko salah saji material dalam laporan keuangan sebagai akibat dari kecurangan dan harus mempertimbangkan taksiran resiko ini dalam mendesain prosedur audit yang akan dilaksanakan. Dalam melakukan penaksiran ini, auditor harus mempertimbangkan faktor resiko kecurangan yang berkaitan dengan:

a. Salah saji yang timbul sebagai akibat kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun
b. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset untuk setiap golongan. Meskipun adanya faktor resiko tersebut tidak selalu menunjukkan adanya kecurangan, namun faktor–faktor tersebut telah diamati sering kali ada dalam keadaan yang di dalamnya terjadi kecurangan (spap 2011 : sa seksi 316).

Pada Lingkup standar, auditor perlu mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor risiko apa saja yang menyebabkan klien audit mereka melakukan tindak kecurangan tersebut. Jika risiko itu timbul atas dasar tindakan yang disengaja, diklasifikasikan sebagai kecurangan, namun jika risiko timbul karena perbuatan tidak disengaja maka disebut sebagai kekeliruan. Dalam mendeteksi kecurangan perlu dilakukan pemeriksaan kecurangan (*fraud auditing*). Pemeriksaan kecurangan merupakan pendekatan audit proaktif yang didisain untuk memberikan respon terhadap risiko kecurangan. Proses audit harus berdasarkan pada teori kecurangan. Khususnya selama tahap perencanaan audit, auditor harus menentukan tipe dan ukuran risiko kecurangan. Hal ini bisa dilakukan dengan melaksanakan penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) (Supradji, 2009:55).

Dilihat dari fenomena yang telah terjadi mengenai adanya kecurangan dan ditemukannya kasus pemeriksaan hasil laporan keuangan pada pemerintah dan ditemukannya bukti laporan yang terdeteksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, tidak ditemukan pada auditor internal. Hal ini menunjukkan bahwa, kualitas audit aparat inspektorat selaku

audit internal pemerintah masih relatif kurang baik. Temuan-temuan tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (Prasetyani, 2012). Dalam hal ini profesi auditor pemerintah menjadi sorotan bagi masyarakat dalam menjalankan tugasnya agar dapat dipercaya. Auditor harus melakukan penyempurnaan dalam hal pencapaian tujuannya agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Inspektorat Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Bagi unit audit internal, lingkungan pengendalian mendukung upaya penciptaan lingkungan anti *fraud* yang menempatkannya pada posisi kesempatan dan tantangan.

Upaya penciptaan lingkungan pengendalian dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga pemahaman tentang *fraud* telah diberi batasan dan definisi yang lebih konkrit. Sementara upaya lainnya adalah memperluas kewenangan dalam tanggungjawab pembuatan kebijakan anti-*fraud* di level pimpinan institusi, termasuk langkah-langkah pencegahan (*prevention*) dan pendeteksian (*detection*) *fraud.* Lingkungan pengendalian yang kondusif dapat mendorong peran auditor internal secara cepat membangun rencana tindak program pencegahan *fraud,* dan akan mendapatkan cara untuk memberi nilai tambah bagi organisasinya. Konsekuensinya pimpinan audit internal yang gagal mengantisipasi harapan/tuntutan para *stakeholder*-nya maka jabatan yang ia duduki menjadi taruhannya (Nurharyanto dan Widyaiswara, 2010).

Lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi dan peraturan yang terkait. telah meningkatkan tuntutan dan peran para pimpinan instansi, yang saat ini harus memandang *fraud* dan penyalahgunaan wewenang sebagai ancaman yang lebih besar. Mereka harus mampu mengarahkan penanganan permasalahan *fraud* secara lebih rinci dan dapat dioperasionalkan oleh pelaksana di lapangan. Pungujian pengendalian intern secara berkala yang dilakukan oleh para pucuk pimpinan instansi, akan menjadi tidak bermakna apabila *fraud* dalam skala besar terlambat diketahui terjadinya. Pimpinan instansi akan dihadapkan pada potensi kerugian yang besar, baik dari jumlah nilai uang, risiko reputasi, karir, bahkan ancaman hukum yang sangat berat (Bastian, 2003: 48).

2.4 Kepatuhan Hukum

Ketentuan Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX). Pimpinan bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan tahunan dan triwulan terkonsolidasi yang lengkap dan akurat sesuai dengan prinsip akuntansi ang diterima secara umum, dan dalam mempertahankan prinsip pelaporan akuntansi dan keuangan yang sesuai, dan kebijakan dan pengawasan internal yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap standa r, undang-undang, dan peraturan akuntasi.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:204), Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya, peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain.

Menurut Abdul Halim (2008:11), Internal audit adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi yang dihasilkan ditujukan untuk manajemen organisasi itu sendiri. SIM merupakan suatu sistem yang melakukan fungsi–fungsi untuk menyediakan semua informasi yang memengaruhi semua operasi organisasi.

Tanggung jawab audit internal berkaitan dengan fungsi audit internal, dengan melakukan kegiatan penilaian yang bebas, dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Kegiatan yang dilakukan dengan menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, audit intern menyediakan jasa tersebut (Mulyadi, 2002; 210-211).

Internal audit yang modern tidak lagi terbatas fungsinya dalam bidang pemeriksaan keuangan tetapi sudah meluas ke bidang lainnya seperti audit manajemen, audit lingkungan hidup, audit sosial, dan lain-lain. Bahkan mulai tahun 2000-an kegiatan internal audit sudah mencakup konsultasi yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan operasi suatu organisasi (Sukrisno Agoes, 2013).

Definisi *Internal Auditing* menurut Institute of Internal Auditor yang dikutip oleh Pickett (2010:15) audit internal adalah

kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan-kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Sebelum Milton Stevens Fonorow dalm bukunya "*Internal Audit Manual"* (1989) mengatakan:Internal auditing adalah suatu penilaian, yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih, mengenai ketelitian, dapat dipercayainya, efisiensi dan kegunaan dari catatan-catatan (akuntansi) perusahaan dan pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan.

Karena yang melakukan internal audit (disebut internal auditor) adalah pegawai perusahaan sendiri (orang dalam perusahaan), maka banyak pihak yang menganggap bahwa *internal auditor* tidak independen.Hal yang pasti bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usahanya, suatu perusahaan sangat memerlukan adanya internal audit departemen yang efektif, terutama di perusahaan menengah dan besar termasuk BUMN.

Apalagi dengan akan diberlakukannya perdagangan bebas di antara negara-negara di seluruh dunia, yang tidak lagi memperbolehkan adanya proteksi, maka setiap perusahaan, jika ingin bertahan di dunia bisnis, harus berusaha meningkatkan daya saingnya secara berkelanjutan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usahanya (Sukrisno Agoes, 2013).

Berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, yang tujuannya adalah memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang disusun manajemen, maka tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh *internal auditor* adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya (Sukrisno Agoes, 2013).

2.5 Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah "proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan". Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), istilah yang dipakai dalam pemeriksaan SPI adalah pengujian SPI, yaitu kegiatan pengujian terhadap sistem pengendalian intern yang meliputi pengujian terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern. Pengujian SPI ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pemahaman atas SPI yang dilakukan oleh auditor pada tahap perencanaan pemeriksaan. Pemahaman SPI dalam perencanaan pemeriksaan dimaksudkan untuk mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan *(misstatment and fraud).*

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan (Keputusan Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/K/I-XII.2/5/2008) dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah SPI telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara itu, pengujian implementasi SPI dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pihak yang terperiksa. Selanjutnya, pengujian Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya yang akan dilakukan oleh auditor. Selain berfungsi sebagai salah satu kriteria dalam penetapan opini, hasil pengujian atas SPI harus dituangkan dalam sebuah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI dalam hal jika dan hanya jika ditemukan kelemahan-kelemahan pengendalian intern selama pelaksanaan pemeriksaan.

2.6 Pemeriksaan Kepatuhan

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyatakan bahwa pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa pemeriksa

telah melakukan pengujian atas kepatuhan, SPKN mensyaratkan bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan harus diungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

Selain sebagai pertimbangan dalam penetapan opini sebagaimana disebutkan sebelumnya, pengujian atas kepatuhan harus dimuat dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam hal pemeriksa menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan keuangan. Laporan atas kepatuhan mengungkapkan:

a. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata, maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana, dan
b. Ketidakpatutan yang signifikan. Sama halnya seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (LHP SPI) , LHP atas kepatuhan diterbitkan jika dan hanya jika ditemukan ketidakpatuhan yang ditemukan oleh pemeriksa selama melakukan pemeriksaan.

Pengujian SPI dilaksanakan oleh pemeriksa dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan. Dalam pengujian SPI ini, pemeriksa melakukan pengujian dalam dua hal yaitu:

a. Pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi SPI, dan (2) pengujian implementasi sistem pengendalian intern. Dua hal tersebut penting untuk menentukan apakah desain SPI entitas telah dibuat secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan serta penerapannya dalam pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh entitas. Selanjutnya, hasil pengujian SPI ini menjadi dasar untuk menentukan strategi pengujian substantif laporan keuangan entitas, apakah mendalam atau terbatas. Selain itu, hasil pengujian SPI juga menjadi dasar untuk menentukan asersi-asersi dari laporan keuangan entitas seperti:
    1. Keberadaan dan keterjadian;
    2. Kelengkapan;
    3. Hak dan kewajiban;
    4. Penilaian dan pengalokasian;

5. Penyajian dan pengungkapan.

2.7 Pelaporan SPI

Pelaporan Sistem Pengendalian Intern SPI merupakan kegiatan yang *optional,* maksudnya diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (LHP SPI) hanya jika ditemukannya kelemahan-kelemahan pengendalian intern oleh pemeriksa selama pemeriksaan. Dalam hal ditemukannya kelemahan pengendalian intern, pemeriksa harus memahami sifat temuan tersebut dan mengungkapnya melalui cara-cara berikut:

1. Apabila temuan pengendalian intern tersebut secara material berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan, pemeriksa mengungkapkan uraian singkat temuan tersebut dalam LHP yang memuat opini atas kewajaran laporan keuangan sebagai alasan pemberian opini.
2. Pengungkapan semua temuan pengendalian intern secara terinci dilaporkan dalam Laporan atas Pengendalian Intern dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memengaruhi informasi keuangan maupun SPI yang berkaitan dengan pengamanan atas kekayaan entitas, yang bersifat material dan memengaruhi kewajaran laporan keuangan, maka pemeriksa akan memasukkannya sebagai salah satu aspek/kriteria sebagai dasar penentuan opini. Kelemahan SPI yang bersifat material dan memengaruhi kewajaran Laporan Keuangan tersebut harus diuraikan dalam LHP atas laporan keuangan beserta alasan lainnya yang memengaruhi opini sebelum opini disampaikan sehingga jelas sejauh mana kelemahan SPI tersebut menjadi dasar penentuan opini, hal ini berlaku dalam hal opini yang disampaikan adalah wajar dengan pengecualian/tidak menyatakan pendapat/tidak wajar.

Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (LHP SPI), mengungkapkan seluruh kelemahan dalam SPI entitas yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”, termasuk kelemahan-kelemahan SPI yang masuk sebagai pertimbangan opini sebagaimana diuraikan sebelumnya. Berikut beberapa contoh “kondisi yang dapat dilaporkan” menurut Pernyataan Standar Pemeriksaan nomor 3 SPKN:

a. Tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tujuan pengendalian yang layak.

b. Tidak ada *review* dan persetujuan yang memadai untuk transaksi, pencatatan akuntansi atau output dari suatu sistem.
c. Tidak memadainya berbagai persyaratan untuk pengamanan aktiva.
d. Bukti kelalaian yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau penggelapan aktiva.
e. Kelemahan yang signifikan dalam disain atau pelaksanaan pengendalian intern yang dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material atas laporan keuangan.

Pengungkapan temuan-temuan kelemahan tersebut dalam LHP SPI, juga harus mengungkapkan secara lengkap unsur-unsur temuan yang terdiri atas:

a. Kondisi,
b. Kriteria,
c. Akibat dan
d. Sebab secara jelas sehingga nantinya membantu manajemen untuk melakukan perbaikan atas kelemahan tersebut. Penjelasan masing-masing unsur adalah sebagai berikut :
    1) Kondisi, memberikan bukti mengenai hal-hal yang ditemukan pemeriksa di lapangan.
    2) Kriteria, memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan.
    3) Akibat, memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan pengaruh dari perbedaan antara apa yang ditemukan pemeriksa (kondisi) dan apa yang seharusnya (kriteria).
    4) Sebab, memberikan bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber perbedaan antara kondisi dan kriteria.

2.8 Ringkasan

Tugas audit internal ini untuk menjaga ketaatan pada prosedur, rencana kerja, serta penggunaan aset dan keuangan perusahaan. Ketika menemukan penyimpangan (*fraud*), atau kesalahan (*error*) audit internal akan melaporkan detail temuan tersebut kepada komite audit yang kemudian akan ditindaklanjuti

melalui audit investigatif yang melibatkan auditor profesional yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikasi CFE (*Certified Fraud Examiner*). Hasil dari proses audit investigasi ini hanya bisa dilakukan setelah adala laporan terjadinya penyimpangan (*fraud*) dari hasil audit internal. Sehingga jika ada indikasi kesalahan terjadi, bahwa seorang karyawan diduga melakukan penyelewengan tidak bisa dengan serta merta untuk bisa dilakukan tindakan, namun harus ada rekomendasi dari auditor internal yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam prosedur atau ketaatan dalam operasional kegiatan perusahaan.Sehingga, jika pada suatu ketika dalam sebuah perusahaan diduga telah terjadi kecurangan (*fraud*), yang dalam UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka audit investigatif adalah upaya yang harus dilakukan untuk membuktikannya, dan jika akan dilanjutkan ke proses hukum, maka bisa dilakukan dengan menggunakan audit forensik. Tanpa prosedur yang sesuai, maka dapat dikatakan bahwa proses investigasi tersebut cacat hukum yang dampaknya perusahaan bisa dipermasalahkan secara hukum.

2.9 *Discussion*

Discussion on 8 February 2018

IIA group discussion

Having a sound relationship with the board is crucial if internal audit functions are to serve their organizations well and provide effective assurance. Whether chief audit executives (CAEs) report directly to the board or, more likely, to an audit committee, it is vital that the two sides share an informed understanding of internal audit and its role and purpose within the organization. That is why educating the board about the level and nature of assurance internal audit provides is an important part of any CAE's role.

While that is an easy principle to grasp, achieving it in practice can be a difficult and prolonged journey for both sides. Explaining what internal audit can do and how the function should be positioned in the business is likely to be unhelpful, unless it is done in the context of the board's real-

life needs. "CAEs should be thinking about putting themselves in the shoes of the board members, and understanding what is on their agenda and why," says Ninette Caruso, CAE at Discover Financial Services in Riverwoods, Ill. Boards are more likely to be concerned with business issues such as profitable growth, dealing with competitors, net profits, and complying with pressing regulatory issues. If internal audit is not engaged in those areas, trying to educate the board about assurance is likely to feel too abstract and disconnected from the business.

Board Perspective

As internal audit begins to provide specific value and advice to the board in those parts of the business where it has genuine concerns, Caruso says it will be effectively educating the board about what true risk-based internal audit means to the organization by demonstrating the type and level of assurance it can provide. In doing so, internal audit will be greatly appreciated and recognized for it.

> *"Let's try to understand where the board is coming from and not waste time trying to add value to, say, a compliance audit if the board is not really interested in that area," Caruso says. "Instead, the internal audit function needs to focus on perhaps two main issues on the board's agenda at that particular point in time and to put all of its efforts into those areas."*
>
> *Getting issues onto the board's agenda that internal audit feels are important, but the board does not, can be more challenging. Caruso says it demands a level of storytelling that auditors are not often used to about what they have found and why that matters to the organization.*
>
> *"Even if the board only wants internal audit to check the controls put in place by management and risk functions, internal audit can still play an educating role by standing back and looking at themes that emerge from the interaction between different parts of the business," Caruso says. "Nobody may want that from internal audit until we bring it to them and they can see the value of it firsthand."*

A Clear Understanding

Louis Cooper, chief executive of the U.K.'s Non-Executive Directors' Association, a professional training and education membership organization based in London, understands how CAEs and nonexecutives think about each other. He agrees with Caruso when she says that CAEs often dive in, providing services that they believe the board will want without stepping back and asking some simple questions first — and listening to the responses.

As Caruso says, boards generally want to know what the key issues are and what the organization needs to do to respond to them. But building a picture of what the board wants can take time. "Internal audit often has a disjointed view of the board because of the limited contact it has with its members through various committees and because of the brevity of that contact,"

Cooper says. "Quite often, internal auditors only get pulled into the audit committee to present their report, so they often don't have ongoing dialogue with key board members, especially the audit committee chair."

In addition, internal auditors are busy people, he says, concerned with delivering their audit plans. That is why it is important for CAEs to schedule time within the audit plan, itself, for relationship building. Internal auditors can use those meetings to both strengthen their understanding of the board and explain how the function can serve the organization's broader needs.

"Having a clear understanding of the corporate governance framework within the organization enables people to connect the dots on the risks that have been identified in the organization," Cooper says. "Internal audit's knowledge of the organization and its related feedback on the effectiveness of the corporate governance framework is an element often missing from such conversations."

If the CAE can help the board come to grips with the control environment and help ensure management takes more ownership over some of the control processes, it can promote a better balance of activity based on management fulfilling its role in the Three Lines of Defense model. That helps move internal audit away from

low-level controls testing and into a more strategic risk-based auditing, the internal auditor's "holy grail," which can, in turn, free time in the audit plan for big-picture audits or consultancy-style projects.

Manage Expectations

Kristiina Lagerstedt, vice president, Audit and Assurance, at Sanoma in Helsinki, and a board member at Uutechnic Group, says internal audit departments can educate boards on the progress of big change projects. She has been working on information security and privacy readiness and maturity in preparation for the European Union's stringent new General Data Privacy Regulation (GDPR), set to come into force this year. Because Sanoma is operating in the media and learning sector, getting the rules right is crucial.

"When GDPR was introduced, I noticed there wasn't a common approach to privacy and information security within my company," she said. She raised the issue, and the company decided to establish a steering group to oversee preparations for the changes with the CEO as chair.

"I took care of the agenda for the first year and a half, and we met twice a quarter," she explains. Six months ago, when the steering committee agreed that the privacy and information security programs were up and running appropriately, it decided to meet quarterly and the agenda moved over to the chief information security officer. Lagerstedt is still involved, but with a smaller role.

"For a CAE, it is important to get involved in group-level change programs to ensure a common approach across businesses and countries," she says. Lagerstedt's main contribution was to keep the project moving and keep top management and the board up to speed on the progress made, the main risks faced and how they were being dealt with, and the maturity levels the business units had achieved on a quarterly basis.

"When you are pushing things forward and operating as a change agent (or consultant), it is sometimes confusing for people in the business to understand what the role of internal audit is and should be," she says. While internal audit took a front-line role in

the GDPR project in some respects, she aims to involve the business' external auditors in the next audit to help reassert internal audit's independence.

"Be brave in the tasks you take on," she says. "Think about the company doing the right thing, but also keep in mind your and your team's limitations to successfully manage expectations and not give promises you cannot keep." She says continual education about what internal audit does and can do is key to success. "Remember to keep top management and the audit committee informed about where you are, and what the next steps and most critical risks are," she advises.

Explain the Standards

IIA Standards

Although The IIA's International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing does not explicitly say that the internal audit function should educate the board, it can be inferred from the many ways in which auditors communicate and work with directors and management across the business. While there is obvious value in providing education as to the effectiveness of the governance processes within the organization, and the type of major risks change projects can bring about, does it make sense to try to educate the board about the Standards? After all, the Standards are meant to be the benchmark of audit quality.

"Effective communications enable the audit committee to work with internal audit leaders to better understand the internal audit process," Jim DeLoach and Charlotta Hjelm wrote in their 2016 CBOK Stakeholder Report, Six Audit Committee Imperatives: Enabling Internal Audit to Make a Difference. "To this end, directors should become more familiar with The IIA's International Standards."

Given the time constraints that both internal auditors and board members experience, is such a suggestion realistic or even desirable? According to evidence included in the report, the answer is yes. The quality and frequency of communication between CAEs and board members is greater among stakeholders familiar with the Standards, according to the report.

Specifically, two out of three board members are familiar with the Standards to some degree and almost all — 98 percent — see value in internal audit conformance.
"If audit committee members do not have adequate knowledge of the Standards, they should ask the CAE for more information about them and how internal audit is ensuring their conformance," DeLoach and Hjelm conclude.

For David MacCabe, a longtime CAE and an internal audit consultant based in Austin, Texas, informing the board that the internal audit function is conducting engagements in line with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing is on his list of the critical assurances the CAE should provide to the board.

"Some members of the board may have minimal experience in business operations, such as those in nonprofit organizations, and they may just be interested in the programs and the people they serve," he says. "But even in corporate America, there are some members of the board who may not be sure what their full duties and responsibilities are — and what the appropriate questions to ask as a responsible board member are."

Internal audit can help educate them about those duties and, in doing so, underline its own credibility and integrity by explicitly saying it adheres to these international standards, he says. "Even for experienced boards, it can be useful to demonstrate that you are committed to external quality reviews by independent practitioners so they will know you are a step above what they may have experienced elsewhere," he adds.

Build Relationships

Effective communication and other interpersonal skills are crucial to achieving that goal and, while MacCabe says today's auditors are generally more personable than in the past, there is room for improvement. In addition, The IIA's many useful tools and publications can help CAEs inform and educate the board about leading practices for internal audit teams and audit committees.

He agrees with other CAEs that progress can be slow, and trust and respect need to be earned both by

word and deed. Being proactive and available to management and staff in formal and informal settings can be a winning approach, MacCabe says. "It makes a world of difference to be open-minded, available, accessible, and approachable in the hallway, in the cafeteria, and wherever in the organization," he says. People are much more likely to share their concerns when you are friendly, and people get to know you.

He recalls one time when he brought a story he had heard through conversations with staff to a line manager. "The manager was worried I'd pass it on to his section head, but I gave him the option to act on it or not, and emphasized that it was not a complaint or concern, but an observation about something that may or may not be true," he says. Situations like this can help form great relationships because the auditor is then viewed as being available to discuss issues and provide informal advice for control improvements or remedial actions.

"Building those relationships throughout the organization from the board to the frontline of the business is crucial," MacCabe says. "Management often asked me to pass things onto the board, and that can be done either in confidence, or openly as they choose. Everyone benefits."

Commit to Improvement

Mac Cabe says internal audit also must be committed to continuous improvement through internal and external quality assessments (refer to Standard 1300 series) and by continually updating its knowledge of leading internal audit and management practices, as well as business and industry trends. For that, quality assurance reviews are particularly important — especially because they form a key part of conforming with professional standards. He says he worries that only 39 percent of survey respondents worldwide said they had such an external review, according to the Common Body of Knowledge (CBOK) 2015 Global Internal Audit Practitioner Survey.

"It's no use saying that we are professionals and then only being partly in conformance with our own Standards — that erodes our credibility," he says. He urges CAEs and all internal auditors to be committed to

achieving and demonstrating the highest professional standards. In striving to do so, auditors will become a more respected and vital source of knowledge and education on assurance for everyone in the business — especially the board.

Source: linkedin IIA group.

*****

BAB 3

KERAHASIAAN DAN OBJEKTIVITAS AUDITOR INTERNAL

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya. Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa. Auditor internal membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan mereka sendiri atau pun 1orang lain dalam membuat penilaian.

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip Obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menujukkan obyektivitas mereka di berbagai situasi. Anggota dalam praktik akuntan publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit intern yang bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan dan pemerintah. Mereka harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas. (Mulyadi, 2002).

3.1 Perlindungan Informasi

Auditor Internal harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugas mereka. Tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau yang dengan cara apapun akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan yang sah dan etis dari organisasi. Aspek-Aspek Keamanan Informasi: Keamanan informasi terdiri dari perlindungan terhadap aspek-aspek berikut ini:

a. *Confidentiality* (kerahasiaan), yaitu aspek yang menjamin kerahasiaan data dan informasi. Kerahasiaan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan.
b. *Integrity* (integritas), yaitu aspek yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa adanya kewenangan, menjamin keakuratan dan keutuhan informasi serta adanya perlindungan terhadap proses penjaminan integritas ini.
c. *Avaibility* (ketersediaan), yaitu aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia kapan saja saat dibutuhkan.

Beberapa langkah dalam melaksanakan program audit internal:

a. Mengkaji keselarasan sasaran unit operasional, direktorat, dan individu dengan tujuan perusahaan; Auditor Internal harus memastikan bahwa tujuan bisnis sudah diterapkan secara efektif dan telah dikomunikasikan ke seluruh tingkatan dalam organisasi.
b. Mengevaluasi efektivitas ketersediaan, kuantifikasi, dan penerapan selera dan batasan risiko (corporate risk appetite and risk tolerance) berdasarkan kebijakan dan prosedur di dalam perusahaan; Auditor Internal harus dapat memberikan keyakinan bahwa manajemen bekerja dalam parameter risiko yang telah ditetapkan.
c. Mendeteksi analisis kesenjangan praktik manajemen risiko dan prosedurnya berdasarkan kerangka kerja yang telah ditetapkan; Auditor Internal harus melakukan evaluasi terhadap proses implementasi kerangka kerja penerapan

manajemen risiko yang telah didokumentasikan dan diyakini dapat memfasilitasi perubahan dinamis perusahaan.

d. Menguji efektivitas dan perlindungan terhadap informasi dan akses terhadap pengendalian; Auditor Internal harus memahami rancangan pengendalian dan ketepatannya berhubungan dengan bagaimana suatu tindakan pengendalian tersebut dilakukan secara konsisten sesuai dengan arah dan kebijakan perusahaan.
e. Menyediakan jaminan independen dan berfungsi sebagai konsultan internal dalam rangka memastikan pencapaian tujuan perusahaan; Auditor Internal harus memberikan jaminan yang obyektif kepada Direksi bahwa risiko bisnis telah dikelola secara tepat dan pengendalian internal telah berjalan secara efektif.

3.2 Informasi Bukan Untuk Kepentingan Pribadi

Beberapa penelitian juga mengangkat isu yang terkait kepribadian auditor seperti integritas, kerahasiaan yang perlu dijaga dan independensi auditor hanya dapat dicapai dalamkontrol struktural sistem pengendalian internal pemerintah daerah dan bukan pengendalian procedural, tugas etik dan masalah kerahasiaan. Persyaratan karyawan untuk tidak mengungkapkan informasi yang diperoleh saat bekerja untuk Premi perusahaan Encarta, (2009). Asosiasi Akuntan Nasional Nigeria pada tahun 2007 menjelaskan kerahasiaan anggotanya sebagai berikut:

a. Anggota harus menghormati informasi rahasia yang diperoleh atau diterima oleh mereka selama melakukan pekerjaan mereka dan tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan hal tersebut informasi tanpa kewenangan yang tepat atau kecuali ada hak hukum atau tugas profesiona untuk mengungkapkan
    b. Anggota memperoleh atau menerima informasi rahasia dalam perjalanan mereka Pekerjaan profesional seharusnya tidak menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi mereka

keuntungan atau keuntungan dari pihak ketiga.

c. Ketika anggota Asosiasi Akuntan Nasional Nigeria mengubah mereka pekerjaan, mereka berhak menggunakan pengalaman yang diperoleh dari pekerjaan sebelumnya tapi bukan informasi rahasia dari deskripsi yang diperoleh atau diterima oleh mereka.
d. Pertanyaan yang mungkin timbul mengenai kepatutan mengungkapkan urusan pengusaha. Dimana anggota ragu-ragu apakah mereka memiliki hak atau kewajiban untuk mengungkapkannya jika seharusnya Sesuai, mulailah membahas masalah ini sepenuhnya di dalam organisasinya. Jika tidak sesuai atau jika gagal menyelesaikan masalah, mereka mungkin mempertimbangkan untuk mengambil nasihat hukum dan / atau berkonsultasi dengan Asosiasi.

3.3 Pengecualian Atas Tugas Kerahasiaan

Asosiasi akuntan nasional Nigeria (ANAN) pada tahun 2007 menyatakan bahwa meskipun Ada kewajiban kerahasiaan umum, ada pengecualian terhadap asas itu sebagaimana yang ditetapkan di bawah ini:

- Pengetahuan tentang Pelanggaran Serius : Anggota ANAN yang menemukan bahwa atasan mereka memiliki melakukan tindak pidana dapat memutuskan untuk mengungkapkan masalah tersebut kepada polisi dan tindakan tersebut tidak akan berarti pelanggaran kepercayaan. Seorang anggota tidak bertanggung jawab atas kerusakan pelanggaran kepercayaan dimana pihak berwenang diberitahu bahwa majikan telah terlibat aktivitas kriminal yang serius Dengan kata lain, anggota tidak dapat dikritik karena meniup peluit. Perintah Pengadilan untuk Mengungkapkan Informasi : Jika diperintahkan oleh pengadilan, anggota harus melakukannya membuat dokumen (atau mengizinkan mereka diperiksa), memberikan bukti atau menghadiri pengadilan.

- Anggota adalah Saksi Komprehensif : Dalam proses perdata atau pidana yang melibatkan atasan, anggota dapat dianggap sebagai saksi.
- Pengungkapan kepentingan anggota sendiri : Anggota dapat mengungkapkan kepada pihak berwenang yang berwenang informasi mengenai atasan mereka dimana kepentingan anggota sendiri memerlukan pengungkapan informasinya, misalnya:
    1. Memungkinkan anggota untuk membela diri dari tuntutan pidana atau untuk menghapusnya diri mereka dicurigai; atau
    2. Untuk menolak tuntutan hukuman karena pelanggaran perpajakan, untuk Contoh di mana disarankan agar mereka membantu atau menginduksi majikan membuat atau memberikan pengembalian atau akun yang salah; atau
    3. Menolak tindakan hukum yang diajukan terhadap majikan atau pihak ketiga orang; atau
    4. Memungkinkan anggota untuk membela diri terhadap proses disipliner; Atau
    5. Memungkinkan anggota untuk menuntut pelanggaran kontrak kerja.

    Jadi, disiplin di pemerintah daerah, tidak adanya kode etik; sebuah pernyataan lokal nilai pemerintah ditulis secara praktis, beserta contohnya sehingga pemerintah daerah karyawan dapat menghubungkan pernyataan dengan pekerjaan masing-masing. Sebagian besar auditor internal tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk melayani sedemikian kapasitas; sebenarnya mereka kebanyakan bukan anggota ICAN atau ANAN dll. Tugas etika auditor internal menurut memorandum keuangan adalah kejujuran, keberanian, bersikap tegas, tidak jahat, dan penyihir. Kewajiban kerahasiaannya adalah etika sebagian besar dari Auditor-General pemerintah daerah, yang memiliki tanggung jawab atas mengaudit laporan keuangan dewan pemerintah daerah.

3.4 Penggolongan kecurangan (*Fraud*)

Herman (2013) membagi kecurangan (*fraud*) dalam tiga tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

a. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*), dapat digolongkan dalam:
b. Kecurangan kas (*cash fraud*), meliputi pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang, seperti pemalsuan cek,
c. Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other assets*), berupa pencurian dan pemakaian persediaan/aset lainnya untuk kepentingan pribadi,
d. Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) dikategorikan dalam: (a) *Timing difference* (*improper treatment of sales*), mencatat waktu transaksi berbeda atau lebih awal dari waktu transaksi yang sebenarnya, (b) *Fictitious revenues*, menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (fiktif), (c) *Cancealed liabilities and expenses*, menyembunyikan kewajiban - kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan terlihat bagus, (d) *Improper disclosures*, perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi, (e) *Improper asset valuation*, Penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai, dengan prinsip akuntansi berlaku umum atas aset perusahaan dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.
e. Korupsi (*Corruption*) terbagi atas:
    1) Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, mengakibatkan dampak yang kurang baik terhadap perusahaan,
    2) Suap (*bribery*), penawaran, pemberian, penerimaan, atau permohonan sesuatu dengan tujuan untuk memengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis,

3) Pemberian illegal (*illegal gratuity*), pemberian *illegal* disini bukan untuk memengaruhi keputusan bisnis, tapi sebuah permainan. Hadiah diberikan setelah kesepakatan selesai,
4) Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*), pada dasarnya pemerasan secara ekonomik lawan dari suap. Penjual menawarkan member suap atau hadiah kepada pembeli yang memesan produk dari perusahaan.

Internal control merupakan suatu proses yang dapat berfungsi secara efektif apabila didukung oleh pimpinan organisasi, manajemen, dan seluruh personil dalam organisasi. *Internal control* yang didesain oleh manajemen organisasi memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Tercapainya efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional organisasi.
b. Reliabilitas (dipercayanya) laporan keuangan.
c. Kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan organisasi.

Tujuan *internal control* yang kedua yaitu reliabilitas laporan keuangan sangat tergantung pada proses transaksi yang didesain dalam sistem informasi akuntansi. Tujuan yang pertama dan ketiga berkaitan dengan sistem operasi perusahaan. Esensi dari kedua tujuan tersebut adalah untuk menjamin bahwa setiap personil dan fungsi dalam organisasi mematuhi kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh manajemen serta setiap kegiatan dilakukan secara efektif, artinya merupakan upaya yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi atau unit organisasi dan secara efisien artinya dengan menggunakan segala sumberdaya organisasi yang ada secara optimal. Untuk mencapai tujuan *internal control* bukanlah suatu hal yang mudah, karena banyak hambatan yang akan dihadapi oleh organisasi, salah satunya adalah perubahan peraturan perpajakan, perkembangan teknologi yang sangat cepat, resiko internal dan eksternal organisasi.

3.5 Komponen Struktur Pengendalian Intern

Untuk mencapai tujuan struktur pengendalian intern yang efektif, maka harus didukung oleh semua komponen struktur pengendalian intern, yang terdiri dari lima komponen, yaitu:

a. Lingkungan pengendalian (c*ontrol environment*);
b. Penilaian resiko (*risk assesment*);
c. Aktivitas pengendalian (*control activities*);
d. Informasi dan komunikasi (I*nformation and communication*); *and*
e. Pengawasan (*Monitoring*)

untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian dapat tercapai, demikian pula dengan pengaruh lingkungan penerapan teknologi.

a. Komponen *control environment*.

Setiap perusahaan harus memahami tingkat ekuatan lingkungan pengendalian internalnya. Lingkungan pengendalian adalah suatu kondisi dalam organisasi yang memiliki pengaruh terhadap pengendalian dan kesadaran orang-orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi. Lingkungan pengendalian merupakan komponen dasar dari semua komponen struktur pengendalian intern lainnya. Hal ini menyangkut sikap dan kesadaran dari pimpinan perusahaan, komite audit, manajer, pemilik perusahaan dan para pekerja yang terlibat dalam kegiatan perusahaan terhadap pencapaian tujuan perusahan. Lingkungan pengendalian ini terdiri dari tujuh sub komponen yang terdiri dari.

1) Filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen.
2) Integritas dan nilai etika.
3) Komitmen untuk kompeten.
4) Komite audit.
5) Struktur organisasi.
6) Penetapan wewenang dan tanggungjawab.
7) Praktik dan kebijakan sumberdaya manusia.

b. Filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen.

Manajemen harus berupaya keras untuk menciptakan lingkungan atau budaya yang dapat meminimalisasi terjadinya kecurangan penyajian laporan keuangan dan berbagai kesalahan lainnya. Upaya pertama adalah menyusun filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen perusahaan yang baik. Komponen ini merupakan suatu kehendak manajemen untuk melakukan tindakan yang positif. Tindakan ini berupa perilaku yang etis sesuai dengan kode etik profesi atau etika personal, yang dibangun secara formal melalui ketentuan etika perusahaan, yang menekankan pada pentingnya *internal control*, perlakuan dan perhatian yang adil kepada pegawai.

c. Integritas dan nilai etika.

Perilaku tidak etis dari manajer dan pegawai lainnya memiliki dampak yang tidak mendukung berfungsinya keseluruhan struktur pengendalian intern, karena dapat menimbulkan pengaruh negatif yang sangat besar dalam penegakkan kejujuran dalam proses pelaporan keuangan. Setiap perusahaan publik maupun non publik harus membuat suatu panduan etika tertulis mengenai ketentuan yang memandu arah yang baik bagi manajemen, bawahan dan pegawai. Manajemen harus melakukan tindakan yang proaktif untuk menjamin bahwa semua pegawai menyadari ketentuan etika perusahaan dan tanggungjawabnya.Komitmen untuk

d. kompeten.

Perusahaan harus merekrut pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya untuk mendorong inisiatif dan kreatifitas serta tanggap terhadap perubahan-perubahan. Selanjutnya departemen yang membutuhkan pegawai baru harus memilih dan menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya.

e. Komite audit.

Pimpinan perusahaan harus membentuk komite audit yang anggotanya terpisah dari kepengurusan pimpinan atau manajer puncak. Komite audit ini berperan secara aktif

dalam mengawasi kegiatan, kebijakan, dan praktik serta pelaporannya, juga bertindak sebagai penghubung antara pimpinan dan auditor eksternal serta internal. Anggota auditor internal juga dapat memberikan kontribusi lain berupa memiliki kemampuan untuk mendeteksi kekurangan sistem pengendalian dan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai dengan lebih dini.

f. **Struktur organisasi.**
   Struktur organisasi merupakan identifikasi dari rerangka hubungan formal organisasi untuk mencapai tujuan. Pusat pertanggungjawaban dan hubungan pelaporan juga digambarkan dalam bagan struktur organisasi.
g. **Penetapan wewenang dan tanggungjawab.**
   Otorisasi merupakan hak untuk memberikan perintah kepada subordinat atau bawahan berdasarkan garis formal organisasi. Tanggungjawab merupakan suatu kewajiban untuk melakukan tugas kewajiban dan akan diperhitungkan mengenai keberhasilan atau kegagalan yang dicapai. Metode yang digunakan dalam penetapan otorisasi dan tanggungjawab memiliki dampak yang sangat besar bagi unit organisasi yang bersangkutan dalam mencapai tujuan organisasi.
h. **Praktek dan kebijakan sumberdaya manusia.**
   Praktik dan kebijakan sumberdaya manusia ini berkaitan dengan rekruitmen pegawai organisasi dalam hal orientasi, training, motivasi, evaluasi, promosi, kompensasi, konsultasi atau nasehat, pemberhentian dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Tingkat efektifitas dari pengelolaan sumberdaya manusia dapat memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi kegiatan operasi perusahaan dan untuk memelihara integritas data.
i. **Komponen penilaian resiko.**
   Semua perusahaan memiliki ukuran, struktur, jenis industri, dan setiap perusahaan memiliki resiko internal dan eksternal. Resiko merupakan berbagai bentuk ancaman dan ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dalam pencapaian tujuan. Jika memungkinkan pimpinan organisasi

dilibatkan secara langsung dalam penilaian resiko. Pengkondisian awal untuk penilaian resiko memberikan kontribusi dalam penentuan tujuan organisasi yang dapat dicapai. Penilaian resiko dalam struktur pengendalian intern terdiri dari a) Mengidentifikasi dan menganalisis resiko relevan yang mungkin menghambat pencapaian tujuan organisasi, b). Menyusun rencana untuk menentukan bagaimana mengelola resiko yang dihadapi.

j. Komponen aktivitas pengendalian.

Setiap perusahaan harus membuat aktivitas pengendalian khusus berupa kebijakan dan prosedur untuk membantu manajemen dalam menjamin bahwa manajemen telah memberikan arahan yang tepat. Untuk memenuhi tujuan tersebut, aktivitas pengendalian tertentu diarahkan untuk menghadapi resiko tertentu yang telah diidentifikasi selama penilaian resiko. Subkomponen dari komponen kegiatan pengendalian ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan laporan keuangan dan kegiatan yang berkaitan dengan proses informasi yang dibagi lagi menjadi pengendalian umum terhadap seluruh kegiatan organisasi dan pengendalian aplikasi yang berkaitan dengan pemrosesan transaksi tertentu. https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7200/Bab%202.pdf?s.

k. Komponen komunikasi dan informasi.

Informasi harus diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan sehingga setiap pegawai dapat menggunakan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Sistem informai yang baik adalah yang dapat membantu manajemen dalam menjamin bahwa tujuan organisasi dapat dicapai. Manfaat utama dari sistem informasi akuntansi yaitu membantu pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang dibuat untuk mencatat, memproses, meringkas dan melaporkan transaksi perusahaan sesuai kejadian dan kondisinya dan menjaga aset atau kekayaan, hutang dan equity

perusahaan. Semua informasi harus dikomunikasikan secara efektif dalam organisasi kepada semua pegawai yang membutuhkan. Fungsi sistem informasi akuntansi yang baik yaitu dapat mengkomunikasikan informasi sesuai standar penyusunan laporan, ketentuan kebijakan, laporan akuntansi dan keuangan manual serta memorandum. Informasi juga dapat dikomunikasikan secara lisan, melalui grafik, dan secara elektronik. Langkah-langkah yang diambil oleh manajemen seperti membuat saluran terbuka untuk komunikasi, memberi kesempatan komunikasi dari bawah ke pimpinan puncak juga merupakan suatu ide yang baik.

I. Komponen *monitoring*. Tujuan dari *monitoring* adalah untuk menilai kualitas dari sistem pengendalian intern setiap saat dalam proses pelaksanaan kegiatan yang terus menerus secara terpisah maupun gabungan. Contoh dari kegiatan *monitoring* yang terus menerus seperti mengawasi pegawai dalam kegiatan sehari-hari, dan kegiatan *monitoring* secara terpisah seperti kegiatan pe-meriksaan yang dilakukan secara periodic

Kegiatan *monitoring* berkelanjutan dan secara terpisah dapat dilakukan oleh internal dan eksternal audit. Penilaian terhadap struktur pengendalian intern dan catatan akuntansi paling baik dilakukan oleh auditor. Auditor internal adalah auditor yang ditetapkan oleh perusahaan yang berfungsi untuk menilai kegiatan perusahaan dan menguji serta mengevaluasi efektivitas *internal control* secara independen dan mengusulkan alternatif kegiatan yang efisien dan efektif. Auditor eksternal secara periodik melakukan verifikasi dan pemeriksaan secara independen laporan keuangan perusahaan. Eksternal audit juga dapat memberikan informasi kepada manajer mengenai tingkat efektifitas *internal control* dan pendapatnya terhadap laporan keuangan organisasi.

Meskipun banyak upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui penerapan struktur pengendalian intern yang baik. Namun hal tersebut, belum menjamin hilangnya berbagai resiko atau ancaman yang menghambat manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. Risiko atau *risk eksposure* mungkin berasal dari internal maupun

eksternal perusahaan seperti pegawai, pelanggan, *computer hacker*, kejahatan dan tindakan lainnya. Resiko berubah setiap saat sesuai kondisi, termasuk ketika memperkenalkan teknologi komunikasi baru yang canggih dan restrukturisasi. Untuk mendesain struktur pengendalian intern yang baik Akuntan dan pembuat sistem harus dapat menilai resiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam mencapai tujuan. Penilaian resiko termasuk di dalamnya adalah mengidentifikasi resiko yang relevan, tingkat resiko dan mengelola resiko dengan mengusulkan prosedur pengendalian yang efektif. Tipe-tipe resiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya adalah:

a. *Unintentional error*. Kesalahan mungkin timbul ketika menginput data, seperti input nama konsumen atau nomor, dapat juga terjadi ketika pemrosesan data, ketika pegawai klerikal keliru mengentri data kuantitatif, seperti nilai rupiah, unit persediaan dan lain-lain. Kesalahan ini sering terjadi dan biasanya terjadi secara random. Tetapi kesalahan tersebut dapat juga terjadi secara konstan apabila kesalahan timbul akibat dari kesalahan dalam pembuatan program dalam mengeksekusi data. Akibat dari kesalahan ini data menjadi tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Kesalahan yang tidak konstan terjadi karena pegawai kurang memahami tugasnya, kelelahan, ceroboh, dan kurang diawasi.
b. *Deliberate error*. *Deliberate error* sama dengan kecurangan atau penipuan yaitu suatu tindakan untuk mengambil manfaat secara tidak adil dan tidak sah. Penyimpangan mungkin terjadi ketika menginput data, selama pemrosesan, atau ketika output dihasilkan. Kecurangan ini dapat pula berupa pencurian dari aset perusahaan.
c. *Unintentional losses of asset*. Asset perusahaan mungkin dapat hilang atau salah penempatan secara tidak sengaja. Seperti contoh mungkin terjadi persediaan yang diterima dari *suplier* disimpan pada gudang yang salah.
d. *Thefs of asset*. Asset perusahaan mungkin hilang dicuri oleh pihak luar perusahaan, seperti pencuri yang membobol pintu perusahaan dan mengambil barang berharga milik

perusahaan, tetapi mungkin juga kasir membawa kas yang diterimanya melalui surat atau pegawai mengambil peralatan milik perusahaan.

e. *Breaches of security* (pelanggaran peraturan). Seseorang yang tidak berwenang mungkin dapat mengakses laporan keuangan dalam komputer. Kejahatan komputer (*hacker*) dapat terjadi dengan membobol komputer perusahaan melalui komputer lain, karyawan mengintip daftar laporan gaji, demikian juga jika pesaing dapat mengakses rencana pemasaran perusahaan.
f. *Acts of violent and natural disaster* (tindakan menyimpang dan bencana alami). Tindakan yang dapat merusak aset perusahaan, termasuk data. Hal ini dapat terjadi ketika perusahaan akan menghentikan kegiatan perusahaan karena bangkrut, akibatnya karyawan mungkin melakukan sabotase terhadap fasilitas komputer seperti menghancurkan data konsumen. Walaupun tindakan kasar dapat dilakukan oleh pihak luar, hal inipun dapat dilakukan oleh pegawai. Kerusakan aset perusahaan juga dapat terjadi bukan karena tindakan manusia tetapi diakibatkan oleh bencana yang sifatnya alami seperti kebakaran dan kebanjiran dan hal inipun harus diantisipasi oleh organisasi sebelum terjadi (Alek, 2010).

3.6 Pencegahan terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*)

Menurut Tunggal (2010: 231) Kecurangan dapat dicegah dengan cara-cara:

a. Membangun sistem pengendalian intern yang baik,
b. Mengefektifkan aktivitas pengendalian meliputi: review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, pemisahan tugas, c) Meningkatkan kultur organisasi dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG),
c. Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada yang berprestasi,
d. Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan baik hal keuangan atau non keuangan,

e. Menetapkan kebijakan erusahaan terhadap pemberian-pemberian dari agar jelas mana yang hadiah, mana yang resmi dan mana yang berupa sogokan,
f. Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit diemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja,
g. Menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan kecurangan, hendaknya diketahui oleh staf agar diproses pada jalur yang benar (Shindy Permana Putra Wiyandika, 2017).

3.7 Menjaga Profesionalisme

Kualifikasi audit internal yang memadahi harus memiliki hal-hal berikut ini ; (1) Independensi Audit Internal, independensi memungkinkan audit internal untuk melakukan pekerjaan audit secara bebas dan objektif, juga memungkinkan audit internal membuat pertimbangan penting secara netral dan tidak menyimpang. Independensi dapat dicapai melalui status organisasi dan objektivitas. Independensi menyangkut dua aspek yaitu :

a. Status organisasi, haruslah berperan sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tugas dengan baik serta mendapat dukungan dari pimpinan tingkat atas, status yang dikehendaki adalah bahwa bagian audit internal harus bertanggung jawab pada pimpinan yang memiliki wewenang yang cukup untuk menjamin jangkauan audit yang luas, pertimbangan dan tindakan yang efektif atas temuan audit dan saran perbaikan.
b. Objektivitas, yaitu bahwa audit internal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya harus memperhatikan sikap mental dan kejujuran dalam melaksanakan pekerjaannya.

   Agar dapat mempertahankan sikap tersebut hendaknya audit internal dibebaskan dari tanggung jawab operasionalnya:

   Kompetensi Audit Internal, yang meliputi:

a. Keahlian, audit internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi audit Internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
b. Kecermatan Profesional, audit internal menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layaknya dilakukan oleh seorang audit internal yang kompeten dengan mempertimbangkan ruang lingkup penugasan, kompleksitas dan materialitas yang cukup dalam penugasan, kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan penggunaan sumber daya dalam penugasan, penggunaan teknik-teknik audit dan teknik analisis lainnya.
c. Program Audit Internal, Untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan terarah maka pada saat audit dimulai, audit internal terlebih dahulu menyusun suatu perencanaan atau program audit yang akan dilakukan. Program

3.8 Objective Centric Erm And Internal Audit Building Momentum Iia Discussion Group

When COSO issued COSO ERM 2017 last summer they provided strong support for "objective centric" ERM. COSO called risk centric/risk register based ERM the "least integrated" and, by extension, least effective form of ERM. ISO 31000 revision expected out soon amplifies the call to focus risk assessment efforts on end result objectives. My Linked In post last fall asking who was going to report risk register based ERM as "least integrated" and, by extension, least effective form of ERM to C-Suites and boards broke all prior records for views and likes. I encourage all readers to consider the business case for objective centric ERM/IA and the free tools we offer to end users to implement.

BAB 4

KOMPETENSI AUDITOR DAN KEDISIPLINAN TERHADAP KODE ETIK

Inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah mengenai penerapan budaya integritas dalam organisasi sektor publik dan pada perusahaan swasta atau organisasi lainnya sangatlah penting, terutama unsur-unsur integritas di dalam laporan tahunan meskipun tidak ada persyaratan khusus untuk pengungkapan tersebut. Pihak otoritas terkait seperti kementrian harus mendorong pengungkapan integritas sejalan dengan inisiatif pemerintah terhadap integritas dalam rangka membangun dan memelihara budaya dan integritas etis di antara semua tingkatan masyarakat. Hal ini juga bisa dijadikan tolok ukur bagi instansi pemerintah lainnya di negara mereka. Pengungkapan informasi tentang praktik integritas untuk menjaga dan memelihara pekerjaan budaya disiplin tinggi dan peningkatan profesionalisme dalam rangka menjaga citra yang baik dari instansi pemerintah. Mengingat laporan tahunan yang diterbitkan dapat memengaruhi persepsi dan citra badan hukum dan pemerintah kepada publik pada umumnya. Maka, untuk itu perlu memberikan yang lebih baik pemahaman tentang praktik sehubungan dengan pengungkapan.

4.1. Layanan Sesuai Pengetahuan, Keterampilan dan Pengalaman

Di zaman teknologi saat ini, penipuan telah menjadi sangat rumit, dan semakin sulit untuk dideteksi, terutama ketika itu adalah kolusi di alam dan dilakukan oleh manajemen puncak yang mampu menyembunyikan itu. Akibatnya, auditor berpendapat bahwa deteksi penipuan tidak menjadi tanggung

jawab mereka. Penipuan mungkin didefinisikan sebagai penipuan yang disengaja, kecurangan atau mencuri dan dapat dilakukan terhadap pengguna seperti investor, kreditur, pelanggan atau badan pemerintah (Weirich dan Reinstein, 2000).

Berdasarkan hal tersebut, seorang auditor harus memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan yang memadai dan pengalaman agar dapat dengan mudah mendeteksi kecurangan yang kemungkinannya terjadi dalam perusahaan atau sebuah organisasi. Auditor mengklaim bahwa mereka tidak bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan, tetapi bahwa deteksi penipuan adalah tanggung jawab manajemen dan audit yang tidak dirancang, dan tidak dapat diandalkan, untuk tujuan ini (Porter, 1997). SAS 1 (AU110) Kodifikasi Prosedur dan Standar Audit menyatakan bahwa:

"Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan atau penipuan. Karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh wajar, namun tidak mutlak, jaminan bahwa salah saji material terdeteksi." (Arens et al., 2003, hal. 138).

Fakta bahwa auditor di Barbados tidak melihat deteksi penipuan sebagai tanggung jawab mereka, melainkan melihat peran mereka sebagai mengekspresikan pendapat yang independen atas laporan keuangan merupakan indikasi bahwa mereka masih perlu menyadari bahwa penipuan terdeteksi bisa mendistorsi temuan mereka dan memengaruhi keandalan laporan mereka. Di atas semua, dari sudut pandang etika, auditor eksternal serta auditor internal harus melaporkan setiap dugaan penipuan daripada tetap diam (Philmore, 2005).

4.2. Kepatuhan pada Standar Profesional Audit Internal

Etika merupakan faktor penting dalam merencanakan dan melakukan audit, karena kode etik dapat memengaruhi kualitas audit. Kode etik dapat memengaruhi kelayakan organisasi auditing dan auditor individu (Mills, 1989). Kode etik sangat

penting utuk membantu auditor mencapai objektivitas penuh dalam pengamatan dan analisis selanjutnya. Integritas merupakan faktor terpenting pada kode etik. Auditor diwajibkan untuk mematuhi standar etika tidak hanya pada saat melakukan pekerjaan mereka tetapi juga pada saat berkomunikasi dengan staf organisasi yang diaudit. Auditor juga diharapkan untuk menjunjung tinggi prinsip independensi dan objektivitas, mempertahankan standar perilaku profesional, dan membuat keputusan berdasarkan kepentingan umum tanpa menghilangkan prinsip kejujuran yang diwajibkan bagi setiap auditor.Auditor harus bersifat independen tidak hanya pada organisasi yang diaudit, tetapi juga harus obyektif dalam menghadapi masalah lain yang berkaitan dengan tugas seorang auditor.

Menurut Percy (2007), pengguna laporan keuangan mencari praktik audit yang meliputi tugas sebagai berikut: akun tersebut benar; perusahaantidak akan gagal; perusahaan akan menjaga terhadap kecurangan dan kesalahan; perusahaan akan bertindak sesuai peraturan; perusahaan akandikelola dengan kompeten; dan perusahaan akan mengadopsi sikap bertanggung jawab terhadap faktor lingkungan dan sosial.Pengalaman audit berkaitan dengan berapa lama auditor bekerja dan berapa banyak keterlibatan auditlengkap. Secara teknis, keahlian audit akan meningkat dengan pengalaman lebih dalam melakukan tugas audit. Pengalaman akan memberikan kualitas audit yang lebih banyak, terutama dalam melakukan asesmen audit. Coklin (1993) mengemukakan, Seseorang dengan pengalaman lebih dalam bidang tertentu memiliki kemampuan lebih dalam mengembangkan kasus spesifik yang berkaitan dengan pengalaman audit. Integritas penting bagi auditor untuk bertindak, dan dengan integritas, yang tidak hanya membutuhkan kejujuran tapi jugaberbagai kualitas terkait seperti keadilan, kejujuran, keberanian, kejujuran intelektual, dan kerahasiaan. Integritas mensyaratkan auditor tidak terpengaruh dengan kepentingan pihak-pihak tertentu yang saling bertentangan dengan prinsip auditor (Milos, 2012).

Konflik kepentingan mungkin timbul dari pekerjaan pribadi, keuangan, bisnis, pekerjaan, dan hubungan lainnya. Rai (2008), menyatakan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki kualitas pribadi yang baik, memadai dari segi pengetahuan, serta keahlian khusus di lapangan. Dalam melakukan peran audit, mereka bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit tersebut dengan memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material atau tidak. Dengan demikian, integritas etis adalah salah satu dari banyak kemampuan yang harus dimiliki oleh auditor internal. Auditor internal wajib menjaga kepercayaan dan objektivitas dalam tindakan mereka. Auditor internal harus peka untuk mengenali masalah etika, menganalisis semua yang fakta relevanyang berkaitan dengan isu-isu dalam kode etik dan standar, dan memperingatkan manajer senior dan jajarannya jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kode etik merupakan tugas auditor internal.

Auditor dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan objektivitas auditor sangat memengaruhi kualitas audit. Meningkatnya objektivitas auditor menunjukkan bahwa auditor yang dapat bertindak adil tanpa tekanan atau permintaan yang dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu yang tertarik pada audit, akan menolak untuk menerima Audit jika pada saat yang sama memiliki hubungan kerjasama dengan pihak yang diteliti, akan ketidakberpihakan kepada siapapun yang memiliki minat dalam hasil kerja, serta dapat diandalkan dan terpercaya. Objektivitas auditor dapat dikembangkan dengan memiliki kemauan untuk melakukan audit dasar don standar yang berlaku umum di indonesia dan situasi nyata, sehingga auditor akan adil dan tidak subjektif dalam melakukan audit. Jadi objektivitas auditor dalam mengaudit sangatlah penting agar tidak terjadinya kecurigaan dari pihak-pihak yang membutuhkan opini audit karena dengan objektivitas auditor tidak berpihak kepada perusahaan yang di periksanya (Olivia, 2015).

Terlepas dari peran kuat yang dimainkan oleh auditor eksternal dalam sebuah organisasi, perannya Dalam komite

audit tidak dapat dikompromikan untuk mempromosikan tata kelola perusahaan. Terlepas dari kenyataan bahwa Auditor Independen harus melaksanakan audit terhadap perseroan terbatas, harus diperiksa dan keseimbangan dan ini hanya bisa dilakukan melalui pembentukan komite audit yang berkomitmen terhadap Direksi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kegiatan komite audit meningkatk an tata kelola perusahaan organisasi melalui audit laporan keuangan, penetapan dan penelaahan terhadap pengendalian internal dan memperbaiki kebijakan akuntansi yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kegiatan komite audit dan integritas laporan keuangan, yang meningkatkan kualitas perusahaan tata kelola dan mencegah kegagalan perusahaan. Studi tersebut merekomendasikan bahwa komite audit yang berkomitmen seharusnya menetapkan dan anggota yang ditunjuk harus memiliki kemampuan analisis dengan latar belakang keuangan yang kuat. Itu akan pergi jauh untuk mengekang kegagalan perusahaan terus-menerus di Nigeria (Kenneth, 2012).

Karyawan perusahaan dengan beberapa kasus yang telah terjadi sengaja melakukan *fraud* sehingga internal auditor juga memprediksi kemungkinan resiko yang akan dihadapi. Hal ini disebut dengan penentuan ruang lingkup pengendalian. Pengendalian internal secara klasik dan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) menekankan pada kelengkapan instrument. Adapun pengendalian yang dilakukan dengan instrument sebagai berikut:

a. Dokumen perencanaan bisnis (*Business Plan*) dan Evaluasi Kinerja (*Performance Evaluation*)
b. Struktur Organisasi, fungsi dan pemisahan tugas dan rentang kendali,. Semakin bagus rentang kendali dalam setiap organisasi, maka semakin ringan pekerjaan internal audit dalam pengambilan sampel ataupun dalam pengawasan.
c. Uraian jabatan dan tingkatnya dalam organisasi sehingga

jelas pelimpahan wewenang, ini akan memudahkan internal auditor untuk menelusuri kejadian-kejadian ekonomi yang akan mengarah kepada tindak kecurangan.

d. Sistem akuntansi, pelaporan keuangan.
e. Rencana anggaran, pengendalian anggaran akan memudahkan mengevaluasi mulai dari perencanaan bisnis, apa yang dianggarkan atau diprioritaskan dengan tujuan yang akan dicapai.
f. Sistem Informasi manajemen, ini akan memeberi kemudahan dan efektifitas pencapaian dan evaluasi.
g. Uji kepatuhan (*Compliance Audit*) atas terlaksana SOP dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku serta tidak penangkalan terhadap *fraud.* Sementara, COSO memperkenalkan 5 kerangka pengendalian:
    a) Lingkup Pengendalain *(Enviromental Control*).
    b) Penilaian Risiko (*Risk Assesment*).
    c) Prosedur Pengendalain (*Procedure Control*).
    d) Monitoring
    e) Informasi dan Komunikasi

Framework:

Tujuan utama dilakukannya kerangka COSO adalah

a. *Effectiveness and efficiency of operations*

b. *Reliability of financial reporting*
c. *Compliance with applicable laws and regulations"*

1. *Control Environment*
   a) *Integrity and Ethical Values*
   b) *Commitment to Competence*
   c) *Board of Directors and Audit Committee*
   d) *Management's Philosophy and Operating Style*
   e) *Organizational Structure*
   f) *Assignment of Authority and Responsibility*
   g) *Human Resource Policies and Procedures*

2. *Risk Assessment*

   a) *Company-wide Objectives*
   b) *Process-level Objectives*
   c) *Risk Identification and Analysis*
   d) *Managing Change*

3. *Control Activities*
   a) *Policies and Procedures*
   b) *Security (Application and Network)*
   c) *Application Change Management*
   d) *Business Continuity/Backups*
   e) *Outsourcing*

4. *Information and Communication*

   a) *Quality of Information*
   b) *Effectiveness of Communication*

5. *Monitoring*

   a) *Ongoing Monitoring*
   b) *Separate Evaluations*

c) Reporting Deficiencies

*****

BAB 5

PENTINGNYA MELAKUKAN AUDIT MANAJEMEN BAGI SEBUAH INSTITUSI

Audit internal pada saat ini sangat diperlukan diberbagai institusi, tidak terkecuali untuk pengawasan sehari-hari atas perusahaan dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan efektif tanpa mengurangi tanggungjawabnya *(Gusnardi, 2008).* Pada aspek non akademik kedudukan audit internal sebagai *supporting activity* seperti; keuangan, asset, organisasi, sumberdaya manusia dan kemahasiswaan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan perguruan tinggi. Biaya pendidikan di perguruan tinggi berasal dari mahasiswa yang merupakan dana masyarakat. Hal tersebut akan menuntut pertanggungjawaban yang jelas, pengelolaan dan pengawasan yang baik. Pengelolaan dana membutuhkan sistim perencanaan, pengelolaan dan pelaporan, hal tersebut akan rawan sekali terjadinya *fraud*, baik itu penyalahgunaan asset (*Asset Misappropriation*) karena jumlah asset yang ada dilingkungan perguruan tinggi cukup banyak, fraud dalam penerimaan biaya pendidikan mahasiswa, biaya marketing atau biaya praktik mahasiswa yang cukup tinggi juga bisa menjadi celah atau jalan untuk melakukan fraud. Pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya perilaku penyimpangan melalui pengendalian internal (*internal control system*). (Meikhati & Rahayu, 2015).

Akreditasi perguruan tinggi sangat bergantung pada mutu dan dilakukannya audit secara independen baik audit mutu maupun audit internal keuangan secara independen. Dalam pengelolaan perguruan tinggi juga mengusahakan bagaimana untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.

Tantangan ini selalu ada karena manajemen memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi manajemen harus menghadapi situasi kelangkaan sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat perencanaan yang tepat dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung operasional yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan yang dibuat mencakup batas-batas operasional yang akan dilakukan, baik luasnya cakupan operasional pelaksanaan perencanaan, maupun konsumsi sumber daya, laporan kinerja. Perencanaan yang disusun secara tepat dapat memberikan arahan berjalannya operasi yang efisien dan efektif mampu mencapai tujuan organisasi. Hal ini yang mendorong perlu adanya audit manajemen untuk mendukung jalannya suatu usaha.

Audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi organisasi berupa suatu rancangan sistematis untuk mengaudit aktivitas, program yang digunakan keseluruhan atau sebagian dari entitas untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien dan apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan telah dicapai dan tidak melanggar ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan organisasi untuk pelayanan dan pencapaian Tridharma. Pencapaian kinerja tersebut bisa tercapai jika pengelolaan manajemen secara baik dengan prinsip *accountability* secara komprehensif dan komitmen memberantas korupsi dalam pencapaian kinerja organisasi tersebut (Cassel, 2007); (Palmer, 1993). (Accounting, 2010); (Gomes, Alfinito, & Albuquerque, 2013).

Audit manajemen digunakan untuk memastikan seberapa baik manajemen, baik dalam hubungan eksternalnya dengan pihak luar maupun efisiensi internalnya. Pemeriksaan dilakukan terhadap *smoothness* organisasi, mulai dari level teratas sampai level terbawah. Istilah auditing digunakan untuk menguraikan rentang luas kegiatan dalam masyarakat kita. Sebelum membahas tentang jenis-jenis audit dan auditor yang berbeda, kita akan meneliti berbagai definisi auditing sehingga dapat

diidentifikasi sejumlah ciri ciri umum sebagian besar kegiatan auditing modern.

"*Report of the comitte on basic auditing concepts of the American accounting Associatition" (Accounting Review, vol 47*) memberikan definisi auditing sebagai "suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan". (Boynton C. William, Johnson N. Raymond, Kell G. Walter. 2003).

5.1 Jenis-jenis Audit

Tiga jenis audit yang ada umumnya menunjukkan karakteristik kunci yang tercakup dalam definisi auditing yang telah disampaikan di atas. Jenis Jenis audit tersebut adalah audit audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Sifat dasar dari setiap jenis audit akan diuraikan secara singkat oleh Boyton sebagai berikut sebagai berikut:

a. Audit Laporan Keuangan

   Audit laporan keuangan (*financial statement audit*) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada internal audit dilakukan oleh lembaga internal audit dalam organisasi yang bersifat independen untuk menilai jalannya proses pencatatan dan pelaporan dengan memeroleh bukti kemudian memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk proses perbaikan selanjutnya. Selain itu, auditor eksternal juga menyiapkan laporan kepada dewan direksi tentang pengendalian intern perusahaan serta temuan- temuan audit lainnya. Auditor laporan keuangan dapat menurunkan risiko rendahnya kepercayaan *stakeholders* dengan tidak menggunakan informasi yang

bermutu rendah dan kembali meningkatkan *trust* terhadap pengelolaan organisasi.

b. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan (*compliance audit*) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan ketentuan, atau peraturan tertentu. Kriteria yang ditetapkan dalam audit jenis ini dapat mengeluarkan kebijakan atau ketentuan yang berkenaan dengan kondisi kerja, partisipasi dalam program pensiun, serta pertentangan kepentingan. Audit kepatuhan juga harus didasarkan pada kriteria yang diteapkan auditor. Aplikasi yang paling luas dari audit kepatuhan berkaitan dengan kriteria yang didasrakan pada ketentuan pemerintah. Audit kepatuhan menilai keseuaian dengan standar operasional prosedur dan ketaatan terhadap aturan-aturan pemerintah dan organisasi yang terkait dengan transaksi tersebut. Sebagai contoh, perusahaan harus mematuhi sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan tenaga kerja. Seperti *Equal Employement Opurtunity Act* dan *fair labor standards Act*, demikian pula halnya dengan para kontraktor pertahanan yang harus mematuhi berbagai persyaratn kontrak pemerintah.

c. Audit Operasional

Audit Operasional berkaitan dengan kegiatan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Audit jenis ini disebut juga sebagai audit kinerja atau audit manajemen suatu perusahaan bisnis, lingkup audit ini dapat meliputi seluruh kegiatan dari (1) suatu departemen, cabang, atau divisi atau (2) suatu fungsi yang mungkin merupakan fungsi lintas unit usaha, seperti pemasaran atau pengolahan data. Audit operasional pada pemerintah dapat dilakukan pada seluruh kegiatan dari (10 suatu lembaga, seperti Federal Emergency Management (FEMA), atau (2) suatu program tertentu. Kriteria digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas

dapat ditentukan oleh manajemen atau lembaga yang berwenang *(Boynton at all, 2003).*

5.2 Manajemen Audit

Management audit , disebut juga operasional audit, *functional* audit, audit sistim informasi, merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secar efektif, efisien, dan bersifat ekonomis.

Agoes (2013) menjelaskan tujuan dari management audit adalah untuk:

a. Menilai kinerja (*performance)* manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan terutama capaian dari target kinerja.
b. Menilai apakah berbagai sumber daya (Manusia, mesin, dana, harta lainnya) yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan bersifat ekonomis.
c. Menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan (*objective*) yang telah ditetapkan oleh *top management* terutama ketepatan waktu atau *schedule*.
d. Dapat memberikan rekomendasi kepada *top management* untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi, dan efektivitas dari kegiatan operasi perusahaan.

5.3 Fungsi Audit Management

Tujuan pemeriksaan intern adalah untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab secara efektif dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif dan independen mengenai kegitan/hal-hal yang diperiksa untuk mencapai keseluruhan tujuannya, maka auditor internal harus melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:

a. Memeriksa, menilai dan mengumpulkan bukti-bukti baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.
b. Memeriksa keseuaian dan kepatuhan manajemen dalam menjalankan kegiatan hubungannya terhadap kebijakan,rencana,dan prosedur yang telah ditetapkan.
c. Memeriksa sampai sejauh mana aset perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
d. Menilai prestasi kerja pimpinan dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan.

Hery (2017) menjelaskan tujuan utama pemeriksaan intern adalah untuk menyakinkan:

a. Kendalan Informasi

   Auditor internal dapat meninjau keandalan (realibilitas dan integritas) berbagai informasi finansial dan *non financial* dan pelaksanaan pekerjaan atau operasi, serta berbagai cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informas dalam bentuk rekomendasi terhadap manajemen.

b. Kesesuaian kegiatan dengan kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan perundang-undangan.

   Pemeriksa internal harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuainanya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur,ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang dimiliki. Jadi auditor intern bertanggung jawab dalam menentukan apakah sistem tersebut telah cukup dan efektif serta apakah berbagai kegiatan yang diperiksanya benar-benar telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

c. Perlindungan tehadap asset.

   Auditor internal harus menentukan berbagai alat dan cara yang digunakan unruk melindungi aset perusahaan terhadap berbagai jenis kerugian seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, kegiatan yang ilegal dan, bila dipandang perlu memverifikasi keberadaan dari suatu asset. Pada saat

memverifikasi keberadaan suatu asset, pemeriksa harus menggunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat.

d. penggunaan sumber daya secara ekonomis.

Pemeriksaan yang berhubungan dengan efisiensi penggunaan sumber daya dengan mengidentifikasi keadaan seperti: (1) fasilitas yang tidak dipergunakaan sepenuhnya, (2) pekerjaan yang tidak produktif, (3) berbagai prosedur yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan biaya, dan (4) jumlah staf.

e. Pencapaian tujuan

Auditor internal dalam menilai pekerjaan, operasi, apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah pekerjaan, operasi atau program tersebut telah silaksanakan sesuai dengan rencana

5.4 Aplikasi Management Audit untuk Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomis.

Tujuan utama management audit adalah untuk menilai *performance management* dan fungsi – fungsi dalam perusahaan terutama efektivitas, efisiensi, dan kehematan (*economis)* dari kegiatan usaha perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan pengertian efektif, efesien, dan ekonomis. Menurut Hans kartikahadi (1990) pengertian efektivitas, ekonomis (kehematan), dan efisiensin dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Efektivitas adalah produk akhir suatu kegitan operasi telah mencapai tujuannya baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, maupun batas waktu yang ditargetkan.
2. Kehematan (ekonomis) merupakan cara penggunaan sesuatu barang secara baik dan memberi *value* lebih dari sumber daya yang dikorbankan.
3. Efisiensi berarti bertindak dengan cara yang dapat meminimalisasi kerugian atau pemborosan sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu *(Agoes, 2013)*

5.5. Evidence dan Objektif (Bukti Dan Tujuan Audit)

Auditor membuat perencanaan audit dengan menentukan tujuan akhir. Sejak awal telah disebutlan bahwa tujuan menyeluruh audit laporan keuangan adalah menyatakan dan memberi rekomendasi audit kepada pimpinan atas perbaikan-perbaikan menyatakan pendapat. Secara umum auditor akan melakukan pemahaman tentang:

a. Pemahaman auditor atas bisnis dan industry.
b. Perbandingan antara harapan auditor atas dengan buku dan catatan klien
c. Keputusan tentang asersi yang material
d. Keputusan tentang risiko bawaan dan risiko pengendalian.

Menurut (Boynton C. William, Johnson N. Raymond, Kell G. Walter. 2003).

"Internal auditors must be able to maintain objectivity and identify threats to their organizational status/objectivity and they are required to evaluate and minimize those threats, and determine whether they can be objective given the steps they have taken to minimize the threats identified. This is largely a process of self-assessment by internal auditors. (IIA 2000, 2003, p.224). So, internal auditors are prohibited from auditing areas where there is any personal or professional involvement with or allegiance to the area being audited, or where relatives are employed in important or audit-sensitive positions. They are also prohibited from auditing areas where internal auditors were recently assigned or will be assigned in the future (SAS No. 65). It would also be a conflict of interest to provide assurances services for an activity for which the internal auditor had responsibility within the previous year (IIA, 2003, sec. 1130.A1)"

" Auditor internal harus dapat menjaga objektivitas dan mengidentifikasi ancaman terhadap status organisasinya / objektivitas dan mereka diminta untuk mengevaluasi dan meminimalkan ancaman tersebut, dan menentukan apakah mereka dapat melakukannya. Tujuan diberikan langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk meminimalkan ancaman yang teridentifikasi. Ini sebagian besar merupakan proses penilaian diri oleh auditor internal. (IIA 2000, 2003, hal.224). Jadi, auditor

internal dilarang melakukan audit di area dimana ada keterlibatan pribadi atau profesional dengan atau kesetiaan terhadap area yang diaudit, atau dimana kerabat dipekerjakan di posisi penting atau sensitif terhadap audit. Mereka juga dilarang melakukan audit daerah dimana auditor internal baru-baru ini ditugaskan atau akan ditugaskan di masa depan (SAS No. 65). Itu juga menjadi konflik kepentingan untuk memberikan layanan penjaminan untuk aktivitas dimana auditor internal memiliki anggung jawab di tahun sebelumnya (IIA, 2003, dst. 1130.A1)" (Abbass & Aleqab, 2013)

5.6 Sifat dan Keputusan Bukti Audit sebagai Informasi

Bukti audit adalah informasi yang akan digunakan oleh auditor menentukan kesesuaian antara transaksi dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Bukti audit dapat berupa informasi yang sangat persuasif. Sifat bukti audit dapat sangat bervariasi sesuai dengan kemampuannya dalam menyakinkan auditor informasi keuangan telah sesuai dan terhindar dari salah saji dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi (Hery, 2017).

Keputusan penting yang diharapi oleh auditor dalam menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat adalah meliputi penentuan, prosedur, audit, ukuran sampai, metode pemilihan sampel, dan penentuan waktu. Prosedur audit adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit berlangsung. Contoh prosedur pembelian barang, laporan penerimaan barang, serta faktur tagihan. Setelah prosedur audit ditetapkan, auditor menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel yang diambil harus memadai dan dapat memberikan keyakinan auditor bahwa hal tersebut sudah cukup mewakili transaksi. Setelah ukuran sampel untuk suatu prosedur audit ditentukan, auditor harus memutuskan metode pemilihan sampel. Dalam contoh ini, auditor dapat memilih 45 invoice pertama, atau 45 *invoice* dengan nilai terbesar, atau 45 invoice secara acak, atau 45 *invoice* yang menurut auditor paling mungkin mengandung salah saji, atau bisa juga mengi berbagai mengunakan kombinasi dari berbagai metode tersebut.

Kemampuan auditor dalam menentukan dan mendeteksi sampel yang memungkinkan terjadi salah saji materil ditetntukan oleh keahlian dan pengalaman auditor *(Hery :2017).*

Auditor harus membuat empat keputusan penting tentang lingkup dan pelaksanaan audit. Keputusan tersebut meliputi; Sifat pengujian, Saat pengujian, Luas pengujian, Penetapan staf untuk melaksanakan audit. Keputusan audit di atas memiliki hubungan yang penting dengan penggunaan kemahiran profesional auditor *(Boynton et all, 2003).*

5.7 Audit Objektif Dalam Management Audit

Auditor setelah melakukan preliminary *survey*, auditor harus menentukan tentative audit objectivenya, kemudian melakukan *review and testing of management control system* untuk memastikan apakah tentative audit objekctive (tujuan pemeriksaan yang bersifat sementara) dapat dijadikan firm audit objective (tujuan pemeriksaan yang pasti). Jika ternyata tentative audit objective tidak dapat dijadikan firm audit objective, misalnya karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kompeten, maka auditor harus menentukan atau mencari tentative audit objective yang lain. Elemen dalam audit objektif, yaitu: *criteria*, *causes dan effects*.

a. *Criteria* merupakan standar yang harus dipatuhi pada setiap bagaian dalam peraturan oleh setiap bagaian dalam perusahaan. Standar bisa berupa kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan manajemen, kebijakan perusahaan sejenis atau kebijakan industri, dan peraturan pemerintah.
b. *Causes* merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen yang menyimpang dari standar yang berlaku untuk memenuhi kriteria.
c. *Effects* adalah akibat dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang berlaku untuk pemenuhan causes .

   Sebuah kantor Akuntan menentukan bahwa penerimaan pegawai harus melalui seleksi yang ketat untuk menjamin diperolehnya pegawai yang kapabel atau cakap (*criteria*). Dalam proses penelitian pegawai, bagian personalia banyak

menerima surat sekit atau katebelece (causes). Akibatnya banyak klien yang mengeluh karena jasa kantor akuntan tersebut tidak memuaskan karena staf kantor akuntan yang ditugaskan ke klien tidak profesional *(Agoes, Sukrisno 2013), https://www.dallasiia.org*

5.8 Prinsip Dasar Audit

Beberapa yang menjadi prinsip dasar dalam audit pada SPAP ialah:

a. Audit dititik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki
b. Prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit
c. Pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan temuan yang bersifat positif
d. Identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi
e. Penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggungjawab
f. Pelanggaran hukum
g. Penyelidikan dan pencegahan kecurangan (Halim, 2008; Yusuf, 2014; Haryono, 2014; kumaat, 2010)

Auditor internal dalam melakukan tugasnya harus tetap berupaya untuk tetap menegakkan prinsip dasar audit antara lain :

1. **Integritas** adalah prinsip audit yang paling penting. Auditor lurus ke depan, jujur dan tulus dalam pendekatannya. Dia harus adil terhadap pekerjaannya. Auditor dikenal karena kebijaksanaan dan kemampuan mereka sendiri. Kesetiaan terhadap pekerjaan dan profesinya pasti tidak diragukan lagi.
2. **Objektivitas** adalah prinsip audit. Dia tidak dapat membiarkan prasangka atau bias untuk menghindari tujuan audit. Dia dapat melindungi hak pemegang saham melalui prinsip ini.
3. **Independensi** adalah prinsip audit. Auditor mempertahankan sikap tidak memihak. Dia seharusnya dan tidak bebas dari kepentingan apapun. Tidak diragukan lagi

dia menerima bayaran dari kliennya bahkan saat itu kemerdekaan itu tidak penting.

4. **Kerahasiaan** adalah prinsip audit. Auditor dapat menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari karyanya. Dia tidak dapat mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa wewenang khusus. Hecan memberikan fakta dan angka kepada orang lain di bawah tugas hukum atau profesional.
5. **Kompetensi** adalah prinsip audit. Auditor harus kompeten dalam melakukan pekerjaan audit. Dia harus mendapatkan pelatihan dari asasnya. Pengalaman semua langkah audit harus diperoleh. Ini adalah tahap belajar dengan melakukan. Keterampilan ini akan membantunya saat dia menjadi auditor independen". (HKICPA Code of Ethics for Professional Accountants (effective June 2006), n.d.)

5.9 Ringkasan

Audit manajemen merupakan suatu teknik yang meliputi berbagai bidang yang luas tentang prosedur, metode penilaian, kelayakan dan pendekatan-pendekatan. Pemeriksaan manajemen dirancang untuk menganalisis, menilai, meninjau ulang dan menimbang hasil kerja perusahaan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan atau pedoman yang ditentukan oleh perusahaan. Audit manajemen bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi perusahaan, kepatuhan dan ketaatan atas aturan dan kebijakan yang berlaku. Penilaian atas pengendalian, Penilaian atas pelaksanaan dan Memberikan bantuan kepada manajemen. Tujuan atau sasaran dalam audit manajemen adalah kegiatan, aktivitas, program, dan bidang-bidang dalam perusahaan yang diketahui atau diidentifikasi masih memerlukan perbaikan/peningkatan, baik dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Tiga elemen pokok dalam tujuan audit adalah Kriteria (*criteria*), Penyebab (*cause*) dan Akibat (*effect*). Auditor internal bersifat membantu manajemen dalam meminimalisir kesalahan-kesalahan baik salah saji materil hingga ketidak sesuaian prosedur sebelum auditor eksternal melakukan audit atas

laporan keuangan. Auditor internal secara independen memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen (IIA, 2009), (Guinée, 2001).

*****

BAB 6

PEMERIKSAAN AWAL PRINSIP DASAR AUDIT MANAJEMEN

Perusahaan seharusnya menyadari bahwa dengan adanya Internal Audit bisa jauh lebih efektif dan menghindarkan perusahaan dari tindak kecurangan dan mempermudah pengawan internal, menghindari hal-hal paling buruk, Auditor Internal dilihat sebagai semacam kekuatan internal polisi bahwa yang terbaik adalah untuk melindungi diri terhadap dengan menyembunyikan data penting atau langsung menyesatkan dengan informasi yang tidak relevan.

Perencanaan audit bermanfaat bagi auditor sekurang-kurangnya untuk mencapai 3 hal berikut:

a. Perencanaan audit akan mempermudah auditor dalam memperoleh bukti yang cukup dan tepat.
b. Perencanaan audit akan membantu auditor dalam ketepatan waktu audit dengan biaya yang wajar.
c. Perencanaan audit membantu auditor menghindari kemungkinan terjadinya kesalah pahaman dengan klien. Perencanaan suatu audit dan perencanaan pendekatan audit meliputi berbagai tahapan penting yang mutlak diperlukan agar pengauditan dalam berjalan dengan efisien dan efektif (Halim, 2008; Yusuf, 2014; Haryono, 2014; kumaat, 2010).

6.1. Tahapan dalam Perencanaan Audit Internal

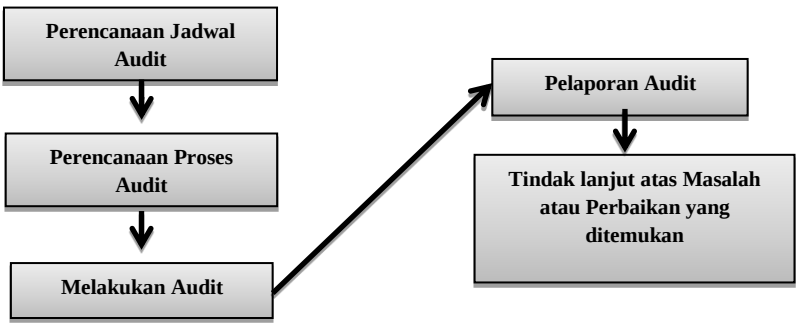

Proses Internal Audit dapat menjadi cara terbaik untuk mendapatkan pandangan secara independen, hal tersebut dapat membantu mengidentifikasi area mana saja yang diperlukan perbaikan, atau membantu perusahaan merampingkan proses untuk berjalan lebih baik, lebih cepat atau lebih efisien. Berikut adalah lima langkah utama dalam proses Audit Internal dan bagaimana langkah-langkah tersebut dapat digunakan oleh auditor internal dalam meningkatkan proses audit internal auditor juga membantu meengumpulkan informasi yang akan membantu *improvement* perusahaan atau organisasi.

1. **Perencanaan Jadwal Audit**.
   Proses awal suatu proses Audit yang baik adalah menyusun Jadwal Audit agar tersusun kapan setiap proses akan diaudit selama siklus yang akan datang. Jika Anda tidak memiliki rencana audit dan melakukan audit secara mendadak, hal itu seperti memberikan kesan bahwa manajemen “sudah tidak percaya lagi dengan karyawannya.” Dengan menerbitkan jadwal audit, kesan yang disampaikan adalah bahwa auditor datang untuk membantu pemilik proses untuk melakukan perbaikan dan dibutuhkan konfirmasi dan informasi yang penting dari pihak manajemen. Hal ini dapat memungkinkan

manajemen untuk menyelesaikan perbaikannya sebelum audit dilakukan, sehingga mereka mendapat informasi berharga tentang hasil pelaksanaan perbaikan yang telah mereka lakukan, atau meminta auditor untuk fokus membantu mengumpulkan informasi untuk melakukan perencanaan *improvement* di area lainnya.

2. **Perencanaan Proses Audit**.
   Langkah selanjutnya, dalam perencanaan audit adalah mengkonfirmasi dengan pihak manajemen kapan audit akan dilakukan. Rencana diatas lebih kepada pedoman seberapa sering proses akan diaudit dan kapan kira-kira akan dilakukan, tetapi dengan mengkonfirmasi memungkinkan auditor dan pihak manajemen untuk berkolaborasi dalam menentukan waktu terbaik dan secara bersama-sama meninjau proses. Auditor dapat meninjau hasil audit sebelumnya dan melihat apakah ada tindak lanjut yang diperlukan atau rekomendasi dari masalah yang sebelumnya ditemukan, dan ketika pihak manajemen dapat mengidentifikasi daerah yang perlu perbaikan maka auditor dapat melihat dan membantu manajemen untuk mengidentifikasi informasi yang diperlukan. Sebuah rencana audit yang baik dapat memastikan bahwa pemilik proses akan mendapatkan nilai tambah dari proses audit yang dilakukan agar *improvement* secara berkelanjutan selalu dilakukan.

3. **Melakukan Audit**.
   Audit mulai dilakukan dengan pertemuan auditor dan pihak manajemen untuk memastikan bahwa rencana audit selesai dan siap, Maka ada banyak jalan bagi auditor untuk mengumpulkan informasi selama audit: meninjau catatan, berbicara dengan karyawan, menganalisis data dari proses kunci atau bahkan mengamati proses secara langsung. Fokus dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan bukti bahwa proses ini berfungsi seperti yang direncanakan. Salah satu hal

yang paling berharga adalah auditor dapat member rekomendasi kepada pihak manajemen, tidak hanya untuk mengidentifikasi area-area yang tidak berfungsi dengan baik, tetapi juga untuk menunjukkan proses mana saja yang dapat berfungsi lebih baik jika dilakukan perubahan.

4. **Pelaporan Audit.**

   Auditor melakukan pertemuan penutupan dengan pemilik proses adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa rencana audit sesuai dengan jadwal. Pihak manajemen ingin tahu apakah ada kelemahan yang perlu ditangani, dan juga untuk mengetahui jika ada proses yang bisa di *Improve*. Ini harus diikuti dengan catatan tertulis sesegera mungkin untuk memberikan informasi dalam format yang lebih permanen untuk membuat tindak lanjut dari informasi tersebut. Rekomendasi yang disampaikan oleh auditor internal akan menjadi bahan perbaikan pihak manajemen baik dari sisi sistim informasi, sumber daya manusia, pengawasan dan sistem pelaporan keuangan.

5. **Tindak lanjut atas Masalah atau Perbaikan yang ditemukan.**

   Manajemen akan membuat standar mutu bagi perusahaan, tindak lanjut merupakan salah satu langkah penting setelah mendapatkan rekomendasi dari auditor internal. Jika masalah telah ditemukan dan tindakan lanjut perbaikan telah dilakukan, lalu memastikan bahwa temuan tersebut telah diperbaiki dan itumerupakan kunci dari perbaikan. Jika *improvement* telah selesai dilakukan, kemudian proses berikutnya adalah melihat berapa banyak proses telah meningkat dari sebelumnya dalam hal ini perusahaan membuat sistim penilaian kinerja dan peningkatan kinerja.

   Standar auditing yang berlaku umum menyatakan bahwa dalam merencanakan audit, auditor harus

mempertimbangkan sifat , luas, dan saat pekerjaan yang saat harus dilaksanakan serta harus mempersiapkan suatau program audit tertulis untuk setiap audit. Program audit tersebut menyatakan bahwa prosedur audit yang diyakinkan oleh auditor merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan audit. Bentuk program audit akan sangat beragam tergantung pada kondisi audit, praktik , serta kebijakan kantor akuntan tersebut.

Auditor berusaha menyeimbangkan prosedur audit *top-down* dan *bottom-up* ketika mengembangkan suatu program audit. Strategi audit biasanya meliputi keseimbangan antara prosedur pelaksanaaan untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis klien dengan pengendalian internnya, membandingkan Saldo keuangan dengan jumlah yang di inginkan serta menentukan keseimbangan anatar pengujian pengendalian dan pengujuan subtantif.

Top-down : mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan yang diharapkan dan pengetahuan atas entitas serta bisnis dan industrinya

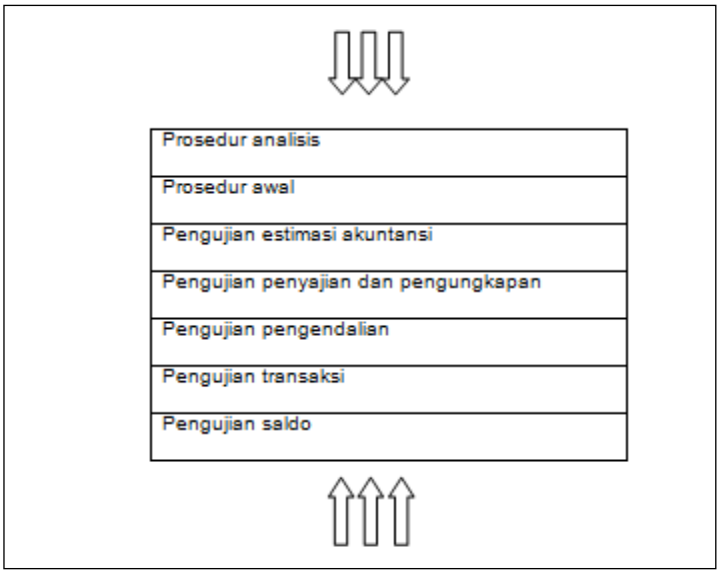

Bottom-up : mengevaluasi bukti transaksi pendukung akumulasinya dalam laporan keuangan:

1. Prosedur analisi (*analitycal procedures*) meneliti hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dan non keuangan untuk menggembangkan harapan atau saldo laporan keuangan.
2. Prosedur awal (*initial procedures*) meliputi prosedur untuk memperoleh pemahaman atas (1) faktor persaingan bisnis dan industri klien, dan (2) struktur pengendalian internnya . auditor juga melaksanakan prosedur awal untuk memastikan bahwa catatan-catatan dalam buku pembantu sesuai dengan akun pengendalian dalam buku besar.
3. Pengujiam estimasi akuntansi *(tests of accounting estimates*) biasanya meliputi pengujian ujian subtantif atas saldo. Namun , mengevaluasi kelayakan estimasi akuntansi yang dicantumkan dalam laporan keuangan biasanya memerlukan pemahaman atas bisnis dan industri. Oleh karena itu , pengujian estimasi akuntansi memiliki komponen prosedur audit *top-down* yang signifikan.
4. Pengujian pengendalian (*test of control*) adalah pengujian pengendalian intern yang ditetapkan oleh strategi audit dari auditor.
5. Pengujian transaksi *(test of transactions*) adalah pengujian subtantif yang terutama meliputi *tracting* atau *vouching* transaksi berdasarkan bukti dokumenter yang mendasari.
6. Pengujian saldo *(test of blance*) berfokus pada perolehan bukti secara langsung tentang saldo akun serta item-item yang membentuk saldo tersebut.
7. Pengujian penyajian dan pengungkapan (*test of presentation disclosure*) mengevaluasi penyajian secara wajar semua pengungkapan yang di syaratkan oleh PSAK (Halim, 2008; Yusuf, 2014; Haryono, 2014; kumaat, 2010).

Menurut Bayangkara (2015), prinsip dasar yang harus diperhatikan auditor agar audit manajemen dapat mencapai tujuan audit, yaitu: Audit manajemen fokus pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Prinsip ini berkaitan dengan tujuan audit manajemen, yaitu menciptakanperbaikan terhadap program atau aktivitas perusahaan, maka audit dititik beratkan kepada hal-hal yang masih memerlukan perbaikan agar mencapai kondisi yang optimal dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan. Prinsip mengarahkan audit pada berbagai kelemahan-kelemahan (*weakness*) manajemen baik dalam hal operasional yang berjalan tidak efisien danpencapaian tujuan yang tidak efektif maupun kegagalan perusahaan dalam menerapkan berbagai ketentuan dan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian yang akurat membutuhkan audit yang saksama, sistematis, independen, baik terhadap kinerja manajemen maupun berbagai program atau metode operasi yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan akan diketahui apakah program yang ditetapkan, metode pelaksanaan operasi, atau kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen secara efektif dapat mendukung pencapaian tujuan (*goal*) perusahaan.

Pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Prinsip ini menyajikan temuan-temuan yang merupakan kelemahan dalam pengelolaan perusahaan, auditor juga harus menyajikan temuan-temuan positif yang biasanya berupa keberhasilan yang dicapai manajemen dalam mengelola berbagai program atau aktivitas dalam operasinya sehingga perusahaan akan mempertahankan apa yang telah dicapai. Hal ini dilakukan untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap objek yang diaudit. Identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekuranganyang terjadi. Auditor harus dapat mengidentifikasi dan menemukan individu-individu yang

bertanggung jawab terhadap berbagai kelemahan-kelemahan yang terjadi padaperusahaan.

Kelemahan-kelemahan yang menjadi permasalahan dan penyebab terjadinya kekurangan tersebut akan dapat digali lebih dalam, sehingga tindakan koreksi yang akan dilakukan menjadi lebih tepat dan cepat. Penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Auditor secara langsung tidak memiliki wewenang dalam memberikan sanksi atau tindakan terhadap petugas yang bertanggung jawab terhadap kelemahanyang terjadi, tetapi berdasarkan hasil audit yang dilakukan, auditor dapat memberikan berbagai pertimbangan dalam menentukan sanksi yang akandiberikan oleh pihak yang lebih tinggi dari petugas yang bersangkutan.

Proses audit berjalan tidak tertutup kemungkinan auditor menemukan berbagai pelanggaran terhadap hukum yang terjadi. Pelanggaran dapat berupa penipuan, penggelapan aset-aset perusahaan maupun berbagai kegiatan yang secara sengaja merugikan perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Walaupun bukan tugas utama auditor untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum (korupsi), auditor harus segera menyampaikan temuan tersebut kepada atasannya tentang adanya pelanggaran tersebut. Penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Jika terdapat indikasi terjadinya kecurangan (*fraud*) pada objek audit, auditorharus memberikan perhatian khusus dan melakukan penyelidikan yang lebihmendalam terhadap hal tersebut, sehingga diharapkan kecurangan tersebuttidak terjadi.

6.2. Teknik-Teknik Pemeriksaan

Auditor memeriksa dokumen, transaksi, kondisi, dan proses untuk mendapatkan fakta-fakta dan untuk mencapai kesimpulan. Istilah pemeriksaan mencakup baik pengukuran maupun evaluasi. Auditor memiliki banyak teknik untuk

membantu mereka mencapai tujuannya. Yang belum jelas hanyalah penamaan teknik-teknik tersebut diantara para auditor. Teknik-teknik tersebut dikelompokkan pada bab ini dalam enam judul yang dapat menuntun auditor dari awal hingga akhir pekerjaan lapangan.

Definisi dari setiap judul hanya relevan untuk pemeriksaan audit dan bukan untuk penggunaan umum.Dari enam pekerjaan lapangan,lima teknik pertama bisa dianggap sebagai bagian dari proses pengukuran.Teknik terakhir,mengevaluasi,memberi makna pada informasi yang dikumupulkan auditor (Halim, 2008; Yusuf, 2014; Haryono, 2014; kumaat, 2010) . Berikut ini teknik-teknik tersebut:

1. Mengamati
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menganalisis
4. Menginvestigasi
5. Mengevaluasi

1. Mengamati.

Bagi auditor, mengamati berarti melihat,memerhatikan, tidak melewatkan hal-hal yang dianggap penting. Hal ini mengimplikasikan diteapkannya pandangan yang berhati-hati dan berpengetahuan pada orang,fasilitas, proses, dan barang-barang. Hal ini juga berarti pemeriksaan visual yang emiliki tujuan,memiliki nuansa perbandingan dengan standar,dan suatu pandangan yang evaluatif.

Mengamati berbeda dari menganalisis karena analisis berarti menetapkan, menyusun dan menginterpretasikan data. Mengamati, disisi lain, berarti melihat dan membuat catatan serta pertimbangan. Pengamatan ini dapat dilakukan atas catatan dokumen, diagram, bagan dan lainnya. Karena semua prosedur audit, termasuk mengamati, sebagian besar berisi pengukuran, maka observasi yang layak merupakan salah satu teknik audit yang paling sulit. Auditor mengukur apa yang ia lihat lalu dibandingkan dengan apa yang dipirannya. Bila si auditor makin berpengalaman, makin banyak standar dan pola yang mereka

simpan, makin waspada mereka terhadap penyimpangan yang terjadi dan makin baik observasi yang dilakukan.

Mengamati penting untuk dilakukan dan biasanya diterapkan sebelum teknik-teknik lainnya. Biasanya observasi harus dikonfirmasi kebenarannya dengan melakukan analisis atau investigasi. Hal ini berlangsung pada saat survei pendahuluan ketika auditor mencoba untuk lebih memahami lingkungan pabrik dan alur kerja serta sistem dan proses. Observasi dapat bermanfaat untuk menemukan praktik-praktik penyimpangan dokumen atau alur kerja yang mengarah pada upaya tidak perlu atau berbelit-belit. Auditor bisa mengamati kondisi bahan baku yang ditolak sebagai langkah pertama dalam menelusuri penyebabnya. Mereka dapat melakukan perjalanan keliling pabrik dan mengamati peralatan, fasilitas atau pekerja yang menganggur. Mereka bisa mengamati peringatan keamanan disekeliling pabrik, di dalam bank atau di toko. Mereka bisa dapat mengamati kondisi-kondisi berbahaya dan pelanggaran atas keselamatan kerja. Mereka bisa mengobservasi gudang persediaan yang berantakan dan bukti adanya pesanan-pesanan yang belum terpenuhi. Mereka bisa mengamati persediaan yang disimpan dengan baik dan tumpukan bahan baku yang berbahaya. Mereka bisa mengamati gudang yang ditinggalkan tanpa dikunci. Mereka bisa mengamati kurangnya perawatan yang memadai. Mereka bisa mengamati truk-truk yang meninggalkan pabrik tanpa dihentikan oleh penjaga. Masih banyak yang lainnya.

Observasi yang didasari pada pengetahuan bisa memberikan pandangan yang tajam, namun auditor harus berhati-hati saat menggunakan observasi untuk kondisi yang mengandung defisiensi. Jika pemeriksaan visula dilaporkan tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu, maka harus dengan jelas dinyatakan sebagai observasi dan kesan-kesan.

2. Mengajukan Pertanyaan

Mengajukan peranyaan mungkin merupakan teknik yang paling pervasif bagi auditor yang menelaah operasi. Pertanyaan diajukan selama sudit dan bisa secara lisan ataupun tertulis.

Pertanyaan lisan adalah yang paling sering digunakan namun mungkin yang paling sulit untuk dikemukakan. Perolehan informasi bisa menjadi suatu seni tersendiri. Mendapatkan fakta tanpa membuat klien marah kadang-kadang bukanlah tugas yang mudah. Jika klien merasa dicecar atau merasa diperiksa silang, mereka cenderung bertahan dan enggan berperan menyikap kebenaran. Informasi yang mereka berikan bisa saja salah atau kurang lengkap , jawaban mungkin malah tidak keluar sama sekali. Jadi, jika auditor memahami pandangan kebanyakan klien terhadap mereka – yaitu dipandang sebagai ancaman potensial bagi posisi mereka – dan bisa mengubah dikap mereka untuk mengurangi ketakutan, peluang untuk mendapatkan informasi yang berguna akan meningkat.

Pada saat yang sama, perhatian auditor akan perasaan klien seharusnya tidak menghalangi mereka untuk terus mendapatkan fakta. Untuk itu auditor seharusnya tidak mengajukan pertanyaan yanghanya akan dijawab terbatas. Pertanyaan seperti, “Apakah Anda selalu mengunci pintu gudang?” bisa menghasilkan jawaban yang lebih memuaskan dan lebih lengkap.jika keputusan audittergantung atas jawaban-jawaban atas pertanyaan lisan, maka ada aturan yang bagus untuk diiktuti. Konfirmasikan informasi dengan menanyakanhal yang sama paling tidak kepada dua orang. Reporter yag baik tidak pernah percaya pada apa yang diucapkan orang pertama kepada mereka. Berikut contoh hasil beberapa pertanyaan yang persisten.

“Pada era teknologi ini, apakah perhitungan mendadak atas kas masih digunakan?” Menurut kebanyakan auditor internal, masih digunakan, meskipun tidak selalu bermanfaat buat klien.

Auditor internal, dengan menelaah kertas kerja tahun sebelumnya, menemukan bahwa pemeriksaan mendadak atas kas telah menyingkap kecurangan di masa lalu, tetapi ada waktu-waktu tertentu hal tersebut tidak dilakukan. Auditor memutuskan untuk menyikapi waktu guna menghitung register kas klien dan mesin penukar koin, yang secra bersama-sama melibatkan dan

aks kecil sebesar $700. Pemeriksaan atas kas menemukan bahwa terdapat kekurangan kas sebesar $60.

Pada pagi berikutnya, karyawan yang bertanggung jawab untuk dan tersebut mengembalikan uang sebesar $60ersebut yang “secara tidak sengaja terbawa ke rumah”. Auditor kemudian menlakukan audit yang lebih rinci dan menemukan lebih banyak uang yang hilang. Setelah auditor melaporkan temuan mereka ke manajemen, si karyawan mengembalikan uang kas sebesar $1.200 dan cek sebesar $2.200 yang dikatakannya diterima dari penjualan tahun sebelumnya. Karyawan tersebut mengatakan telah “meletakkanuang tersebut di bawah tempat tidur untuk mengamankannya dan lupa kalau ada uang disana”.

Auditor mengetahui bahwa karyawan tersebut bisa melakukan kecurangan ini karena kurangnya pemisahan tugas. Karyawan tersebut bertanggung jawab menerima pendapatan dan penjualan sekaligus melakukan tugas pembukuan. Dalam audit tahun sebelumnya, manajer operasi telah diinformasikan mengenai resiko menugaskan satu karyawan untuk melakukan dua pekerjaan sekaligus dan telah erjanji untuk melakukan pengecekan yang lebih sering untuk memastikan pendekatan awal atas kecurangan. Hal ini tidak dilakukan secara konsisten, dan si karyawan bisa memanfaatkan celah akibat kelemahan kontrol tersebut.

Selanjutnya, auditor menemukan bahwa sebanyak $7500 telah diambil oleh karyawan. Karyawan tersebut dikenakan tuduhan pencurian besar-besaran dan dipecat. Manajer berani untuk melakukan pemeriksaan mendadak atas kas di masa datang untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang bisa dinyatakan dengan mengingat dua tujuan : untuk membantu auditor dan membantu klien. James Binns mengusulkan suatu kuesioner “prosedur operasi standar yang dirancang untuk membanu keduanya”. Teorinya didasarkan pada pernyataan bahwa manual prosedur yang biasa terlalu berlebihan, tidak selalu mudah dibaca dan dipahami dan mustahil diingat.

Sistem kuesioner Binns dirancang untuk mendapatkan informasi bagi auditor, dan pada saat yang sama,

menyederhanakan penggunaan manual prosedur oleh klien. Seringkali, prosedur-prosedur tidak diikuti karena karyawan operasional terlalu sibuk untuk membaca manual atau untuk memahaminya karena tenggelam pada dokumen-dokumen lain di hari-hari sibuknya.

Makanan utama auditor internal adalah membaca, menilai dan memahami prosedur-prosedur tertulis untuk menentukan apakah prosedur-prosedur tersebut sudah relevan, valid, selalu diperbaharui, dan ditaati. Jadi, sebagai bagian dari prosedur audit, auditor meminta klien menjawab kuesioner yang merupakan semacam kuis dan pendidikan sekaligus. Pertanyaan-pertanyaan terebut diambil dari dan dirunjuk ke , prosedur-prosedur khusus yang signifikan dalam manual proses operasi standar. Untuk menyederhanakan proses, disediakan pedoman jawaban. Jika klin sangat mengenal prosedur-prosedurtertentu, maka kuesioner tersebut menjadi sarana pendidikan. Jika klien mengunakan kuesioner secara periodik untuk engecekapakah praktik-praktik kepegawaian sesuai dengan prosedur organisasi, kuesioner menjadi sarana yang berguna untuk audit mandiri.

a. Bertemu Klien

Pertemuan auditor internal dengan manajer klien memberi peluang bagi auditor untuk menjelaaskan tujuan dan pendekatan audit yang akan dilakukan. Dalam beberapa situasi, auditor justru ingin membahas keseluruhan peran audit internal dengan organisasi. Namun, fokus utama pertemuan pastilah tentang audit yang dilakukan.

Pada pembahasan dengan manajer dan supervisor, auditor menjelaskan tujuan, sasaran, dan standar operasi serta risiko bawaannya. Auditor internal juga ingin mengenali gaya manajemen yang diterapkan. Pertemuan tersebut jelas mencerminkan hal penting dalam audit, dan dengan mencurahkan perhatian ke berbagai hal dalam pertemuan dapat membantu mendorong terciptanya hasil-hasil yang positif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain;

a) Mengatur Jadwal Pertemuan

Waktu dan tempat pertemuan harus diatur terlebih dahulu. Jika memungkinkan, hindarikunjungan mendadak, meskipun audit yang tidak diberitahukan terlebih dahulu.mungkin perlu dilakukan dalam audit kas, audit keamanan, atau hal-hal lain yang cukup rawan. Bila tidak ada hal-hal yang khusus seperti ini, pemeberitahuan terlebih dahulu lebih sopan dan akan dihargai serta tidak merugikan audit. Klien yang siap akan meberikan lebih banyak informasi, dan kesalahan informasi yang disengaja oleh klien akan cenderung dideteksi dalam pelaksanaan audit sesungguhnya.

Kadang-kadang ada keenggana dari pihak klien sehingga pemeberitahuan awal justru membuat klien bergegas memperbaiki kondisi-kondisi yang memiliki kelemahan sebelum auditor tiba. Anngap saja hal ini baik-baik saja. Jika inilah dampak yang dimiliki auditor internal, dampak tersebut justru menguntungkan. Baik auditor internal maupun karyawan operasional bekerja untuk perusahaan yang sama dan menuju tujuan organisasi yang juga sama. Kondisi apapun itu yang diperbaiki adalah hal yang baik. Transaksi-transaksi yang mengandung kelemahan mungkin tidak bisa terhindar dari pengujian substantif, dan perbaikan untuk sistem kontrol yang tidak memadai atau penyimpangan-penyimpangan kecil memang diharapkan dilakukan, kapan pun itu terjadi.

Pertemuan awal akan cenderung menuntun arah audit, salah satunya kemungkinan kerja sama. Auditor internal haruslah terbuka dan terus terang mengenai tujuan audit mereka. Mereka harus mengajukan pertanyaan sebagai seorang yang ingin menggali informasi, bukan sebagai penyidik. Jangan ada perseteruan, perselisishan yang bisa merusak pertemuan awal ini. Manajer klien hanya ingin temuan-temuan ditempatkan dalam perspektif yang layak, dan mereka ingin memastikan bahwa semua kelemahan dibahas bersama. Auditor tidak bisa lain harus berlaku serupa.

Tentu saja auditor inter jangan membiarkan dirinya terlena dengan keyakinan yang lemah. Tanggapan setengah hati dari manajemen seperti “kami sepenuhnya memahami kondisi ini dan sedang berusaha memperbaikinya” harus ditantang dengan pertanyaan : Bagus, kapan upaya itu dimulai? Bisakah Anda menunjukkan kepada kami rencana atau instruksi untuk memeperbaiki kesulitan tersebut ? Berapa jangka waktu untuk perbaikan yang direncanakan? Sampai sejauh ini penyelesaiannya sudah sampai pada tahap apa?”.

Jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terebut memiliki bukti yang sah bahwa memang ada tindakan perbaikan, maka manajemen patut diberi pujian. Jika masalah tersebut cukup signifikan, sebaiknya dimuat dalam laporan audit internal-bukan sebagai temuan audit, tetapi sebagai catatan masalah yang telah diselesaikan. Jika keyakinan yang diberikan hanya sebagia upaya untuk menghindari disangkutpautkan dengan temuan kelemahan, maka hal ini harus dilaporkan sebagai temuan audit.

b) Wawancara

Mungkin tidak ada keahlian yang lebih penting bagi auditor internal dari wawancara. Teknik-teknik wawancara yang baik membuat orang merasa nyaman, membuat mereka ingin memberikan informasi, bekerja sama dalam audit, dan mudah-mudahan membuat penugasan audit berhasil. Sebaliknya, teknik-teknik tanya jawab yang tidak baik menciptaan sikap permusuhan, menyebabkan orang menahan atau memberikan informasi yang salah dan kemungkinan menyebabkan kegagalan audit.

Karena aktivitas-aktivitas yang diperiksa auditor internal semakin rumit dan menantang, auditor internal memerlukan bantuan tambahan untuk memahami operasi yang diperiksa. Mereka membutuhkan Auditor internal harus memiliki keahlian dalam berhubungan dengan orang dan berkomunikasi secara efektif. Juga

penting bagi auditor internal untuk memiliki keahlian dalam komunikasi lisan dan tulisan sehingga mereka dapat menyampaikan tujuan audit, evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi secara jelas dan efektif.

Penguasaan teknik-teknik wawancara yang efektif pada hakikatnya adalah tanggung jawab profesional, oleh karena itu auditor internal harus memahami bagian-bagian penting dari wawancara dan berusaha menguasainya. Wawancara bukanlah sebuah tindakan tunggal, melainkan bagian dari sebuah proses. Wawancara yang sukses didasarkan pada penerapan saksama enam langkah penting persiapan, penjadwalanseseorang untuk menerjemahkan jargon-jargon yang digunakan klien, misalnya mereka membutuhkan kerja sama, bukan permusuhan. Teknik-teknik wawancara yang baik akan membantu memenuhi kebutuhan ini. pembukuan, pelaksanaan, penutupan dan pencatatan (Halim, 2008; Haryono, 2014; Kumaat, 2010; Yusuf, 2014).

Berikut ini dua contoh kuesioner SOP, yang pertama berkaitan dengan masalah–masalah keuangan dan yang kedua dengan masalah–masalah operasional. (nomor–nomor SOP adalah fiktif).

1. Indikasi apa yang terdapat dalam semua faktur yang menvakup beban-beban operasi?(rujukan SOP 015)
    a. Persetujuan oleh manajer fungsional?
    b. Tanggal dibayar?
    c. Pembebanan ke akun beban ?
    d. Jumlah cek beban yang dikeluarkan untuk pembayaran ?
    e. Jumlah diskon yang diambil ?
    f. Jumlah pembayaran yang benar ?
2. Pengumuman kepegawaian apa yang ditempel pada papan bulletin ? (rujukan SOP 156.1)
    a. Pengumuman bagi karyawan : Upah minimum, Pembayaran lembur, Pembayaran

yang setara untuk pekerjaan yang sebanding ?

b. Poster peliang kerja yang setara ?
c. Poster dIskriminasi usia ?
d. Aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh karyawan ?
e. Poster kesehatan dan keselamatan kerja ?
f. Pernyataan kebijakan terbaru tentang peluang kerja yang setara ?

Jelaslah, pembuatan draft kuesioner seperti ini cukup menambah pekjerjaan bagi auditor internal oleh karena itu kuesioner tersebut harusn dibatasi pada masalah–masalah yang signifikan juga, mungkuin terdapat pertanyaan tentang hal–hal yang sensitive seperti audit kas, surat berharga, dll. Kuesioner harus jelas bagi k;lien. Seringkali, kuesioner juga perlu diperbaharui secara periodik. Tetapi kuesioner yang digunakan dengan layak dapat memudahkan pekerjaan auditor dan meningkatkan kemampuan manajer operasi untuk menngawasi operasimenjadi tanggung jawabnya.

3. Menganalisis

Berarti memeriksa secara rinci. Artinya kita memecah entitas yang kompleks kedalam bagian–bagian kecil untuk menentukan karakteristiknya yang sebenarnya. Istilah ini juga berate melihat lebih dalam beberapa fungsi, aktivitas, atau sekelompok transaksi dan menentukan hubungannya masing-masing.

Analisis dimaksudkan untuk mengetahui kualitas, penyebab, Dampak, motif, dan kemungkinan– kemungkinan, seringkali sebagai fasilitator bagi penelitian selanjutnya atau sebagai dasar pertimbangan. Dengan menganalisis suatu akun, auditor yang memeriksa catatan keuangan memisahkan, menyususn, dan memecah masing – masing bagian yang membentuk akun tersebut. Dengan cara ini, auditor dapat mengetahui bagian mana yang signifikan, bagian mana yang

sering terjadi, bagian mana yang kurang, yang membutuhkan perhatian lebih lanjut, dan bagian yang seharusnya tidak muncul.

Berikut ini contoh pembuatan standar atau tolak ukur, pengumpulan data, perbandingan yang terjadi dengan yang seharusnya, dan pemeriksaan atas varians yang ada.

a. Perusahaan memeiliki bagian yang bertanggung jawab menjual peralatan dan perabot kantor yang tidak dipakai lagi. Auditor yang biasa terdiri dari evaluasi proses penawaran dank as secara pemeriksaan fisik atas persediaan. Audit seperti ini biasanya menghasilkan temuan- temuan kecil. Saat ini, auditor memutuskan untuk menelaah profitabilitas bagian tersebut untuk melihat apakah perubahan cara audit akan menghasilkan hal yang lebih baik
b. Mereka menemukan bahwa bagian tersebut menyatakan biaya operasinya sebesar $200.000 dan pendapatan. Lebih dari nilai buku, sebesar $250.000 sebagai operasi yang kelihatannya menguntungkan. Lebiha – lebih lagi bila pendapatan melebihi tambahan biaya, yang merupakan sebuah metode penambahan nilai. Namun, saat auditor menetapkan bahwa hanya biaya – biaya langsung yang bisa dimasukkan dalam $200.000 maka biaya – biaya tambahan seperti biaya pension, tunjangan kesehatan, dan manfaat – manfaat karya lainnya dikeluarkan dari angka biaya $200.000. Biaya actual menjadi $310.000. sangat berbeda !
c. Temuan auditor tersebut mendorong duan bagian serupa dalam lokasi yang berdekatan melakukan konsolidasi dan pemberhentian seorang karyawan penuh waktu – penghematan yang diestimasikan sebesar $90.000. Perubahan cara audit dilakukan benar – benar menghasilkan hal yang bermanfaat.
d. Dalam operasi normal sebuah pihak kimia, adanya beberapa sisa bahan baku atau barang jadi merupakan hal yang sudah diperkirakan. Tetapi apa yang ditemukan auditor dalam kasus ini kelihatannya sudah tidsk wajar.
e. Berdasarkan catatan yang ada, auditor mengetahui bahwa 2.500 ton bahan baku senilai $1.2 juta telah menumpuk dalam dua tahun. Kebocoran sebesar ini akan menutup

lahan pabrik hingga sebesar lutut, tetapi tidak ada bukti bahwa hal ini telah terjadi.

f. Investigasi selanjutnya yang dilakukan oleh auditor menemukan bahwa para pekerja telah memindahkan bahan baku dari gudang persediaan tan[pa ,mencatatnya. Pada rekonsiliasi akhir bulan, semua persediaan yang hilang dicatat kea kun baerang sisa.
g. Jadi terlihat bahwa bahan baku dalam jumlah telah dibuang. Kontrol ditingkatkan untuk membantu meyakinkan bahwa dokumentasi tertulis mendukung semua permintaan atas bahan baku.

4. Memverifikasi

Memverifikasi berarti mengkonfirmasi kebenaran., akurasi, keaslian, atau validitasi sesuatu. Hal merupakan sarana tertua yang dimiliki oleh auditor. Cara ini paling sering digunakan untuk mendapatkan kebenaran fakta atau rinciandalam suatau akun atau laporan. Hal ini mengimplikasikan upaya yang disengaja untuk menenttukan akurasi atau validitasi beberapa laporan atau tulisan dengan mengujinya, seperti membandingkannya dengan fakta yang diketahui, dengan data asli, atau dengan suatau standar.

Verifikasi mencakup konfirmasi dan perbandingan ; pernyataan dari sesorang dikonfirmasi melalui perusahaan dengan orang – orang lain, atau saatu dokumen dibandingkan dengan satu atau lebih dokumen lain yang valid. Verifikasi juga mencakup konfirmasi, yang artinya menghapuskan semua keraguan melalui validasi independen oleh pihak–pihak yang objektif.

Auditor memverifikasi suatu jurnal akuntansi dengan membandingkannya dengan rincian pendukung. Mereka memverifikasi jumlah terutang dengan mengkonfirmasinya ke kreditor. Mereka memverifikasi persetujuan dengan menanyakan petunjuk yang mengatur tentang tingkat persetujuan dan membandingkan tanda tangan persetujuan dengan yang tertera pada kartu tanda tangan. Mereka juga memverifikasi bahwa persetujuan dibuat berdasarkan

kesesuaian dengan kondisi yang diisyaratkan. Mereka memeverifikasi kelayalakan pemebelian dengan meyakinkan diri mereka sendiri bahwa

a. Ketentuan untuk barang barang yuang dibeli dibuat oleh seseorang yang tidak bertugas sebagai pembeli.
b. Jumlah barang yang diproses tidak melebihi barang-barang yang dibutuhkan dalam penagihan bahan baku atau permintaan bahan baku atau permintaan bahan baku (batas rata–rata yang diperbolehkan).
c. Barang- barang dibeli tepat waktu, tetapi tidak terlalu mendahului jadwal kebutuhan dengan mengacu pada jadwal produksi atau jadwal konstruksi dan pada ketentuan ambang batas persediaan.
d. Barang – barang yang dipesan benar benar diterima dan sesuai dengan spesifikasi (dengan mengacu pada memeo penerimaan, dengan mengunjungi gudang, atau dengan memeriksa produk akhir).

5. Menginvestigasi

Menginvestigasi merupakan istilah yang secara umum diterapkan pada pelaksanaan Tanya jawab untuk menemukan fakta- fakta yang tersembunyi dan mencari kebenaran. Hal ini mengimplikasikan penelusuran informasi yang sistematis yang di harapkan auditor bisa ditemukan atau perlu diketahui. Cara ini mencakup, tapi tidak terbatas pada, penyelidikan – investigasi yang meyelidiki lenih dalam dan ekstensif dengan maksud mendeteksi kesalahan.

Auditor bisa menginvestigasi, tapi menmginvestigasi berbeda dengan mengaudit. Audit mengambang objektivitas. Investigasi berarti berupaya mencari bahan bukti atas terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, investigasi memiliki lebih banyak petunjuk dibandingkan analisis dan verifikasi. Yang berarti penelahaan data yang memiliki karakteristik yang relative tidak diketahui – sampai diperiksa. Buku ini mengartikan investigasi sebagai cara menangani suatu kondisi yang mencurigakan.

Berikut ini contoh-contoh pelaksanaan investigasi:

a. Dalam penelaahan untuk mengetahui kepatuhan organisasi terhadap hukum federal, hukum Negara, dan hukum lingkungan hidup lokal, auditor internal menemukan beberapa kejanggalan. Ada delapan masalah pelanggaran hukum yang ditemukan masalah-masalah yang dapat menyebabkan perusahaan dikenakan denda potensial sebesar $725.000.
b. Auditor menemukan laporan inpeksi PCB tahunan dan kuartalan yang tidak akurat dan tidak tepat waktu. Sebagai tambahan, mereka menemukan penanganan, pelabelan, dan penyimpanan yang tidak semestinya atas limbah berbahaya, serta adanya rencana kontinjensi yang ketinggalan zaman. Auditor juga menemukan bahwa perusahaan tidak memiliki program untuk mengobrol drum-drum berukuran 55 galon yang digunakan untuk menyimpan dan membuah limbah berbahaya. (Termasuk dalam bahan bukti adalah 200 drum berisi limbah berbahaya yang tidak diberi label dan tidak ditempatkan dalam area perlindungan seperti yang diharuskan.)
c. Berangkat dari hasil audit tersebut, manajemen menyelenggarakan program pelatihan komprehensif dan mengeluarkan intruksi tertulis untuk karyawan yang bertanggungjawab dalam penanganan limbah berbahaya.
d. Auditor internal menemukan bahwa terdapat terdapat perbaikan sejumlah $3.250 untuk truk yang dijual sebagai barang bekas tiga bulan kemudian. Pernyataan yang diajukan atas penggunaan dana perusahaan yang sia-sia seperti ini menghasilkan temuan tentang kebijakan perusahaan yang cukup aneh.
e. Informasi tentang perbaikan truk tersebut ditanyakan ke manajer pabrik. Si manajer memberi tahu auditor bahwa dana tersebut sebenarnya digunakan untuk membeli truk bekas lain sebagai pengganti truk tersebut, dengan sepengetahuan manajemen perusahaan. Si manajer diminta memberikan daftar pembelian serupa yang pernah dilakukan. Daftra tersebut mencakup beban perbaikan dan pembelian suku cadang senilai $162.000 sejak tahun 1985.

Nyatanya, “beban perbaikan dan pembelian suku cadang” tersebut adalah pembelian 39 kendaraan bekas untuk menggantikan kendaraan yang telah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi.

f. Setelah menggali masalah ini lebih dalam, auditor mengetahui bahwa praktik pembebanan pengeluaran modal atas pembelian kendaraan kea kun perbaikan dan pembelian suku cadang telah berlangsung 30 tahun dengan persetujuan manajemen. Praktik tersebut dimasukkan sebagai langkah antara untuk menyediakan kendaraan di pabrik sampai proses persetujuan pengeluaran modal dilakukan. Akan tetapi, auditor tidak dapat menemukan bukti bahwa pembelian kendaraan mendapatkan persetujuan melalui proses tersebut. Depresiasi tahunan juga dipertanyakan.
g. Manajemen sependapat dengan auditor bahwa dibutuhkan revolusi budaya untuk menekankan pentingnya “pembukan dan akun-akun yang tepat” dalam kebijakan bisnis perusahaan. Suatu program mulai dilaksanakan yang tidak hanya akan menekankan pada akuntansi pembelian yang tepat, tetapi juga terlebih dulu memberikan pemahaman kepada karyawan mengenai alasan adanya kebijakan pembelian tersebut (Halim, 2008; Haryono, 2014; kumaat, 2010; Yusuf, 2014).

Mengevaluasi. Mengevaluasi, sebagaimana penilaian sebagai istilah yang berhubungan, melibatkan estimasi nilai. Dalam audit, hal ini berarti menuju suatu pertimbangan. Artinya menimbang yang telah dianalisis dan menentukan kecukupan, efisiensi, dan efektivitasnya. Hal ini merupakan langkah yang berada di antara analisis dan verifikasi di satu sisi dan opini audit di sisi yang lain. Hal ini mencerminkan kesimpulan yang dihasilkan auditor berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan.

Evaluasi mengimplementasikan pertimbangan professional, dan merupakan rangkaian yang berjalan melewati keseluruhan proses audit. Pada tahap awal pemeriksaan audit, auditor harus mengevaluasi suatu risiko khusus risiko menghilangkan suatu aktivitas dari penelaahan mereka,

dibandingkan dengan biaya pemeriksaannya (risiko audit). Dalam program audit mereka, auditor harus mengevaluasi perlunya pengujian rinci sebagai pengganti survei atau penelusuran (*walk-through*). Dalam prosedur pengambilan sampel, auditor harus mengevaluasi ketepatan dan tingkat keyakinan yang dibutuhkan untuk mencapai keandalan sampel yang mereka yakin butuhkan. Karena mereka membandingkan traksaksi dengan standard dan menemukan penyimpanannya, mereka harus mengevaluasi signifikansi dari penyimpangan tersebut dan menentukan apakah tindakan perbaikan diperlukan. Karena mereka meringkas hasil-hasil pemeriksaan audit, mereka harus mengevaluasi apa implikasi dari hasil-hasil tersebut.

Penemuan fakta tanpa evaluasi menjadi fungsi yang klerikal. Evaluasi yang layak mengangkat audit dari sekedar pengecekan rinci ke penilaian manajemen. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab konsultasi auditor internal. Auditor terlebih dahulu mengobservasikan fakta-fakta melalui dari kacamata mereka, hal ini merupakan verifikasi, dan kemudian mengevaluasinya dari sudut pandang manajemen.

Tidak ada auditor yang bisa menjadi professional seutuhnya tanpa mengevaluasi setiap hal yang dianut dari segi tujuan dan standar. Data mentah, terlepas dari sebaik apapun penyusunan, tetap saja merupakan data kasar sampai diubah menjadi sesuatu yang berguna melalui evaluasi.

Evaluasi jelas membutuhkan pertimbangan. Auditor yang berpengalaman yaitu auditor veteran dalam kebanyakan pemeriksaan audit, sering melakukan penelaahan draf laporan, pengamat yang bijak atas tindakan dan tujuan organisasi mengevaluasi temuan-temuan audit secara intuitif dan biasanya benar. Tetapi auditor yang sudah berpengalaman seperti ini, tetap memperoleh manfaat dari pendekatan yang terstruktur dan terorganisasi dalam mengevaluasi temuan. Misalnya, dalam mengevaluasi penyimpangan dari norma kegagalan mencapai standar mereka bisa menanyakan diri mereka sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

a. Seberapa signifikan penyimpangan ini?

b. Siapa atau apa yang telah atau akan dirugiakan?
c. Seberapa buruk bahayanya?
d. Apakah penyimpangan tersebut menghalangi organisasi atau suatu fungsi dari pencapaian tutjuan dan sasarannya?
e. Jika tidak ada tindakan perbaikan, yang diambil, apakah penyimpangan akan cenderung terjadi?
f. Mengapa dan bagaimana penyimpangan terjadi?
g. Apakah penyebebnya? Kejadian atau kombinasi kejadia apa yang telah menjauhkan proses dari jalurnya?
h. Apakah penyebab benar-benar telah diketahui dengan pasti dan di jelaskan dengan tepat?
i. Akankah kejadian atau kombinasi dari kejadian setiap kali menjadi penyebab dari hasil yang diamati? Apakah penyebab tersebut telah menjelaskan setiap aspek dari penyimpangan?
j. Jelasnya, auditor harus memikirkan bagaimana meringankan penyaktit begitu mereka mendiagnosisnya. Untuk mempertimbangkan usulan mereka secara terorganisasi, mereka mungkin menanyakan diri mereka pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
k. Tindakan apa yang akan paling praktis dan ekonomis menyembuhkan kerusakan tersebut?
l. Tujuan-tujuan apa yang harus kita ingat dalam merekomendasikan tindak perbaikan?
m. Apa yang seharusnya diupayakan manajemen untuk dicapai dalam memulai tindakan perbaikan?
n. Pilihan-pilihan apa yang tersedia? Bagaimana kesesuaiannya dengan tujuan?
o. Alternatif tentatif apa yang telah dipilih dan dan sisi merugikan apa yang diperkirakan?
p. Pilihan terbaik apa yang tersedia dengan efek samping paling sedikit?
q. Mekanisme apa yang sebaiknya diterapkan untuk mengontrol tindakan perbaikan setelah diambil? Bagaimana seseorang yakin bahwa tindakan perbaikan memang diambil; bahwa akan dihasilkan suatu kesimpulan; bahwa penyimpangan di masa depan akan ditangani seseorang

yang berwenang untuk mengatasi rintangan menuju penyelesaian yang layak atas tindakan yang disarankan?

r. Auditor tidak hanya bertugas menyarankan tindakan perbaikan kepada manajemen, tetapi juga menunjukkan cara agar tindakan tersebut tetap manjur.
s. Berikut ini situasi ditemukannya beberapa kekurangan yang relative kecil. Evaluasi mereka atas aktivitas, termasuk juga kekurangan tersebut, mengungkapkan masalah signifikan yang membutuhkan perhatian manajemen.
t. Sebuah perusahaan kontaktor meberikan jasa produksi dengan tambahan biaya (*cost-plus*) kepada perusahaan, bersama dengan jasa pemrosesan data berdasarkan titik impas (*breakeven basis*). Auditor internal menemukan saat membaca kontrak bahwa tariff yang dibebankan atas jasa pemrosesan data seharusnya ditelaah asetiap tahun oleh kontraktor tersebut dan disesuaikan untuk memastikan operasi berada pada basis titik impas. Apa yang ditemukan auditor sangatlah berbeda.
u. Penelaahan auditor atas pembukuan pusat data mengungkapkan bahwa pendapatan telah melampaui beban selama bertahun-tahun, tetapi tarif tidak pernah diturunkan. Auditor juga mengetahui bahwa beberapa biaya tidak langsung (*overhead*) dari pusat data ditagih pada tarif biaya tidak langsung yang diterapakan ke beban karyawan atas jasa produksi dengan tambahan biaya yang dilakukan untuk perusahaan.
v. Setelah temuan ini dilaporkan oleh manajemen perusahaan ke kontaktor, terjadi negosiasi yang panjang sebelum akhirnya sejumlah $7.000.000 dikembalikan ke perusahaan. Biaya tambahan sebesar $12.000.000 diharapkan bisa dihemat pada dua tahun mendatang.

*****

BAB 7

"BUKTI: PENGUJIAN PEMERIKSAAN MANAJEMEN"

Bukti audit menjadi penentu kesimpulan yang ditarik oleh auditor yang akan memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang cukup dan kompeten agar kesimpulan yang diambilnya tidak menyesatkan. Tipe bukti audit berupa dokumentasi juga penting bagi auditor, dokumentasi pendukung yang dibuat untuk digunakan dalam organisasi klien merupakan bukti audit yang kualitasnya lebih rendah karena tidak adanya pengecekan dari pihak luar yang independen.

Pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh auditor harus didokumentasikan dengan baik dalam kertas kerja audit, hal tersebut disertai dengan keterangan mengenai klasifikasi bukti auditnya. Auditor mudah dalam melakukan analsisis dan evaluasi lebih lanjut, sehingga proses pengembangan temuan audit dapat dilakukan dengan baik berdasarkan unsur-unsurnya. Kertas kerja (*working paper*) merupakan mata rantai yang menghubungkan catatan klien dengan laporan audit. Hal tersebut, kertas kerja merupakan alat penting dalam auditor internal. Auditor harus mengumpulkan berbagai tipe bukti audit untuk mendukung kesimpulan audit. Untuk mendukung simpulan dan pendapatnya atas laporan keuangan auditan. Untuk kepentingan pengumpulan dan pembuatan bukti itulah auditor membuat kertas kerja. Standar Audit Seksi 339 kertas kerja memberikan panduan bagi auditor dalam penyusunan kertas kerja dalam audit atas laporan keuangan atau perikatan audit lainnya, berdasarkan seluruh standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Kertas Kerja Audit (KKA) merupakan

media yang digunakan auditor dalam mendokumentasikan seluruh catatan, bukti dan dokumen yang dikumpulkan dan simpulan yang dibuat auditor dalam setiap tahapan audit. Kertas kerja audit akan berfungsi mendukung laporan hasil audit. Begitu pentingnya KKA ini sehingga harus dijaga mutunya melalui proses reviEw secara berjenjang.

7.1. Informasi Bukti Sebagai Suatu Fakta

Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, hal tersebut dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi, dan informasi penguatan yang tersedia bagi auditor (Mulyadi dan Kanaka, 1998).

Bukti audit merupakan informasi yang akan digunakan oleh auditor untuk menentukan kesesuaian antara yang diaudit dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Bukti audit dapat berupa informasi yang sangat persuasif (sangat meyakinkan) maupun informasi yang kurang persuasif (kurang meyakinkan). Contoh bukti audit yang sangat persuasive adalah hasil perhitungan ulang oleh auditor atas besarnya amortisasi premium atau diskonto utang obligasi. Sedangkan contoh bukti audit yang kurang persuasive adalah hasil Tanya jawab dengan karyawan klien. Jadi, sifat bukti audit dapat sangat bervariasi sesuai dengan kemampuannya dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi. (Sumber : Hery. 2017. *Auditing dan Asurans.*Jakarta:PT. Grasindo.)

7.2. Jumlah Bukti Yang Kompeten

Berkaitan dengan reliabilitas bukti, bukti audit dikatakan tepat jika dapat diandalkan, dapat dipercaya, atau layak dipercaya. Sama seperti relevansi, bukti dianggap dapat diandalkan jika bukti tersebut sangat membantu dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan

secara wajar (Sunyoto dan Danang. 2014). Bukti audit yang kompeten diharapkan akan memberikan informasi yang *real* dan konsisten dengan pelaporan perusahan.

Elder, Beasley, dan Arens, (2008) mengemukakan bahwa keandalan bukti audit bergantung pada independensi penyedia bukti, efektivitas pengendalian internal klien, perolehan secara langsung oleh auditor, kualifikasi penyedia informasi dan juga auditor, objektivitas, dan ketepatan waktu. Berikut merupakan uraiannya.

1. Independensi Penyedia Bukti

   Bukti audit diperoleh dari pihak ketiga atau pihak yang berada di luar klien yang tentu saja lebih dapat diandalkan di bandingkan dengan bukti yang berasal dari atau yang dibuat oleh klien sendiri (bukti internal). Contoh bukti eksternal adalah hasil komunikasi dengan pihak bank, advokat, atau pelanggan, faktur tagihan dari pemasok, sekuritas investasi yang diterbitkan oleh perusahaan lain dan sertifikat deposito bank. Adapun contoh bukti internal adalah formulir permintaan pemberian dan laporan penerimaan barang (Sunyoto & Danang, 2014).

2. Efektivitas Pengendalian Internal Klien

   Bukti audit menjadi lebih dapat diandalkan jika pengendalian internal diterapkan secara efektif oleh klien. Contoh pengendalian internal pembayaran kas kecil diterapkan secara efektif, maka bukti audit yang dapat diandalkan dan diperoleh dari formulir penerimaan kas kecil yang bernomor urut tercetak untuk ditandatangani oleh karyawan yang membayarkan atau menangani kas kecil maupun oleh pihak menerima pembayaran kas kecil (Sunyoto & Danang, 2014).

3. Perolehan bukti secara Langsung oleh Auditor

   Bukti audit diperoleh secara langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, pengamatan, penghitungan ulang, dan inspeksi akan lebih dapat diandalkan dibanding dengan bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung. Contoh bukti audit yang diperoleh dari hasil *cash opname,*

stock opname, penghitungan ulang oleh auditor atas beban penyusunan aktiva tetap, dan pengamatan atau obervasi langsung atas proses produksi klien (Sunyoto & Danang, 2014).

4. Kualifikasi Penyedia Informasi

   Penyedia informasi adalah pihak independen namun bukti audit akan menjadi tidak dapat diandalkan jika penyedia informasi tidak memiliki pemahaman mengenai arti pentingnya bukti audit tersebut. Contoh, hasil komunikasi dengan advokat dan bank pada umumnya akan lebih layak dipercaya (secara independen) dibanding dengan hasil konfirmasi piutang dari pelanggan, khususnya untuk pelanggan yang tidak memahami maksud dan tujuan dari dilakukannya komunikasi atau konfirmasi tersebut. Selain itu bukti yang diperoleh secara langsung oleh auditor juga akan menjadi tidak dapat diandalkan jika auditor tersebut tidak atau kurang memiliki pengetahuan dalam mengevaluasi bukti terkait (Danang, 2014).

5. Objektivitas

   Bukti objektif lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti yang memerlukan pertimbangan tertentu. Contoh bukti yang bersifat objektif adalah hasil konfirmasi atas piutang usaha dan kas di bank, pemeriksaan fisik atas saldo kas kecil, persediaaan, aktiva tetap berwujud, serta bukti pembelian perlengkapan dan peralatan. Bukti yang bersifat subyektif seperti hasil Tanya jawab dengan manajer akuntansi mengenai besarnya estimasi atas nilai residu dari beberapa aktiva tetap tertentu dan estimasi atas besarnya pencadangan piutang tak tertagih (Sumber: Sunyoto, Danang. 2014).

6. Ketepatan Waktu

   Ketepatan waktu bukti audit berkaitan kapan bukti yang dikumpulkan serta bagaimana menentukan tanggal sampel dari transaksi dalam periode berjalan. Untuk akun-akun neraca, ketepatan waktu bukti audit berkaitan kapan

bukti ini dikumpulkan, sedangkan untuk akun-akun laporan rugi laba, ketepatan waktu bukti audit berkaitan dengan pemilihan tanggal sampel atau penentuan bagian periode yang akan diaudit. Penghitungan oleh auditor atas posisi kas pada tanggal neraca akan lebih dapat diandalkan dibanding dengan jika penghitungan dilakukan pada dua bulan sebelumnya. Adapun untuk akun laporan rugi laba, bukti yang diperoleh akan lebih diandalkan jika sampel diambil dari keseluruhan periode yang diaudit. Pemeriksaan secara acak sampel jurnal pembelian barang dagang yang terjadi untuk satu tahun penuh dalam periode laporan keuangan yang diaudit bukan hanya dari sebagian periode saja (Danang, 2014).

7.3. Penetapan Bukti Audit

Keputusan penting yang dihadapi auditor dalam menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat adalah meliputi penentuan prosedur audit, ukuran sampel, metode pemilihan sampel, dan penetapan waktu. Prosedur audit merupakan rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit harus diperoleh selama audit berlangsung. Prosedur audit untuk memverifikasi pembelian barang dagang adalah memeriksa jurnal pembelian dan membandingkannya dengan jumlah yang tertera dalam formulir permintaan pembelian, laporan penerimaan barang, serta faktur tagihan.

Setelah prosedur audit diterapkan, auditor menenetukan ukuran sampel. Ukuran sampel untuk setiap prosedur mungkin akan berbeda antara audit yang satu dengan audit yang lainnya. Setelah ukuran sampel untuk prosedur audit telah ditentukan, auditor harus memutuskan metode pemilihan sampel. Keputusan penetapan waktu berkaitan dengan penentuan atau pemilihan tanggal sampel. Sebagai contoh, auditor memutuskan untuk memeriksa secara acak sampel jurnal pembelian barang dagang yang terjadi untuk satu tahun penuh dalam periode laporan keuangan yang diaudit (Hery. 2017).

7.4. Sumber bukti audit

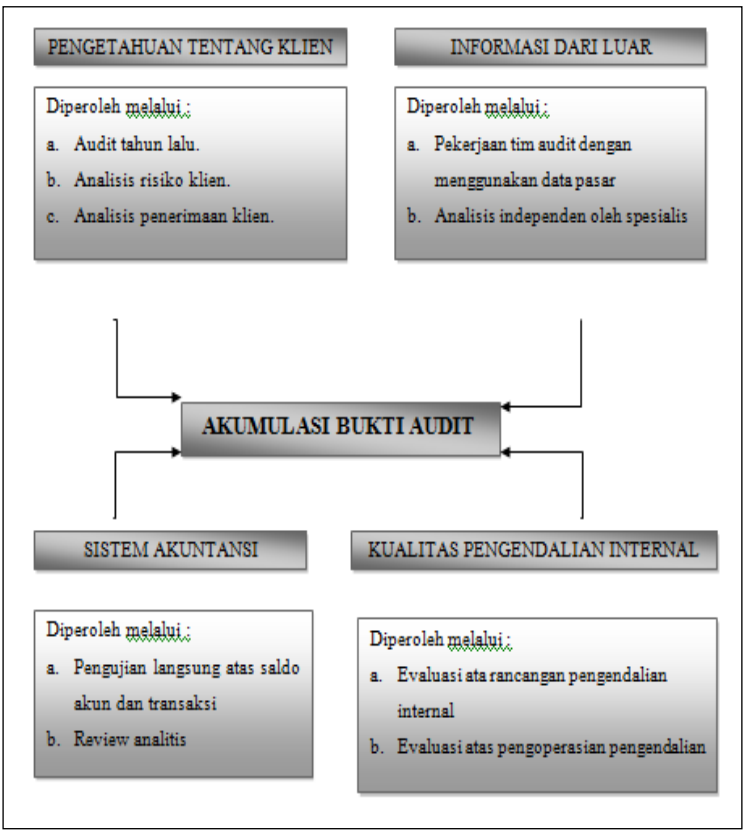

(Sumber: Jusup, Al-Haryono 2011).

Sumber bukti audit dapat diperoleh dari pengetahuan auditor dengan analisa hasil audit tahun lalu, analisis resiko sementara sumber dari luar adalah data pasar. Akumulasi bukti audit dilakukan pengujian dan penelusuran transaksi, uji analitis dan evaluasi pengendalian internal serta evaluasi.

7.5. Hubungan Antara Norma-Norma Pemeriksaan Bukti Audit dan Prosedur Audit

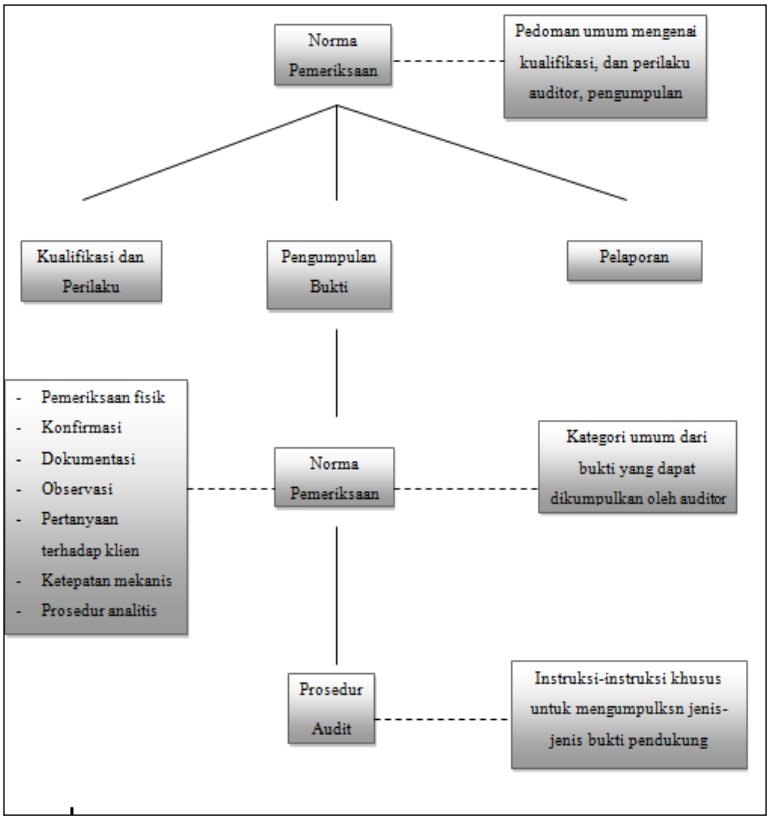

(Sumber: Sunyoto, Danang. 2014).

Norma pemeriksaan berdasarkan pada pedoman umum audit internal yang merangkum; kualifikasi dan perilaku, pengumpulan bukti dan pelaporan. Norma pemeriksaan dengan kategori bukti yang dapat dikumpulkan oleh auditor yaitu; pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, observasi, pertanyaan. Selanjutnya prosedur audit dengan melakukan instruksi khusus untuk mengumpulkan jeni bukti pendukung serta konfirmasi.

7.6. Hubungan Antara Risiko, Ketepatan, Dan Kecukupan Bukti

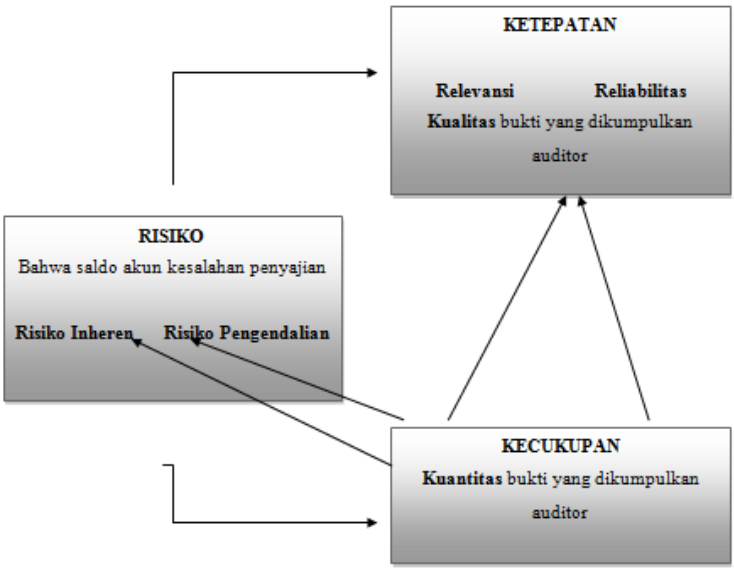

(Sumber : Jusup, Al-Haryono.2011).

Risiko pengendalian dan risisko inheren akan mempengaruhi besarnya sampel bukti yang akan diambil oleh seorang auditor, semakin bagus pengendalian intern, maka auditor akan mengumpulkan bukti semakin kecil dan sebaliknya. Kecukupan bukti akan menjadi tolak ukur reliabilitas auditor dan revansi atas pengambilan keputusan dan rekomendasi audit.

7.7. Pengertian Kertas Kerja

Pengertian dari kertas kerja menurut SAS 41 (AU 338) dikutip oleh Arens dan Loebbecke (1992) adalah catatan yang dibuat dan disimpan oleh auditor mengenai prosedur yang digunakan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan kesimpulan yang didapatkannya selama penugasan. Kertas

kerja harus memuat semua informasi yang dianggap perlu oleh auditor untuk melaksanakan pemeriksaannya dengan sewajarnya untuk memberikan dukungan bagi laporan auditnya. Tujuan umum penggunaan kertas kerja untuk membantu auditor dalam memberikan keyakinan bahwa audit yang memadai telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan. Kertas kerja yang menyangkut audit tahun berjalan, menjadi dasar bagi perencanaan audit, catatan mengenai bukti yang dikumpulkan dan hasil dari pengujian, data untuk menetapkan jenis laporan audit yang tepat (Sumber: Sunyoto, Danang. 2014).

Standar audit (SA) 230 tentang kewajiban auditor dalam menyusun dokumentasi keperluan audit atas laporan keuangan. Menurut standar 230 yang dimaksud dengan dokumentasi audit adalah dokumentasi prosedur audit telah dilakukan, bukti audit relevan yang diperoleh, dan kesimpulan yang telah ditarik. Dokumentasi audit mencakup semua informasi yang dipandang perlu oleh auditor untuk memenuhi pelaksanaan audit dan menjadi pendukung atas laporan audit. Dokumentasi audit atau disebut juga kertas kerja audit, dokumentasi audit sering kali berbentuk file eletronik, sehingga istilah dokumentasi audit dipandang lebih tepat (Sumber: Jusup, Al-Haryono, 2011).

7.8. Kertas Kerja Dan Bukti Yang Objektif

Menurut Mulyadi dan Kanaka (1998) ada empat tujuan pembuatan kertas kerja, yaitu:

1. Pendapat auditor atas laporan keuangan menguatkan laporan *auditee*.

   Standar pekerjaan lapangan ketiga mensyaratkan auditor memperoleh bukti kompeten yang cukup sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan *auditee*. Kertas kerja dapat digunakan untuk mendukung pendapatnya dan merupakan bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit yang memadai dalam proses audit.
2. Menguatkan kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya.

   Kesimpulan atau pertimbangan yang telah dibuat setelah proses audit, maka auditor dapat kembali memeriksa kertas

kerja yang telah dibuat dalam auditnya. Pembuatan seperangkat kertas kerja yang lengkap merupakan syarat yang penting dalam membuktikan telah dilaksanakannya dnegan baik audit atas laporan keuangan.

3. Mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit.
   Tahap ini adalah tahap mengkoordinasikan kertas kerja dengan bukti audit. Pengkoordinasian dan pengorganisasian berbagai tahap audit tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kertas kerja.
4. Memberikan pedoman audit berikutnya.
   Audit yang dilakukan terhadap *auditee* yang sama dalam periode akuntansi yang berlainan, auditor memerlukan informasi mengenai : sifat usaha *auditee*, catatan dan system akuntansi klien, pengendalian intern *auditee*, dan rekomendasi perbaikan yang diajukan kepada klien dalam audit yang lalu, jurnal-jurnal adjustment yang disarankan untuk menyajikan secara wajar laporan keuangan yang lalu (Sumber: Sunyoto, Danang. 2014. *Auditing Pemeriksaan Akuntansi*.Yogyakarta:CAPS).

7.9. Isi Kertas Kerja Audit

Menurut SA Seksi 339 kertas kerja paragraf 05 (dikutip oleh Mulyadi dan Kanaka, 1998) kertas klerja harus cukup memperlihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan serta standar auditing yang dapat diterapkan telah dilaksanakan oleh auditor. Kertas kerja biasanya harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan:

1. Telah dilaksanakannya standar pekerjaan laporan pertama, yaitu pemeriksaan telah direncanakan dan disuvervisi dengan baik.
2. Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan kedua, yaitu pemahaman memadai atas struktur pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan memntukan sifat, saat, dan lingkup pengujianyang telah dilakukan.

3. Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan ketiga, yaitu bukti audit yang telah diperoleh, prosedur audit telah diterapkan, dan pengujian telah dilaksanakan, yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

ILUSTRASI KERTAS KERJA
PT. MEGA RESKI
Rekonsiliasi Bank untuk Bank Niaga-102
31/12/2012

Saldo menurut bank
Rp. 188.297.820

Tambah :

Setoran dalam perjalanan
Rp. 4.356.600

Rp. 192.654.420

Kurangi :

Cek-cek yang beredar :

C-124	Rp.	3.300.000
C-135	Rp.	261.300
C-222	Rp.	698.700
C-387	Rp.	51.600
C-399	Rp.	1.859.250
C-477	Rp.	1.416.570
	Rp.	7.587.420

Saldo disesuaikan
Rp. 185.067.000

Saldo menurut buku besar
Rp. 183.804.000

AJP 7 : Penagihan oleh bank
Rp. 1.546.350

Rp. 185.350.350

AJP 8 : Biaya bank bulan Desember
(Rp. 13.350)

AJP 9 : Membetulkan kekeliruan pada Cek No. 222
(Rp. 270.000)

Saldo disesuaikan
Rp. 185.067.000

(Sumber : Sunyoto, Danang. 2014. *Auditing Pemeriksaan Akuntansi*.Yogyakarta:CAPS.)

7.10. Ringkasan

Bukti audit merupakan fondasi dari setiap audit yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat pada setiap audit untuk memenuhi persyaratanstan dar profesi. Dalam pengauditan auditor akan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan asersi-asersis ecara obyektif. Program audit dirancang untuk menunjukkan bagaimana akibat keputusan-keputusan ini pada aktivitas audit tertentu untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Proses yang dilakukan auditor dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti harus di dokumentasikan secara jelas menunjukkan bukti yang diperoleh dan evaluasi auditor atas bukti tersebut, pertimbangan auditor, dan kesimpulan yang dicapai.

BAB 8 AUDIT MANAJEMEN

Peranan audit internal pada saat ini sangat diperlukan di berbagai institusi, tidak terkecuali untuk pengawasan sehari-hari atas perusahaan dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan efektif tanpa mengurangi tanggungjawabnya (Gusnardi, 2008). Pada aspek non akademik kedudukan audit internal sebagai *supporting activity* seperti keuangan, asset, organisasi dan sumberdaya manusia dan kemahasiswaan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan perguruan tinggi sehingga memerlukan perhatian yang tinggi pula.

Pada saat ini biaya pendidikan di Indonesia sudah semakin tinggi terlebih institusi swasta. Semakin tinggi biaya pendidikan ditingkat perguruan tinggi menyebabkan biaya yang dikelola perguruan tinggi menjadi tidak sedikit. Untuk itu akan rawan sekali terjadinya fraud, baik itu penyalahgunaan asset (*Asset Misappropriation*) karena jumlah asset yang ada dilingkungan perguruan tinggi cukup banyak, fraud dalam penerimaan biaya pendidikan mahasiswa, biaya marketing atau biaya praktik mahasiswa yang cukup tinggi juga bisa menjadi celah atau jalan untuk melakukan fraud. Pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya perilaku penyimpangan melalui pengendalian internal (*internal control system*) (Meikhati & Rahayu, 2015).

Salah satu tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan berbagai usaha adalah bagaimana untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi perusahaan. Tantangan ini selalu ada karena manajemen

perusahaan memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan, tetapi manajemen harus menghadapi situasi kelangkaan sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat perencanaan yang tepat dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung operasional yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan yang dibuat mencakup batas-batas operasional yang akan dilakukan, baik luasnya cakupan operasi (volume produksi, promosi, pelayanan pelanggan, dan sebagainya), maupun konsumsi sumber daya (perolehan kapasitas produksi, pembayaran kepada pemasok dan karyawan, serta penyelesaian kewajiban jangka pendek lainnya). Perencanaan yang disusun secara tepat dapat memberikan arahan berjalannya operasi yang efisien dan efektif mampu mencapai tujuan perusahaan. Hal ini, yang mendorong perlu adanya audit manajemen untuk mendukung jalannya suatu usaha.

Audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan berupa suatu rancangan sistematis untuk mengaudit aktivitas, program yang digunakan keseluruhan atau sebagian dari entitas untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien dan apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan telah dicapai dan tidak melanggar ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Begitu pula Audit manajemen dilakukanuntuk menilai unsur-unsur manajemen suatu organisasi tersebut apakah telah direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar sehinggafungsi-fungsi pada suatu organisasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas efisiensi, dan ekonomisasiserta kesesuaian terhadap kebijakan setiap operasi yang dilaksanakan. Pelaksanaan audit manajemen di setiap organisasi berbeda-beda dan bervariasi, tergantung lingkup audit yang ditetapkan oleh manajemen puncak dari suatu organisasi,http://repository.ut.ac.id/3879/1/EKSI4413-M1.pdf.

Audit manajemen digunakan untuk memastikan seberapa baik manajemen, baik dalam hubungan eksternalnya dengan pihak luar maupun efisiensi internalnya. Pemeriksaan dilakukan terhadap smoothness organisasi, mulai dari level teratas sampai level terbawah. Dengan demikian, hampir setiap aspek manajemen diperiksa, dan rekomendasi yang ditawarkan diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan profitabilitas Salah satu yang mendukung audit manajemen adalah konsep dasar, untuk itu penyusun membahas tentang konsep dasar audit manajemen.

8.1 Konsep Dan Definisi Audit

Istilah auditing digunakan untuk menguraikan rentang luas kegiatan dalam masyarakat kita. Sebelum membahas tentang jenis-jenis audit dan auditor yang berbeda, kita akan meneliti berbagai definisi auditing sehingga dapat diidentifikasi sejumlah ciri ciri umum sebagian besar kegiatan auditing modern. "*Report of the comitte on basic auditing concepts of the American accounting Associatition" (Accounting Review, vol 47*) memberikan definisi auditing sebagai "suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan". (Boynton C. William, Johnson N. Raymond, Kell G. Walter. 2003).

8.2 Jenis-jenis Audit

Tiga jenis audit yang ada umumnya menunujukkan karakteristik kunci yang tercakup dalam definisi auditing yang telah disampaikan di atas. Jenis Jenis audit tersebut adalah audit audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Sifat dasar dari setiap jenis audit akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan (*financial statement audit*) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada kebanyakan negara bagian di Amerika Serikat berlaku suatu ketentuan bahwa hanya *Certified Public Accountant* (CPA) yang dapat melakukan audit eksternal, yang biasanya dilakukan melalui penunjukkan kantor CPA oleh perusahaan yang laporannya akan di audit. Hasil audit laporan keuangan tersebut didistribusikan kepada para pengguna dalam spektrum yang luas, seperti para pemegang saham, kreditor, kantor pemerintah dan masyrakat umum melalui laporan auditor atas laporan keuangan. Selain itu, auditor eksternal juga menyiapkan laporan kepada dewan direksi tentang pengendalian intern perusahaan serta temuan- temuan audit lainnya. Audit laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan besar sangat diperlukan untuk memfungsikan pasar sekuritas nasional. Secara signifikan, auditor laporan keuangan dapat menurunkan risiko investor dan kreditor dalam membuat berbagai keputusan investasi dengan tidak menggunakan informasi yang bermutu rendah.

b. Audit Kepatuhan

   Audit kepatuhan (*compliance audit*) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan ketentuan, atau peraturan tertentu. Kriteria yang ditetapkan dalam audit jenis ini dapat mengeluarkan kebijakan atau ketentuan yang berkenaan dengan kondisi kerja, partisipasi dalam program pensiun, serta pertentangan kepentingan. Audit kepatuhan juga harus didasarkan pada kriteria yang diteapkan auditor. Aplikasi yang paling luas dari audit kepatuhan berkaitan

dengan kriteria yang didasrakan pada ketentuan pemerintah. Sebagai contoh, perusahaan harus mematuhi sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan tenaga kerja, seperti *Equal Employement Opurtunity Act dan fair labor standards Act,* demikian pula halnya dengan para kontraktor pertahanan yang harus mematuhi berbagai persyaratan kontrak pemerintah.

c. Audit Operasional

Audit Operasional (*operational audit)* berkaitan dengan kegiatan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Kadang-kadang audit jenis ini disebut juga sebagai audit kinerja atau audit manajemen. Dalam satu perusahaan bisnis, lingkup audit ini dapat meliputi seluruh kegiatan dari: (1) suatu departemen, cabang, atau divisi atau (2) suatu fungsi yang mungkin merupakan fungsi lintas unit usaha, seperti pemasaran atau pengolahan data. Audit operasional pada pemerintah federal dapat dilakukan pada seluruh kegiatan dari 10 suatu lembaga, seperti *Federal Emergency Management* (FEMA), atau (2) suatu program tertentu, seperti distribusi kupon makanan. Kriteria atau digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas dapat ditentukan oleh manajemen atau lembaga yang berwenang (Boynton C, 2003).

8.3 Manajemen Audit

Management audit, disebut juga operasional audit, audit fungsional dan sistem audit yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Tujuan dari *management* audit adalah untuk:

1. Menilai kinerja (performance) dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan.
2. Menilai apakah berbagai sumber daya (Manusia, mesin, dana, harta lainnya) yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis.
3. Menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan (objective) yang telah ditetapkan oleh top mangement.
4. Dapat memberikan rekomendasi kepada top management untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas dari kegiatan operasi perusahaa (Agoes, Sukrisno 2013).

Keseluruhan tujuan pemeriksaan intern adalah untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran, dan komentar yang objektif mengenai kegitan/hal-hal yang diperiksa untuk mencapai keseluruhan tujuan hal ini, maka auditor internal harus melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:

a. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.
b. Memeriksa samapi sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan,rencana,dan prosedur yang telah ditetapkan.
c. Memeriksa sampai sejauh mana aset perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
d. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
e. Menilai prestasi kerja para pejabat/pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan.

Tujuan utama pemeriksaan intern adalah untuk menyakinkan:

1. **Kendalan Informasi**. Pemeriksa internal harus meninjau keandalan (realibilitas dan integritas) berbagai informasi

finansial dan pelaksanaan pekerjaan atau operasi, serta berbagai cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi.

2. **Kesesuaian dengan kebijaksanaan**. Rencana, prosedur dan peraturan perundang-undangan. Pemeriksa internal harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuainanya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur,ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang dimiliki. Jadi pemeriksa intern bertanggung jawab dalam menentukan apakah sistem tersebut telah mencukupi dan efektif sserta apakah berbagai kegiatan yang diperiksanya benar-benar telah memenuhi persyaratan yang diperlikan.
3. **Perlindungan tehadap asset**. Pemeriksa internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan unruk melindungi aset terhadap berbagai jenis kerugian seperti kerugian yang diakibatkan oelh pencurian, kegiatan yang ilegal atau tidak pantas dan, bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan dari suatu aset atau aset. Pada saat memverifikasi keneradaan suatu aset, pemeriksa harus mempergunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat.
4. **Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien**. Pemeriksaan yang berhubungan dengan keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya haruslah mengidentifikasi berbagai keadaan seperti: (1) fasilitas-fasilitas yang tidak dipergunakaan sepenuhnya, (2) pekerjaan yang tidak produktif, (3) berbagai prosedur yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan biaya, dan (4) terlalu banyak atau sedikitnya jumlah staf.
5. **Pencapaian tujuan**. Pemeriksa internal haruslah menilai pekerjaan, operasi, atau program untuk menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah pekerjaan, operasi atau program tersebut telah silaksanakan sesuai dengan rencana (Hery 2017).

8.4 Aplikasi Management Audit untuk Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomis.

Telah dijelaskan bahwa tujuan utama management audit adalah untuk menilai performance management dan fungsi-fungsi dalam perusahaan terutama efektivitas, efisiensi, dan kehematan (*economis)* dari kegiatan usaha perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan pengertian efektif, efesien, dan ekonomis. Menurut Hans kartikahadi (1990) pengertian efektivitas, ekonomis (kehematan), dan efisiensin dapat diuraikan sebagai berikut;

a. Efektivitas dimaksud bahwa produk akhir suatu kegitan operasi telah mencapai tujuannya baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan.
b. Kehematan (ekonomis) berati cara penggunaan sesuatu barang (hal) secara berhati-hati dan bijak (*prudent*) agar diperoleh hasil yang terbaik
c. Efisiensi berarti bertindak dengan cara yang dapat meminimalisasi kerugian atau pemborosan sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu (Agoes, Sukrisno 2013).

Evidence dan Objektif

Auditor mengawali perencanaan audit dengan meletakkan akhir audit dibenaknya. Sejak awal telah disebutlan bahwa tujuan menyeluruh audit laporan keuangan adalah menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan klien menyajikan secara wajar , dalam semua hal yang material. Untuk itu, auditor harus memperoleh bahan bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. Disamping itu, pilihan akan bukti auditor dipengaruhi oleh:

a. Pemahaman auditor atas bisnis dan industry klien
b. Perbandingan antara harapan auditor atas laporan keuangan dengan buku dan catatan klien
c. Keputusan tentang asersi yang material bagi laporan keuangan

d. Keputusan tentang risiko bawaan dan risiko pengendalian.

Menurut (Boynton C. William, Johnson N. Raymond, Kell G. Walter. 2003). *"Internal auditors must be able to maintain objectivity and identify threats to their organizational status / objectivity and they are required to evaluate and minimize those threats, and determine whether they can be objective given the steps they have taken to minimize the threats identified. This is largely a process of self-assessment by internal auditors. (IIA 2000, 2003, p.224). So, internal auditors are prohibited from auditing areas where there is any personal or professional involvement with or allegiance to the area being audited, or where relatives are employed in important or audit-sensitive positions. They are also prohibited from auditing areas where internal auditors were recently assigned or will be assigned in the future (SAS No. 65). It would also be a conflict of interest to provide assurances services for an activity for which the internal auditor had responsibility within the previous year (IIA, 2003, sec. 1130.A1)"*.

Auditor internal harus dapat menjaga objektivitas dan mengidentifikasi ancaman terhadap status organisasinya/ objektivitas dan mereka diminta untuk mengevaluasi dan meminimalkan ancaman tersebut, dan menentukan apakah mereka dapat melakukannya. Tujuan diberikan langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk meminimalkan ancaman yang teridentifikasi. Ini sebagian besar merupakan proses penilaian diri oleh auditor internal. (IIA 2000, 2003, hal.224). Jadi, auditor internal dilarang melakukan audit di area dimana ada keterlibatan pribadi atau profesional dengan atau kesetiaan terhadap area yang diaudit, atau dimana kerabat dipekerjakan di posisi penting atau sensitif terhadap audit. Mereka juga dilarang melakukan audit daerah dimana auditor internal baru-baru ini ditugaskan atau akan ditugaskan di masa depan (SAS No. 65). Itu juga menjadi konflik kepentingan untuk memberikan layanan penjaminan untuk aktivitas auditor internal yang memiliki tanggung jawab di tahun sebelumnya (IIA, 2003, dst. 1130.A1)" (Abbass & Aleqab, 2013).

8.5 Sifat Dan Keputusan Bukti Audit

Bukti audit merupakan informasi yang akan digunakan oleh auditor menentukan kesesuaian antara yang diaudit dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Bukti audit dapat berupa informasi yang sangat persuasif (sangat menyakinkan). Contoh bukti audit yang sangat persuasif adalah hasil penghitungan ulang oleh auditor atas besarnya amortisasi premium atau diskonto utang obligasi. Sedangkan contoh bukti audit yang kurang persuasif dalah hasil tanya jawab dengan karyawan klien. Jadi, sifat bukti audit dapat sangat bervariasi sesuai dengan kemampuannya dalam menyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi (Hery 2017).

Keputusan penting yang diharapi oleh auditor dalam menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat adalah meliputi penentuan, prosedur, audit, ukuran sampai, metode pemilihan sampel, dan penentuan waktu. Prosedur audit adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit berlangsung. Sebagai contoh, prosedur audit umtuk memverifikasi pembelian barang dagang adalah memeriksa jurnal pembelian dan membandingkannya dengan jumlah yang tertera dalamformulir permintaan pembelin, laporan penerimaan barang, serta faktur tagihan.

Setelah prosedur audit ditetapkan, auditor menentukan ukuran sampel. Sebagai contoh, auditor dapat memilih ukuran sampel sebanyak 35 dari 300 faktur tagihan untuk dibandingkan dengan jurnal pembelian. Ukuran sampel untuk setiap prosedur mungkin akan berbeda antara audit yang satu dengan audit yang lainnya. Setelah ukuran sampel untuk suatu prosedur audit ditentukan, auditor harus memutuskan metode pemilihan sampel. Dalam contoh ini, auditor dapat memilih 35 invoice pertama, atau 35 invoice dengan nilai terbesar, atau 35 invoice secara acak, atau 35 invoice yang menurut auditor paling mungkin mengandung salah saji, atau bisa juga mengi berbagai mengunakan kombinasi dari berbagai metode

tersebut. Keputusan penetapan waktu berkaitan dengan penentuan atau pemilihan tanggal sampel. Sebagai contoh, auditor memutuskan untuk memeriksa secara acak sampel jurnal pembelian barang dagang yang terjadi untuk satu tahun penuh dalam periode laporan keuangan yang diaudit (Hery ,2017).

8.6 Keputusan Penting tentang Bukti Audit

Ketika merencanakan audit, auditor harus membuat empat keputusan penting tentang lingkup dan pelaksanaan audit. Keputusan tersebut meliputi:

a. Sifat pengujian yang harus dilaksanakan
b. Saat pengujian yang harus dilaksanakan
c. Luas pengujian yang harus dilaksanakan
d. Penetapan staf untuk melaksanakan audit.

Setiap keputusan audit diatas memiliki hubungan yang penting dengan penggunaan kemahiran profesional auditor (Boynton C. William, Johnson N. Raymond, Kell G. Walter. 2003).

Setelah melakukan *preliminary survey*, auditor harus menentukan *tentative audit objective*-nya, kemudian melakukan *review and testing of management control system* untuk memastikan apakah tentative audit objektive (tujuan pemeriksaan yang bersifat sementara) dapat dijadikan firm audit objective (tujuan pemeriksaan yang pasti). Jika ternyata tentative audit objective tidak dapat dijadikan firm audit objective, misalnya karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kompeten, maka auditor harus menentukan atau mencari tentative audit objective yang lain.

Elemen dalam audit objektif, yaitu: *criteria*, *causes dan effects*, berikut penjelasannya:

1. *Criteria* merupakan standar yang harus dipatuhi oleh setiap bagaian dalam peraturan oleh setiap bagaian dalam perusahaan. Standar bisa berupa kebijakan yang telah ditetapkan manajemen, kebijakan perusahaan sejenis atau

kebijakan industri, dan peraturan pemerintah (di Amerika bisa peraturan negara bagian).

2. *Causes* adalah tindakan-tindakan yang dilakukan yang dilakikan manajemen atau pegawai perusahaan, termasuk tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi critesia tetapi tidak dilakukan oleh manajemen atau pegawai perusahaan. Dengan kata lain causes adalah tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang berlaku.
3. *Effects* adalah akibat dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang berlaku.

   Berikut ini diberikan beberapa contoh dari audit *objectives.*

   a) Suatu perusahaan angkutan menentukan bahwa ban mobil yang sudah tipis harus divulkanisir, bukan diganti dengan ban baru(criteria).Auditor menemukan bahwa terdapat pembelian ban mobil baru untuk beberapa kendaraan angkutan(causes).Akibatnya terjadi pemborosan kurang lebih Rp. 5.000.000, sebulan *(effects).*
   b) Sebuah koperasi primer menentukan bahwa pemelihan supplier dalam pembelian barang dagangan koperasi harus didasarkan pada: harga yang murah, mutu barang yang baik, dan syarat pembayaran yang menguntungkan *(criteria)*. Auditor menentukan bahwa supplier yang menjadi pelanggan tetap perusahhan hanya ada jdua (causes). Akibatnya harga beli barang dagangan menjadi mahal, sehingga harga jual koperasi tidak bisa bersaing dengan perusahaan lainnya dan barang dagangan banyak yang tidak laku dan menjadi rusak, selain itu terbukti petugas bagian pembelian memperoleh *kicback commission (effect*).
   c) Sebuah kantor akuntan menentukan bahwa penerimaan pegawai harus melalui seleksi yang

ketat untuk menjamin diperolehnya pegawai yang kapabel atau cakap (*criteria*). Dalam proses penelitian pegawai, bagian personalia banyak menerima surat sakit atau katebelece *(causes).* Akibatnya banyak klien yang mengeluh karena jasa kantor akuntan tersebut tidak memuaskan karena staf kantor akuntan yang ditugaskan ke klien tidak profesional (Agoes, Sukrisno, 2013).

8.7 Ringkasan

Audit manajemen adalah suatu teknik yang meliputi berbagai bidang yang luas tentang prosedur, metode penilaian, kelayakan dan pendekatan-pendekatan. Pemeriksaan manajemen dirancang untuk menganalisis, menilai, meninjau ulang dan menimbang hasil kerja perusahaan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan atau pedoman yang ditentukan oleh perusahaan. Tujuan dari pemeriksaan manjemen adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas perusahaan.

Tujuan dari audit manajemen adalah penilaian atas pengendalian, penilaian atas pelaksanaan dan memberikan bantuan kepada manajemen. Tujuan atau sasaran dalam audit manajemen adalah kegiatan, aktivitas, program, dan bidang-bidang dalam perusahaan yang diketahui atau diidentifikasi masih memerlukan perbaikan/peningkatan, baik dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Tiga elemen pokok dalam tujuan audit adalah Kriteria (*criteria*), Penyebab (*cause*) dan Akibat (*effect*).

*****

BAB 9

CONTOH PEDOMAN INTERNAL AUDIT (IA) PERUSAHAAN

Bab ini akan memperlihatkan beberapa contoh dari pedoman internal audit yang umumnya di gunakan oleh perusahaan.

9.1 Pedoman Kerja Unit Internal Audit (IA) PT Erajaya Swasembada Tbk & Entitas Anak

Pedoman Kerja Unit

Internal Audit (Internal Audit Charter)

PT Erajaya Swasembada Tbk & Entitas Anak

(Sumber; www.erajaya.com)

Berlaku Sejak Tahun 2011

Piagam Internal Audit ini merupakan salah satu penjabaran dari pedoman pelaksanaan GCG dan disusun untuk menjadi norma – norma acuan kerja bagi Unit Audit Internal (UAI) agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tujuan penugasannya dan

sekaligus sebagai sarana komunikasi agar kerja Unit Audit Internal (UAI) dapat diterima dan didukung oleh unit kerja lainnya.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perseroan dan Entitas Anak (“Grup Erajaya”) adalah salah satu distributor dan peritel terkemuka untuk produk layanan komunikasi selular di Indonesia. Produk tersebut mencakup merek Acer, Apple, BlackBerry, Dell, Huawei, Nokia, Samsung, dan Sony Ericsson serta voucher isi ulang paket, perdana kartu SIM dan produk lainnya dari seluruh operator selular utama Indonesia. Grup Erajaya juga pemilik merek Venera untuk telepon selular. Dengan jaringan distribusi yang luas, Grup Erajaya menawarkan platform yang mapan bagi prinsipal merek, dan kepada operator jaringan selular untuk mendistribusikan produk mereka di Indonesia.

Grup Erajaya merupakan salah satu distributor dan peritel terbesar di Indonesia dalam segmen produk komunikasi selular. Melalui jaringan ritelnya, Grup Erajaya menjual berbagai macam produk telepon selular dan aksesoris dari prinsipal merek utama serta paket perdana kartu SIM pra-bayar dan voucher isi ulang dari seluruh operator jaringan selular utama di Indonesia.

Grup Erajaya telah menerima berbagai penghargaan dari prinsipal merek atas kinerjanya sebagai distributor baik pada tingkat regional maupun nasional, yang meliputi kategori volume penjualan, pertumbuhan pendapatan, kinerja pusat layanan dan hubungan pelanggan yang baik dari prinsipal merek seperti Nokia, Samsung dan Sony Ericsson.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi : perdagangan, industri, dan jasa.

Tugas kepengurusan perusahaan tersebut diatas haruslah dilaksanakan sesuai kaidah – kaidah Good Corporate Governance (GCG), yang meliputi transparansi, kemandirian , akuntabilitas dan pertanggungjawaban serta kewajaran (fairness) sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan taat kepada peraturan perundangan.

Suatu mekanisme dan sistem pengendalian internal merupakan salah satu sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip GCG yang diinginkan tersebut.

Sesuai dengan surat ketua BAPEPAM dan LK No.29/PM/2004, tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit di perusahaan publik menunjukan bahwa pengawasan internal merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin tercapainya tujuan pendirian perusahaan.

Piagam Internal Audit ini merupakan salah satu penjabaran dari pedoman pelaksanaan GCG dan disusun untuk menjadi norma – norma acuan kerja bagi Unit Audit Internal (UAI) agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tujuan penugasannya dan sekaligus sebagai sarana komunikasi agar kerja Unit Audit Internal (UAI) dapat diterima dan didukung oleh unit kerja lainnya.

1.2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi mitra kerja unit yang independen, objektif, profesional, terpercaya dan tanggap untuk mendukung tugas Direksi dan Jajaran managemen dalam usaha mencapai sasaran perusahaan

Misi

1. Membantu manajemen dalam mencapai kinerja perusahaan melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas kegiatan perusahaan;

2. Mendorong peningkatan kinerja perusahaan melalui pengujian yang independen dan obyektif atas operasi perusahaan serta memberikan jasa konsultasi untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan dan sistem-sistem pendukungnya dalam rangka memperbaiki operasi perusahaan;
3. Membantu perusahaan dalam mencapai tujuan secara sistematis dan disiplin melalui evaluasi dan perbaikan keefektifan pengendalian manajemen risiko dalam suatu proses yang baik, bersih dan transparan;
4. Sebagai mitra kerja Unit Audit Internal (UAI) harus mampu memberikan konsultasi dalam meningkatkan nilai-nilai perusahaan dan dapat dipercaya, melalui proses kerja yang :
    a. Berfokus pada proses bisnis perusahaan;
    b. Berfokus kepada pelayanan pelanggan;
    c. Bersikap proaktif, tanggap, terpercaya dan objektif;
    d. Berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis;
    e. Mengukur sukses berdasarkan kualitas selain kuantitas;
    f. Mampu menemukan dan mengenali akar masalah dan deteksi dini (sesuai dengan kompetensi auditor);
    g. Mampu menyajikan secara obyektif dan potensial;
    h. Mampu menyampaikan rekomendasi yang efektif dan terimplementasi

BAB II UNIT INTERNAL AUDIT

2.1. Struktur dan Kedudukan Unit Internal Audit

1. Unit Audit Internal (UAI) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal;

2. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris;
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal (UAI) sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas;
4. Kepala Unit Audit Internal bertanggungjawab kepada Direktur Utama;
5. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal (UAI) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Audit Internal;

   6. Unit Audit Internal (UAI) secara administrasi berada di bawah Direktur Utama.

2.2. Fungsi Unit Internal Audit

Unit Audit Internal (UAI) adalah unit internal yang bersifat independen dan berfungsi untuk :

1. Membantu Direktur Utama dalam penerapan GCG yang meliputi pemeriksaan/audit, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif kepada unit – unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan dan RUPS;
2. Melakukan analisis dan evaluasi dari efektifitas sistem pengendalian intern pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pada perusahaan serta memberikan saran perbaikan yang efektif.

2.3. Persyaratan Auditor Eksternal

1. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang – undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
6. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan / atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang– ndangan atau penetapan / putusan pengadilan;
7. Memahami prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahilan, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

2.4. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Internal Audit

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

2.5. Wewenang Unit Internal Audit

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan / atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan / atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan / atau Komite Audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.

BAB III STANDAR AUDIT / NORMA PEMERIKSAAN

3.1. Umum

Standar Audit merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja Auditor dan hasil auditnya dalam pelaksanaan tugas. Standar Audit sangat menekankan tidak hanya terhadap pentingnya loyalitas professional Auditor tetapi juga terhadap bagaimana Auditor mengambil pertimbangan dan keputusan waktu melakukan Audit dan Pelaporan.

Hasil Audit yang memenuhi standar sangat membantu pelaksanaan tugas Manajemen unit kerja

yang diaudit, maupun untuk Audit Eksternal. Standar Audit ini merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Unit Audit Internal (UAI) yang mencakup persyaratan mengenai:

- Profesionalitas Auditor dan Unit Audit Internal;
- Lingkup kerja Audit;
- Pelaksanaan dan Pelaporan Audit;
- Pengelolaan Unit Audit Internal

3.2. Persyaratan Profesionalisme Auditor

3.2.1. Standar Indepensi

Dalam melaksanakan tugasnya Auditor Internal bekerja secara bebas dan obyektif, tidak memihak dan tanpa prasangka. Konsep independensi merupakan hal yang fundamental. Auditor internal tidak dapat bertahan apabila Unit Audit Internal (UAI) tidak obyektif (Yusuf, 2014; Kumaat, 2010).

Untuk dapat melakukan hal ini, maka Unit Audit Internal (UAI) dan Auditornya haruslah :

1. Unit Audit Internal (UAI) berada langsung dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Semua jajaran dalam perusahaan dan unit kerja lainnya berkewajiban untuk bekerja sama dengan Unit Audit Internal (UAI), sehingga memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab Audit;
2. Bersikap Independen yaitu dapat melaksanakan tugas Audit dengan bebas, baik secara Organisatoris maupun secara pribadi terhadap Auditee dan organisasinya. Dengan demikian dapat memberikan pendapat penting yang tidak memihak dan tidak berprasangka dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil audit;
3. Bersikap Obyektif yaitu jujur terhadap diri sendiri serta yakin bahwa hasil kerjanya dapat diandalkan,

dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak – pihak lain. Untuk itu tidak boleh mengesampingkan pertimbangan – pertimbangan obyektif yang ditemui dalam tugas Auditnya;

4. Menjaga Integritas yaitu tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal-hal lain yang patut diduga dapat disalahgunakan baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lain yang tidak berhak.

3.2.2. Standar Keahlian

Audit Internal haruslah dilaksanakan oleh Auditor Internal yang baik secara individu ataupun secara kolektif dan mempunyai kecakapan profesional yang memadai dan kecermatan yang seksama untuk bidang tugasnya. Tanggung jawab Unit Audit Internal (UAI) untuk memenuhi standar kecakapan profesionalisme dengan mempertimbangkan penugasan tenaga Auditor Internal yang memenuhi syarat tuntutan tugas baik dari segi pendidikan, kemampuan teknis, luas cakupan dan kompleksitas tugas Audit tersebut. Pemenuhan kebutuhan tenaga yang mempunyai kecakapan sesuai dengan variasi bidang kerja dan disiplin ilmu yang menjadi tugas dari Unit Audit Internal (UAI), bila perlu dapat dilaksanakan melalui tenaga ahli dari luar.

Dalam pelaksanaan audit harus ada supervisi dan dilaksanakan oleh Auditor yang berpengalaman dan ahli sehingga terlaksana supervisi yang baik mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan audit, pelaporan audit dan monitoring tindak lanjut hasil Audit.

Tanggung jawab Auditor Internal meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap Standar Audit dan Kode Etik Internal Audit;

2. Penguasaan atas pengetahuan (teori) dan kecakapan (praktek) disiplin ilmu tertentu yang berkaitan dengan tugas auditnya;
3. Meningkatkan kemampuan komunikasi lisan dan tertulis sehingga dapat berkomunikasi secara efektif dengan Auditee dan Manajemen Perusahaan;
4. Memelihara kemempuan teknis Auditnya melalui Diklat sehingga tetap mengikuti perkembangan standar, prosedur, dan teknik Audit perusahaan, termasuk perkembangan dunia;
5. Menjaga dan meningkatan kemampuan profesionalismenya dengan memperhatikan cakupan kerja Audit, Materialitas/ signifikansi permasalahan, standar operasi yang dapat diterima / dipatuhi pelaksanaannya, tingkat kehandalan dan efektifitas pengendalian sistem operasi yang ada, biaya audit dibandingkan potensi manfaat yang diperoleh, serta menjaga kecermatan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

3.2.3. Persyaratan Lingkup Kerja Audit Internal

1. Lingkup Kerja Audit harus meliputi pengujian dan penilaian sebagai berikut :
   a. Bidang keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang undangan;
   b. Kehandalan dan efektifitas sistem pengendalian internal perusahaan dan kegiatan operasinya.
2. Kegiatan tinjauan dalam Audit sistem pengendalian internal mempunyai tujuan sebagai berikut ‘:
   a. Audit kehandalan sistem pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dipakai mampu untuk mencapai sasaran perusahaan secara efisien dan ekonomis;

b. Audit efektifitas sistem pengendalian internal bertujuan memastikan bahwa sistem dapat berjalan sebagai mana mestinya sehingga kekeliruan material, penyimpangan maupun perbuatan melawan hukum dapat dicegah atau dideteksi dan diperbaiki secara dini;
c. Audit terhadap kualitas kinerja pelaksanaan tugas pengendalian intern bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan optimal

3. Pelaksanaan Audit Internal harus memastikan terdapatnya :
   a. Kehandalan dan kebenaran informasi keuangan operasi perusahaan. Auditor Internal harus memeriksa cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengukur dan melaporkan informasi-informasi tersebut, sehingga kehandalan dan kebenarannya dapat dipastikan. Untuk itu penyajian laporan keuangan dan operasi perusahann harus diuji apakah telah akurat, handal, tepat waktu, lengkap mengandung informasi yang bermanfaat serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.;
   b. Kepatuhan terhadap kebijakan, Prosedur dan peraturan perundang-undangan. Untuk itu auditor internal harus memeriksa dan meninjau apakah sistem yang digunakan telah cukup memadai dan efektif dalam menilai apakah aktifitas yang diaudit memang telah memenuhi ketentuan yang dimaksud.;
   c. Keamanan asset perusahaan, termasuk memeriksa keberadaan asset tersebut sesuai dengan prosedur yang benar;
   d. Efisiensi pemakaian sumber daya perusahaan.

3.3. Persyaratan Pelaksanaan dan Pelaporan Audit Internal

Pelaksanaan Audit Internal harus meliputi perencanaan audit, pelaksanaan audit, evaluasi temuan dan informasi, pengkomunikasian hasil audit, rekomendasi tindak lanjut dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.

3.3.1. Rencana Kerja

1. Unit Audit Internal (UAI) menyusun rencana kerja satu tahunan;
2. Rencana kerja pemeriksaan dibuat berdasarkan perencanaan yang berbasis resiko (risk based plan) dan skala prioritas serta konsisten dengan tujuan perusahaan;
3. Rencana kerja tahunan wajib mencantumkan jadwal rencana pemeriksaan terhadap seluruh unit-unit kerja di perusahaan. Jadwal pemeriksaan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan namun harus ada persetujuan manajemen;
4. Rencana kerja jangka panjang dan tahunan wajib disetujui direksi.

3.3.2. Prosedur Pemeriksaan

1. Unit Audit Internal (UAI) membuat suatu penilaian risiko pekerjaan atas masing-masing unit kerja di perusahaan;
2. Beberapa faktor risiko yang harus dipertimbangkan dalam unit kerja yang akan diperiksa adalah :
   a. Kondisi ekonomi dan finansial secara umum;
   b. Perubahan kebijakan pemerintah;
   c. Suasana yang berhubungan dengan Etika dan tekanan yang ada dihadapi manajemen atau unit kerja;
   d. Kompetensi, keahlian dan integritas pegawai;
   e. Ukuran aktiva dan likuiditas atau volume transaksi
   f. Tingkat persaingan usaha;

g. Perubahan perilaku konsumen;
h. Aktivitas rekanan;
i. Tingkat komputerisasi sistem informasi
j. Penyebaran operasi perubahan secara geografis;
k. Kecukupan dan keefektifan pengendalian manajemen;
l. Perubahan organisasi, operasi dan teknologi.

3. Kertas Kerja Pemeriksaan

   Unit Audit Internal (UAI) membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang baku dan standar namun bentuk dan isinya disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan terhadap masingmasing unit kerja perusahaan. Setiap KKP diberi nomor yang menunjukkan identitas dari unit kerja yang diperiksa

4. Pemeriksaan
   a. Pemeriksaan dilaksanakan dengan menggunakan KKP;
   b. Untuk pemeriksaan khusus dapat dan dapat tidak menggunakan KKP;
   c. Waktu pemeriksaan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
   a. LHP dibuat dalam bentuk surat tertulis dan ditanda-tangani bersama oleh pemeriksa dan pimpinan unit kerja yang diperiksa;
   b. Kesimpulan yang dituangkan dalam LHP harus sudah didiskusikan dengan unit kerja yang diperiksa;
   c. Laporan harus Obyektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu;
   d. Laporan harus mengemukakan tentang tujuan, ruang lingkup dan hasil pemeriksaan dan jika perlu pemeriksa dapat memberikan pendapatnya;

e. Laporan harus mengemukakan saran dan rekomendasi untuk perbaikan dan koreksi serta pemberitahuan terdapatnya pelaksanaan yang memuaskan;
f. Laporan dapat mencantumkan tanggapan dari unit kerja yang diperiksa terhadap kesimpulan, saran dan rekomendasi;
g. Pimpinan unit pemeriksa internal harus mereview dan mengesahkan LHP akhir sebelum diterbitkan dan memutuskan kepada pihak mana saja laporan tersebut akan disampaikan;
h. Laporan disampaikan kepada yang berhak;
i. Bila perlu, KKP dapat dilampirkan dalam laporan;

6. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

   Unit Audit Internal (UAI) memonitor LHP Dengan cara :

   a. Memberikan batas waktu untuk melaksanakan perbaikan dan koreksi;
   b. Melakukan evaluasi terhadap laporan tindakan perbaikan dan koreksi yang dilakukan unit kerja;
   c. Bila dianggap perlu, dilaksanakan pengujian terhadap tindakan perbaikan dan koreksi yang dilakukan oleh unit kerja;
   d. Terhadap tindakan perbaikan dan koreksi yang kurang memuaskan agar dilaporkan kepada Direksi dari unit kerja yang bersangkutan termasuk risiko yang masih ada untuk memberikan tindakan tambahan sehingga tindakan perbaikan dan koreksi menjadi memuaskan.

BAB IV KODE ETIK

4.1. Umum

Hasil Kerja Unit Audit Internal (UAI) sangat ditentukan oleh hasil kerja Auditor Internal. Hasil kerja ini sangat

bermanfaat bagi Unit Audit Internal (UAI) dan terutama bagi perusahaan, bila pemakai jasa atau pelanggan Unit Audit Internal (UAI) yakin, tahu dan merasakan bahwa pelaksanaan Audit Internal memang memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Untuk keperluan ini maka perlu disyaratkan suatu kode etik yang mengatur perilaku dan kepatuhan para Auditor Internal lebih dari tuntunan perundang-undangan. Kode etik ini mengatur Prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing Auditor. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan yang bersangkutan mendapat peringatan bahkan diberhentikan dari tugas Audit atau peusahaan.

4.2. Standar Perilaku Auditor Internal

Auditor Internal harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik berikut ini, yaitu :

1. Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugas;
2. Memiliki Integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, perusahaan dan Unit audit Internal (UAI);
3. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi Auditor Internal atau perusahaan;
4. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban secara obyektif;
5. Tidak menerima imbalan dan atau suap dari pihak manapun yang terkait dengan temuan;
6. Mematuhi sepenuhnya kebijakan perusahaan dan peraturan perundangan;
7. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat Auditor Internal;
8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat

menimbulkan kerugian bagi perusahaan dengan alasan apapun;

9. Melaporkan semua hasil audit material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan perusahaan dan atau dapat melanggar hukum.

BAB V PENUTUP

Demikianlah panduan pelaksanaan Audit Internal ini disusun dan harus dilaksanakan oleh seluruh Auditor Internal dengan penuh rasa tanggung jawab.

Masa berlaku dan evaluasi :

1. Piagam Audit Internal berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan;
2. Piagam Audit Internal ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku;
3. Evaluasi kinerja Audit Internal dilakukan setiap tahun.

Sumber : *https://www.erajaya.com/*

9.2. Pedoman Internal Audit (IA) PT Bank Danamon Indonesia Tbk

	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk SATUAN KERJA AUDIT INTERN - TERINTEGRASI (SKAIT) Integrated Internal Audit Working Unit	
Versi: 2019	PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI (INTEGRA TED INTERNAL AUDIT CHARTER)	Hal.

I. Pendahuluan Peraturan dan perundang-undangan dan ketentuan terkait dengan fungsi internal audit antara lain, namun tidak terbatas pada: • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 /POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJ K. 03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. • Peratu ran Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Intern.	I. Ntroduction Laws and regulations and the provision in relation to the function of internal audit include, but not limited to: • Indonesia's Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019, concerning Practice of The Internal Audit Function for Commercial Banks. • Indonesia's Financial Services Authority Regulation No.38/POJK.03/2016, concerning Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks. • Indonesia's Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2014, concerning Implementation of Integrated Corporate Governance for Financial Conglomeration. • Indonesia's Financial Services Authority Regulation

Danamon	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk SATUAN KERJA AUDIT INTERN - TERINTEGRASI (SKAIT) Integrated Internal Audit Working Unit	
Versi: 2019	PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI (INTEGRA TED INTERNAL AUDIT CHARTER)	Hal.

- Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Danamon Grup yang berlaku.
- International Professional Practices Framework (IPPF), sebagai Standar
- Internasional untuk Praktek Profesional Audit Intern yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (I IA).
- Kode Etik Perusahaan yang berlaku

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) dan Perusahaan Anak sebagai Konglomerasi Keuangan Danamon Group diharuskan menerapkan tata kelola secara terintegrasi dan berkewajiban membentuk Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) yang independen dari satuan kerja operasional (risk-taking unit) pada Danamon sebagai Entitas Utama.

Pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh SKAIT yang telah ada dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, profesional, dan kewajaran.

No.55/POJK.03/2016, concerning Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.

- Indonesia's Financial Services Authority Regulation No.56/POJK.04/2015 concerning Establishment and Development Guidance of Internal Audit Charter.
- Prevailing Integrated Corporate Governance Policy of Danamon Group Financial Conglomeration (Danamon and Subsidiaries).
- International Professional Practices Framework (IPPF), as International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing from The Institute of Internal Auditors (IIA).
- Prevailing Company's Code of Ethics.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) and its Subsidiaries as Danamon Group Financial Conglomeration are required to implement an integrated corporate governance and

Dengan demikian Audit Intern (Al) Danamon Tbk disebut sebagai Satuan Kerja Audit Intern — Terintegrasi (SKAIT), dan Kepala SKAI Bank Danamon sekaligus menjadi Kepala SKAIT.

Dalam struktur Konglomerasi Keuangan Group Danamon, terdapat SKAI Entitas Utama sebagai SKAIT dan SKAI Entitas Anggota Konglomerasi Keuangan (Perusahaan Anak), yaitu:

- SKAI PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
- SKAI PT Asuransi Adira Dinamika

Untuk mendukung pelaksanaan audit intern terintegrasi, SKAIT menyusun Piagam Audit Intern Terintegrasi sebagai pedoman utama tata kelola secara terintegrasi yang harus dipatuhi oleh semua Unit Audit Intern dalam Danamon Grup.

Piagam Audit Intern Terintegrasi mengatur keberadaan dan fungsi SKAIT yang mencakup antara lain visi, misi, tujuan, wewenang, ruang lingkup, dan hubungan dengan Komite Audit dan pihak internal/eksternal di perusahaan.

Piagam Audit Intern Terintegrasi ini disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait, sehingga tercapai pemahaman

establish an Integrated Internal Audit Unit (IIAU) which is independent from operating units (risk-taking unit) at Danamon as the Main Entity.

The duties of the integrated internal audit carried out by existing IIAU based on the principles of good corporate governance such as transparent, accountability, responsibility, independency, professionalism, and fairness.

Therefore Internal Audit (IA) of Bank Danamon Tbk referred as Integrated Internal Audit Unit (IIAU) and Chief of Internal Audit (CIA) of Bank Danamon is also Chief of IIAU.

In the Danamon Group's financial conglomeration structure, IIAU is the main Internal Audit (IA) Entity and Subsidiaries as the IA Member Entities, as follow:

- IA PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
- IA PT Asuransi Adira Dinamika

yang sama serta kerja sama yang baik dalam mewujudkan sasaran dan tujuan SKAIT dalam rangka Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan	To support the implementation of integrated internal audit, IIAU developed Integrated Internal Audit Charter as the main guideline for integrated governance implementation that must be followed by all Internal Audit Unit within Danamon Group. The Integrated Internal Audit Charter governs the existence and functions of IIAU which include the vision, mission, objectives, authorities, scope, and relationship with the Audit Committee and internal/external parties. This Integrated Internal Audit Charter is socialized to related parties, in order to achieve a common understanding and good collaboration in achieving the goals and objectives of Integrated Internal Audit as part of Integrated Governance of the Financial Conglomeration.
II. Visi	II. Vision Statement

<table>
<tr><td>  </td><td colspan="3">PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

SATUAN KERJA AUDIT INTERN - TERINTEGRASI (SKAIT) Integrated Internal Audit Working Unit</td></tr>
<tr><td>Versi: 2019</td><td colspan="2">PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI (INTEGRA TED INTERNAL AUDIT CHARTER)</td><td>Hal.</td></tr>
<tr><td colspan="2">SKAIT bertekad menjadi fungsi Audit Intern terbaik pada industri keuangan di Indonesia yang terdiri dari para profesional audit intern yang berkualitas dan berpengalaman. SKAIT bertekad untuk memberikan kepemimpinan dalam memperkuat lingkungan pengendalian serta membantu terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.</td><td colspan="2">IIAU aims to be the best Internal Audit function in the financial services industry in Indonesia, consist of qualified and experienced internal audit professionals. IIAU seeks to provide leadership in strengthening the control environment and to achieve implementation of good corporate governance.</td></tr>
<tr><td colspan="2">III. Misi

Misi SKAIT adalah memberikan keyakinan yang independen dan objektif dalam melakukan kegiatan assurance, serta memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk memaksimalkan dan menjaga nilai pemegang saham.
SKAIT akan menjadi business partner yang memberikan nilai tambah dalam mendorong budaya kontrol yang kuat agar Konglomerasi Keuangan Danamon Group dapat mencapai tujuan-tujuan jangka panjang.</td><td colspan="2">III.Mission Statement

The mission of IIAU is to provide independent and objective in assurance activities, as well as consulting services to Board of Commissioners and Board of Directors to maximize and sustain shareholder value.

IIAU will act as a business partner that provides added value in fostering a robust control culture to enable Danamon Group Financial Conglomeration achieve its long term business objectives.</td></tr>
</table>

Danamon	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk SATUAN KERJA AUDIT INTERN - TERINTEGRASI (SKAIT) Integrated Internal Audit Working Unit	
Versi: 2019	PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI (INTEGRA TED INTERNAL AUDIT CHARTER)	Hal.

IV. Tujuan a. Membantu memperbaiki dan memperkuat lingkungan pengendalian. b. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. c. Memberikan pandangan yang independen kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit terhadap kecukupan pengendalian internal dan mengevaluasi kepatuhan terhadap proses, kebijakan, dan prosedur utama dengan peraturan eksternal yang berlaku. d. Menyediakan jasa konsultasi yang memberikan nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasional Danamon dan Perusahaan Anak. e. Membantu Manajemen Danamon dan Perusahaan Anak dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas dari	IV. Objectives a. To assist in improving and strengthening the control environment. b. To assist the Chief Executive Officer (CEO) and the Board of Commissioners in their supervisory tasks by providing an elaboration of the operationally aspects of audit planning, implementation, and monitoring of the audit results. c. To provide an independent view to Board of Commissioners and Board of Directors via Audit Committee regarding the sufficiency of internal controls and to evaluate the compliance of key processes, policies, and procedures with prevailing external regulations. d. To provide consulting services that adds value and improves operational activities of Danamon and its Subsidiaries. e. To assist Management of Danamon and its Subsidiaries in accomplishing its

manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Dalam melaksanakan fungsinya, SKAIT akan bekerja sama dengan Unit Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Unit Hukum, Unit Pengendalian Keuangan, dan unit-unit lainnya dalam upaya memberikan kepastian atas proses-proses kunci, risiko, dan pengendalian.	objectives by bringing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes. To achieve its objectives, IIAU will work closely with Integrated Risk Management, Integrated Compliance Unit, Legal, Financial Control, and other units in providing assurance over key processes, risks, and controls.
V. Independensi Untuk menjaga independensi SKAIT dalam melaksanakan tugasnya: a. SKAIT bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi SKAIT dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, Kepala SKAI juga menyampaikan laporan ke Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Kepatuhan. b. Manajemen Danamon dan Perusahaan Anak akan memberikan dukungan secara	V. Independency To ensure independence of IIAU in executing its duties: a. IIAU should report directly to the CEO. To ensure IIAU independency, seamless audit process, and authority in monitoring audit follow up, Chief IIAU (Chief Internal Auditor) should provide report to the CEO, BOC, Audit Committee, and Compliance Director.

penuh kepada SKAIT untuk bekerja secara independen tanpa pengaruh benturan kepentingan dalam bentuk apapun.

c. Rotasi berkala penugasan pekerjaan Auditor diberlakukan dalam SKAIT mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.03/2019.

d. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian tersebut harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Management of Danamon and its Subsidiaries will provide full support to IIAU to work independently without any influence in any form.

c. Periodic rotation of audit assignment among Auditors is required within IIAU in reference to Indonesia's Financial Services Authority Regulation No 1/POJK.03/2019.

d. Chief Internal Auditor is appointed and dismissed by the CEO with the approval from the Board of Commissioners by considering the recommendations of the Audit Committee. The appointment and dismissal should be reported to Indonesia's Financial Services Authority (OJK) in accordance to the prevailing regulation.

Danamon	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk SATUAN KERJA AUDIT INTERN - TERINTEGRASI (SKAIT) Integrated Internal Audit Working Unit	
Versi: 2019	PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI (INTEGRA TED INTERNAL AUDIT CHARTER)	Hal.

VI. Pertanggungjawaban	VI. Accountability
Dalam menjalankan tugasnya, Kepala SKAIT bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dengan: a. Memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal di Danamon dan Perusahaan Anak untuk proses pengendalian kegiatan dan mengelola risiko. b. Melaporkan isu—isu signifikan yang berhubungan dengan proses pengendalian di Danamon dan Perusahaan Anak termasuk potensi perbaikan atas proses tersebut, serta tindak lanjut melalui resolusi. c. Memberikan informasi secara periodik atas hasil status sesuai dengan perencanaan tahunan. Berkoordinasi dengan fungsi pengendalian dan pemantauan lainnya (Unit Satuan Kerja Manajemen Risiko, Unit Hukum & Unit Satuan Kerja Kepatuhan, Auditor Eksternal) untuk	The Chief Internal Auditor, in fulfilling his/her duties, shall be accountable structurally to the CEO and be accountable functionally to the Board of Commissioners via Audit Committee to: a. Assess the adequacy and effectiveness of internal control systems at Danamon and its Subsidiaries for the process of controlling activities and managing risks. b. Report significant issues related with control processes of Danamon and its Subsidiaries, including potential improvements to those processes, and the follow-up through resolution. c. Provide information on the status results as per the annual audit plan.

memberikan cakupan audit yang komprehensif dan terintegrasi.	Coordinate with other control and monitoring functions (Risk Management, Legal, Compliance, and External Auditor) to provide comprehensive and integrated audit coverage.
VII. Ruang Lingkup Entitas yang menjadi ruang lingkup adalah seluruh entitas di PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Perusahaan Anak, seperti PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan PT Asuransi Adira Dinamika dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku bagi perusahaan anak. Ruang lingkup kerja harus mencakup semua aktivitas, fungsi, catatan, dan properti dari Danamon dan Perusahaan Anak, untuk menentukan apakah manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Danamon dan Perusahaan Anak yang dirancang dan diimplementasikan oleh Manajemen sudah efektif dan memadai. Hal ini untuk memastikan: a. Risiko telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat. b. Interaksi dengan berbagai grup tata kelola jika diperlukan. c. Informasi keuangan, manajerial, dan operasional	VII. Scope of Work The scope of work includes all entities in PT Bank Danamon Indonesia Tbk and Subsidiaries, such as PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk and PT Asuransi Adira Dinamika with due regard to the regulations that apply to subsidiaries. The scope of work should include all activities, functions, records, and property of Danamon and its Subsidiaries, to determine whether Danamon and its Subsidiaries risk management, control, and governance processes, as designed and implemented by management, is effective

yang signifikan disajikan dengan akurat, terpercaya, dan tepat waktu.

d. Tindakan karyawan sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, serta hukum dan peraturan yang berlaku.

e. Sumber daya yang dibutuhkan diperoleh dengan ekonomis, digunakan secara efisien dan dikelola dengan baik.

f. Program, rencana, dan sasaran tercapai.

g. Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan telah melekat di dalam proses pengendalian di Danamon dan Perusahaan Anak.

h. Isu legislatif atau isu peraturan yang berpengaruh secara signifikan pada Danamon dan Perusahaan Anak diketahui dan dirumuskan secara tepat.

Kesempatan untuk memperbaiki pengendalian manajemen, profitabilitas, dan reputasi Danamon dan Perusahaan Anak akan diidentifikasi dan diungkapkan dalam pemeriksaan

and adequate. It aims to ensure:

a. Risks are appropriately identified and managed.

b. Interaction with the various governance groups occurs as needed.

c. Significant financial, managerial, and operational information are accurate, reliable, and timely.

d. Employee's actions comply with policies, standards, procedures, and laws and regulations.

e. Resources are economically acquired, efficiently used, and adequately managed.

f. Programs, plans, and objectives are achieved.

g. Quality and continuous improvement are fostered in Danamon and its Subsidiaries.

	h. Significant legislative or regulatory issues impacting Danamon and its Subsidiaries are identified and addressed appropriately. Opportunities to improve Danamon's and its Subsidiaries' management controls, profitability, and reputation will be identified and raised in the audits
VIII. Kewenangan SKAIT Kewenangan diberikan kewenangan untuk: a. Memiliki akses tak terbatas ke semua aktivitas, fungsi, catatan, properti, dan personel dari Danamon dan Perusahaan Anak, dengan mematuhi ketentuan bank dan/atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kerahasiaan jabatan, dan hak-hak pribadi, serta menjamin penerapan prinsip anti-tipping off dalam melakukan audit Anti Pencucian Uang (APU)/Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).	Authority IIAU is authorized to: a. Have unrestricted access to all activities, functions, records, property, and personnel of Danamon and its Subsidiaries, by complying with bank regulation and/or the company in accordance with the prevailing laws and regulations, profession confidentiality and personal rights, and ensure the application of the principle of anti-tipping off principle in Anti-Money Laundering (AML)/Countering

b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Kom isaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
c. Mengalokasikan sumber daya, menetapkan frekuensi, memilih subjek, menentukan ruang lingkup pekerjaan, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
d. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personel di unit-unit Danamon dan Perusahaan Anak dimana audit dilaksanakan, termasuk jasa khusus lainnya dari dalam maupun luar Danamon dan Perusahaan Anak.
e. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
f. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

SKAIT dilarang untuk:

a. Melaksanakan tugas operasional Danamon dan Perusahaan Anak.
b. Menjalankan atau menyetujui transaksi akunting di luar wilayah kerja SKAIT.

Financing of Terrorism (CFT) audit.

b. Have direct communication with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee, as well as the Sharia Supervisory Board (SSB).
c. Allocate resources, set frequencies, select subjects, determine scope of work, and apply the techniques required to accomplish audit objectives.
d. Obtain the necessary assistance from personnel in units of Danamon and its Subsidiaries where audits are being performed, as well as other specialized services from internal and external Danamon and its Subsidiaries.
e. Hold regular and ad-hoc meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee, as well as the Sharia Supervisory Board.
f. Attend strategic meeting.

c. Mengarahkan kegiatan-kegiatan dari karyawan yang tidak dipekerjakan oleh SKAIT, kecuali karyawan tersebut telah ditugaskan sebagai tim pemeriksa atau diperbantukan di SKAIT.	IIAU is not authorized to: a. Perform any operational duties of Danamon and its Subsidiaries. b. Initiate or approve accounting transactions outside lIAU's scope. c. Direct activities of any employees outside IIAU, except the employee is assigned to audit team or seconded in IIAU.
IX. Tugas dan Tanggung Jawab **A. Tugas dan tanggung jawab SKAIT adalah:** a. Membuat rencana audit tahunan dengan metodologi berbasis risiko yang tepat, termasuk risiko dan pengendalian yang diidentifikasi oleh Manajemen, dan menyerahkan rencana tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dievaluasi dan disetujui setiap tahun. b. Mengimplementasikan rencana audit tahunan yang telah disetujui, baik rencana audit	**IX. Duties and Responsibilities** **A. Duties and responsibilities of IIAU:** a. Develop an annual audit plan using an appropriate risk-based methodology, including risks or controls identified by Management, and annually submit the annual plan to the CEO and the Board of Commissioners via Audit Committee for review and approval.

secara individual maupun audit terintegrasi, termasuk tugas khusus atau proyek yang diminta oleh Manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. c. Meninjau dan memberikan rekomendasi terhadap rencana audit tahunan dari SKAI Perusahaan Anak. d. Menjaga kecukupan jumlah staf audit dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan sertifikasi profesional yang memadai untuk melaksanakan persyaratan audit, termasuk memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangundangan terkait lainnya. e. Meninjau aturan/prosedur/manual audit intern, dan memastikan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk International Standards for the Professional Practices of Internal Auditing from the Institute of Internal Auditors (IPPF/IIA), serta selaras dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	b. Implement the approved annual audit plan, both individual and integrated audit, including special tasks or projects requested by Management and the Board of Commissioners via Audit Committee. c. Review and provide recommendation on the annual audit plan of Subsidiaries' IA. d. Maintain adequate numbers of audit staffs with sufficient knowledge, skills, experience, and professional certifications to carry out the audit requirements, including knowledge of regulations of capital market and other related regulations. e. Review internal audit policy/ procedures/ manual, and ensure compliance with applicable rules and regulations including International Standards for the Professional Practices of Internal Auditing from the Institute of Internal Auditors (IPPF/IIA), and aligned with Bank Indonesia Regulations and Indonesia's Financial Services Authority

tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

f. Memantau dan meninjau pelaksanaan audit intern dalam SKAI Perusahaan Anak.

g. Mengevaluasi dan menilai penggabungan (merger)/konsolidasi yang signifikan serta produk & jasa, proses, operasi, dan proses pengendalian yang baru/direvisi, yang berkaitan dengan pengembangan, implementasi dan/atau ekspansi masingmasing sebagaimana dan jika diperlukan.

h. Membuat laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu:
   - Laporan semester pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern yang dilaporkan paling lambat satu (1) bulan setelah bulan pelaporan Juni dan Desember, ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit.
   - Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, paling lambat tiga (3) hari kerja sejak temuan audit diketahui. Laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit.

Regulation (OJK) regarding Practice of the Internal Audit Function for Commercial Bank.

f. Monitor and review the implementation of internal audit in Subsidiaries' IA.

g. Evaluate and assess significant merger/consolidation as well as new/revised products & services, processes, operations, and control processes coincide with their development, implementation and/or expansion as required.

h. Report to Indonesia's Financial Services Authority (OJK) i.e.:
   - Semi-annual reports are submitted at the latest one (1) month after the reporting month June and December. The report should be signed by the CEO and the Independent Commissioner appointed as Chairman of Audit Committee.
   - A special report on each audit issue deemed to disrupt the continuity of the bank, shall be delivered not

▪ Laporan hasil tinjauan pihak eksternal yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga (3) tahun, mengenai kinerja SKAIT dan kepatuhannya terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum serta perbaikan yang mungkin dilakukan, harus disampaikan selambat-lambatnya dua (2) bulan setelah periode pengkajian berakhir. Laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. ▪ Laporan hasil audit Teknologi Informasi yang wajib disampaikan selambatlambatnya dua (2) bulan setelah audit selesai dilakukan. i. Bank wajib melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Komunikasi sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh Kepala SKAIT dan paling sedikit membahas: • area berisiko yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan SKAI; • pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank; • pemantauan tindak lanjut Bank atas kelemahan yang teridentifikasi;	later than three (3) business days after the issue has been informed. The report should be signed by the CEO and the Independent Commissioner appointed as Chairman of Audit Committee. • Report from the external assessment which was performed at least once every three (3) years, regarding IIAU performance and its compliance with Indonesia's Financial Service Authority (OJK) Regulation regarding practice of the Internal Audit Function in Commercial Bank and as well as possible remedial measures, shall be delivered no later than two (2) months after the assessment period ended. The report should be signed by the CEO and President Commissioner. • Reports of Information Technology audit which must be submitted no

- temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan; dan
- rencana audit tahunan.

j. Menyampaikan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah dan juga untuk menetapkan paling sedikit satu (1) orang anggota SKAIT yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

k. Menginformasikan semua temuan audit yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan setiap bulan.

l. Menetapkan proses tindak lanjut untuk memonitor dan memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan manajemen secara efektif dan efisien, atau Manajemen Senior telah menerima risiko yang belum dapat dimitigasi.

m. Melakukan pertemuan rutin dengan SKAI entitas Perusahaan Anak sekurangkurangnya setiap kuartal.

n. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi secara berkala kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit serta Direktur Kepatuhan.

o. Menginformasikan status tindakan perbaikan atas rekomendasi audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite

later than two (2) months after the audit.

i. Bank is required to communicate with the Indonesia Financial Services Authority (OJK) at least once in 1 (one) year. Communication as intended is carried out by the Chief Internal Auditor and at least discusses:
   - risk areas identified by the Financial Services Authority and SKAI;
   - understanding of risk mitigation actions carried out by the Bank;
   - monitoring the Bank's follow-up on identified weaknesses;
   - findings and recommendations from the implementation of internal audits in the current year; and
   - annual audit plan.

j. Convey compliance of sharia principles to Sharia Supervisory Boards and appoint at least one (1) Integrated Internal Audit Unit (IIAU) member who has knowledge and/or

Audit setiap bulan (Status Tindak Lanjut Temuan Audit).

p. Melakukan investigasi terhadap dugaan adanya kegiatan kecurangan (fraud) di dalam Bank termasuk melakukan koordinasi tindakan investigasi dengan unit kerja lain.

q. Melaporkan hasil investigasi yang material dan berdampak luas kepada Manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

r. Mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan auditor eksternal dan regulator secara memadai, dengan tujuan memberikan ruang lingkup pemeriksaan yang optimal dengan biaya yang wajar.

s. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukan.

t. Tanggung jawab SKAI untuk menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak.

A. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI Perusahaan Anak

a. Menyampaikan kepada SKAIT rencana audit tahunan yang telah ditinjau dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang dari Perusahaan Anak, dan melaporkan apabila terdapat perubahan pada tahun pelaksanaan.

b. Melaporkan kepada SKAIT pelaksanaan audit intern yang telah dilakukan oleh Perusahaan

understanding of sharia banking operations.

k. Inform all significant audit issues to the CEO and Board of Commissioners copied to Audit Committee and Compliance Director on monthly basis.

l. Establish a follow up process to monitor and ensure that management actions have been effectively and efficiently implemented, or that Senior Management have accepted the risk not yet mitigated.

m. Conduct regular coordination meetings with the Subsidiaries' IA at least every quarter.

n. Submit the periodic integrated internal audit report to CEO, Board of Commissioners via Audit Committee, and Compliance Director.

o. Inform status of corrective actions based on the audit recommendations to the CEO and Board of Commissioner via Audit

Anak sekurang-kurangnya setiap kuartal.

c. Melaporkan kepada SKAIT atas pelaksanaan pengawasan tindak lanjut temuan yang telah dilakukan oleh SKAI Perusahaan Anak sekurang-kurangnya setiap kuartal.

d. Melaporkan hasil kaji ulang kendali mutu internal yang dilakukan oleh bagian Quality Assurance — SKAI Perusahaan Anak, sekurang-kurangnya setiap semester kepada SKAIT.

Committee on monthly basis (Follow-up Status on Audit Findings).

p. Perform the investigation of suspected fraudulent activities in the Bank include coordinating investigation with other units.

q. Report the result of significant and widely impact investigation to management and Board of Commissioners via Audit Committee.

r. Consider the scope of work of the external auditors and regulators as appropriate, aimed at providing optimal audits at a reasonable cost.

s. Develop program to evaluate the quality of internal audit activities that have been performed.

t. Responsibility of IIAU to determine the strategy for implementing subsidiaries' internal audit.

B . Duties and Responsibilities of Subsidiaries' IA

d. Provide the annual audit plan to IIAU that has been

	reviewed and approved by the respective authorities of the Subsidiaries, and inform any changes in the implementation. e. Submit the realization of internal audits implementation by the Subsidiaries at least every quarter to the IIAU. c. Report monitoring status of corrective actions performed by Subsidiaries to the IIAU, at the minimum, on a quarterly basis. d. Report the quality assurance review results performed by the Quality Assurance - Internal Audit of Subsidiaries at least every semester to the IIAU.
X. Kode Etik Auditor SKAIT akan mematuhi kode etik auditor internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) dan Danamon sebagai berikut:	**X. Auditor Code of Ethics** Integrated Intenal Audit Unit will obey the internal auditor's code of ethics referring to code of ethics established by The Institute of Internal Auditors (IIA) and Danamon as follows:

a. Mematuhi Kode Etik PT Bank Danamon Indonesia dan Perusahaan Anak.

b. Mematuhi standar profesi auditor yang ditetapkan di dalam International Professional Practice Framework (IPPF), yang meliputi prinsip integritas, objektivitas, kerahasian, dan kompetensi, dengan rincian sebagai berikut:
   - Bekerja secara jujur, santun, tidak tercela, objektif, independen, berdedikasi tinggi, dan bertanggung jawab.
   - Mengutamakan profesionalisme serta menjalankan peraturan, regulasi, dan standar dalam pelaksanaan tugas audit.
   - Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum dan menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan PT Bank Danamon Indonesia maupun Perusahaan Anak, serta tidak terlibat dalam tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi internal audit, SKAIT maupun PT Bank Danamon Indonesia dan Perusahaan Anak.
   - Menghargai dan berkontribusi pada tujuan sah dan etis dari PT Bank Danamon Indonesia dan Perusahaan Anak.
   - Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat menghalangi penilaian

a. Comply with code of ethics of PT Bank Danamon Indonesia and its Subsidiaries.

b. Comply with the auditor's professional standard in International Professional Practice Framework (IPPF), include principles of integrity, objectivity, confidentiality, and competency, with details as follow:
   - Perform work with honesty, courtesy, impeccability, objectivity, independence, dedication, and responsibility.
   - Uphold professionalism and observe the applicable rules, regulations, and standards in execution of audit engagements.
   - Does not knowingly be a part of any illegal activities and steer clear of activities that conflict with interests of Bank Danamon and its Subsidiaries, or does not engage in acts that are discreditable to the profession of internal audit, IIAU or PT Bank

auditor intern yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan ata u hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan PT Bank Danamon Indonesia dan Perusahaan Anak. • Tidak berpartisipasi dalam kegiatan apapun dengan para pihak yang mempunyai hubungan keluarga/ perkawinan yang dapat memengaruhi ata u dianggap memengaruhi objektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai auditor. • Tidak menerima fee atau pemberian dalam bentuk apapun dari auditee, rekanan maupun pihak lainnya yang dapat memengaruhi atau dianggap memengaruhi objektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai auditor. • Mengungkapkan seluruh fakta yang diketahui, yang jika tidak disampaikan, dapat menyimpang/memengaruhi laporan kegiatan yang ditinjau. • Mematuhi prinsip kerahasiaan atas seluruh informasi terkait PT Bank Danamon Indonesia dan Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.	Danamon Indonesia and its Subsidiaries. • Respect and contribute to the legitimate and ethical objectives of PT Bank Danamon Indonesia and its Subsidiaries. • Does not participate in any activities or relationship that may impair, or be presumed to impair internal audit's unbiased assessment. Include activities or relationships that may be in conflicting interest with PT Bank Danamon Indonesia and its Subsidiaries. • Does not participate in any activities with any parties with whom I have family relations/affinity who may influence or be deemed to affect internal audit objectivity of performing its roles and responsibilities.

• Tidak menggunakan informasi/hasil temuan yang berkaitan dengan PT Bank Danamon Indonesia dan Perusahaan Anak, baik untuk keuntungan pribadi maupun pihak lain yang tidak relevan atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan sah dan etis perusahaan. • Senantiasa meningkatkan dan mengimplementasikan pengetahuan, keahlian, serta pengalaman secara maksimal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja. • Melaksanakan jasa audit internal sesuai dengan "International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing"	• Does not accept any fees or gifts in any form from an auditee, partner or any other parties who may influence or be deemed to affect internal audit objectivity to perform its roles and responsibilities. • Disclose all facts known, if not disclosed accordingly, may distort the reporting of activities under review. • Comply with the confidentiality principle and policy of PT Bank Danamon Indonesia and its Subsidiaries, in accordance with the prevailing laws and regulations. • Does not use any information/findings related to PT Bank Danamon Indonesia and its Subsidiaries for any personal or other parties' gain, or in any manner that would be

	contrary to the law or detriment to the legitimate and ethical objectives of the organization. • Continuously improve and implement knowledge, expertise/skills, and experience to achieve work efficiency and effectiveness. • Perform internal audit services in accordance with the "International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing".
XI. Hubungan SKAIT dengan pihak-pihak Eksternal a. Hubungan kerja antara SKAIT dengan eksternal auditor harus diketahui dan disetujui terlebih dahulu oleh Komite Audit. b. Hubungan kerja antara IIAU dengan pihak eksternal lainnya dapat mencakup layanan audit yang membutuhkan keterampilan khusus yang bersifat sementara sesuai dengan peraturan, dan harus disetujui oleh Direktur Utama dan mempertimbangkan masukan dari pihak internal yang kompeten. c. SKAIT harus memberikan alasan dalam menggunakan pihak eksternal untuk melakukan layanan	**XI. Relationships IIAU with External Parties** a. Working relationship between IIAU and external auditor must be known and approved by the Audit Committee. b. Working relationship between IIAU with other external parties can cover audit services requiring special skills on temporary basis as per regulation, and must be approved by the CEO and consider the input from competent internal parties.

audit internal sehubungan dengan audit yang membutuhkan keterampilan khusus ke OJK. d. SKAI harus memastikan independensi pihak eksternal dalam menyediakan layanan audit internal	c. IIAU should provide reason for using external party to conduct internal audit services in relation to audit services requiring special skills, to OJK. d. IIAU should ensure independency of external party in providing internal audit services.
XII. Standar Pelaksanaan Audit SKAIT akan memenuhi PeraturanBank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kode Etik Perusahaan, serta mengacu kepada International Standards for the Professional Practices of Internal Auditing from The Institute of Internal Auditors (IPPF/IIA).	**XII. Standards of Audit Practice** IIAU will comply with Bank Indonesia Regulations, Indonesia's Financial Services Authority Regulations (OJK), and Company's, Code of Ethics as well as refer to the International Standards for the Professional Practices of Internal Auditing from The Institute of Internal Auditors (IPPF/IIA).
XIII. Penutup	**XIII. Closing** The Internal Audit Charter shall be reviewed

Piagam Audit Internal akan direview secara berkala, paling lambat setiap 2 tahun.	periodically, no later than every 2 years.

Jakarta, 25 Maret 2019
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Disetujui

Sng "ow Wah
Direktur Utama/CEO

Rita Mirasari
Direktur/Director

Made Sukada
Untuk dan atas nama Dewan Komisaris

For and on behalf of Board of Commissioners

Danamon	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk SATUAN KERJA AUDIT INTERN - TERINTEGRASI (SKAIT) Integrated Internal Audit Working Unit	
Versi: 2019	PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI (INTEGRA TED INTERNAL AUDIT CHARTER)	Hal.

Peter Benvamin Stok

Komisaris Independen/ Komisaris Independen

Independent Commissioner Independent Commiss

*****

BAB 10

RISET TENTANG AUDIT KECURANGAN (KORUPSI)

Fraud yang paling sering terjadi menurut *Association of Certifieid Fraud Examiner* (2016) adalah kasus kecurangan (*fraud)* pada perusahaan milik negara sehingga memungkinkan untuk mengkaji lebih dalam lagi masalah-masalah timbulnya kecurangan dan mengembangkan analisis terjadinya *fraud* dengan lebih komprehensif. Penelitian tentang model audit kecurangan dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kecurangan sebagai berikut.

"*Paper addresses a fundamental issue in financial regulation - that of the auditor's ability to detect material irregularities. If an auditor is to detect irregularities he/she must also be cognisant of fraud aetiology by drawing on such other disciplines as psychology, criminology and sociology. The paper first provides a critique of existing fraud aetiology models and then describes the ROP Fraud Risk-Assessment Model constructed by the author in a study of convicted serious fraud offenders in Australia. The main concern of the paper is with the eclectic fraud detection model (EFD), of which the ROP model is a component. The EFD model is aimed at enhancing the auditor's fraud detection ability, it has been constructed by the author and its utility successfully tested in Australia in a survey of auditors. Finally, the policy implications for auditors of the findings obtained are also considered"* (Krambia, 2002).

Model pendeteksian kecurangan dengan menggunakan *Election Fraud* model dengan menggunakan kemampuan

auditor dalam mendeteksi kecurangan. Peran auditor menjadi sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan, auditor dituntut memiliki keahlian, pengaalaman dan kacakapan dalam mendeteksi sejak dini kemungkinan terjadinya kecurangan. Riset di atas menggambarkan kecurangan *aetiology* seperti pelanggaran disiplin, *psychology*, kriminologi dan *sociology*. Sifat curang berawal dari niat menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain atau mengutamakan kepentingan pribadi, menyalahgunakan wewenang dan hal lain. Peran dan tanggung jawab auditor internal lebih pada fungsi mengurangi terjadinya kecurangan dan kesalahan sebelum laporan keuangan disajikan, pendeteksian kecurangan pada kepatuhan pada prosedur operasional yang telah ditentukan dan kepatuhan pada aturan-aturan yang terkait dengan transaksi ekonomi dan relevansinya dengan laporan keuangan.

Peneliti juga menemukan bahwa dengan menggunakan perhitungan rasio keuangan dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan. "*The main aim of this study is to analyse the financial ratio (i.e. financial leverage, profitability, asset composition, liquidity and capital turnover ratio) in detecting fraudulent financial reporting* (FFR)" (Zainuddin, 2016. Beberapa perhitungan rasio keuangan dapat digunakan dalam menganalisis dan mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Hal tersebut dapat dilakuakan oleh auditor sebagai alat deteksi.

Beberapa penelitian lainnya membahas tentang fraud dengan mengkaji sampai pada sistem akuntansi dan rendahnya internal control *"This paper introduces fraud as asset misappropriations (85 per cent of cases), corruption and fraudulent statements. Symptoms include accounting anomalies, lack of internal control environment, lifestyle and behaviour. The most effective tools for fraud detection are internal audit review, specific investigation by management, and whistle-blowing. The paper details the fraud investigation process and the role of auditors as fraud examiners. The correlation of fraud perpetrators' personality with the size of losses is examined.*

*Personality is analysed into age, gender, position, educational background and collusion. A strong system of internal control is most effective in fraud prevention. Fraud prevention procedures, targeted goals and improvements to system weaknesses feature in the paper. Fraud impacts on accounting transactions in accounts receivable, receipts and disbursements, accounts payable, inventories and fixed assets, and financial reporting. The monetary impact resulting from fraud is analysed by the type of victim and the amount of loss. Internal control and good employment practices prevent fraud and mitigate loss" (*Senthivelmuguran, 2004).

Riset tersebut menemukan bahwa korupsi dan kecurangan itu termasuk anomaly pada sistem akuntansi, *lifestyle*, perilaku, *lack internal control* serta lingkungan. Hal tersebut, membutuhkan investigasi khusus dari manajemen untuk mendeteksi kecurangan, melakukan tindakan *preventive* dan perbaikan sistem Internal *control* sebagai langkah *preventif* pencegahan terjadinya kecurangan dan ketidak patuhan terhadap prosedur yang ada. Satuan pengendalian internal akan berfungsi mulai dari membantu memperbaiki aturan dan standar operasional prosedur, memeriksa kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelum ditemukan oleh eksternal audit dalam hal ini meminimalisir terjadinya salah saji dalam hal laporan keuangan dalam hal pengelolaan keuangan dibutuhkan akuntabilitas untuk mencapai tujuan perusahaan dan *accountability* untuk kepercayaan publik (Cassel, 2007).

Beberapa riset tentang *internal control* dan pendeteksian *fraud* menemukan pula tentang *lifestyle* atau gaya hidup dan perilaku sangat berpengaruh terhadap munculnya kecurangan dalam perusahaan. *Lifestyle* yang menjadi penyebab tekanan dalam memperoleh penghasilan lebih untuk hidup layak seperti orang yang memiliki *lifestyle* modern, merk handpone terbaru dengan fasilitas mewah, mobil dan keperluan sosialita juga akan membawa tekanan bagi siapapun untuk menggunakan kewenangannya memperoleh dana yang bukan haknya untuk memenuhi gaya hidupnya dan keluarganya. Kebanyakan orang

lebih mengenal istilah “korupsi” *(corruption)* dibandingkan “kecurangan“ *(fraud).* Ilmu akuntansi, korupsi merupakan bagian dari kecurangan. Keduanya merupakan tindakan melawan hukum dan merugikan pihak lain. Hasil penelitian tersebut menghasilkan apa yang disebut dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle)*.

Fraud Triangle adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1950. Cressey mengungkapkan hipotesis mengenai *fraud triangle* untuk menjelaskan penyebab seseorang melakukan *fraud.* Berdasarkan penelitian yang telah Cressey lakukan, ia menemukan bahwa seseorang melakukan fraud ketika mereka memiliki *non-sharable problems.* Mereka yakin masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan/pekerjaan yang mereka miliki saat ini dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang asset menjadi seseorang yang dapat menggunakan asset yang telah dipercayakan secara pribadi. Fraud triange ini juga diteliti oleh (Choo, 2008), dengan menguji *personality character* dengan menemukan perilaku kecurangan yang timbul dengan adanya peluang, tekanan dan rasionalisasi.

“*The paper reviews the most commonly used and widely accepted models for explaining why people commit fraud – the fraud triangle, the fraud diamond, the fraud scale and the MICE model. The author argues that these models need to be updated to adapt to the current developments in the field and the ever-growing fraud incidents, both in frequency and severity, and builds on the theoretical background to create a new model so as to enhance the understanding behind the major factors which lead to the commitment of fraud. The author identifies a major element – ego – which plays a crucial role in compelling people to commit fraud and concludes in the formation of the S.C.O.R.E. model, which is graphically depicted in the fraud pentagon. He goes further by adding the factor collusion to better apply in cases of white-collar crimes”* (Georgious, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Georgious menembangkan bahwa kecurangan itu bukan hanya dengan *triangle* tetapi dikembangkan dengan model pentagon. Penelitian ini akan menerapkan *Crowe's fraud pentagon theory*. Proksi yang dapat digunakan untuk penelitian ini antara lain *pressure* yang diproksikan dengan, *financial target*, *financial stability, external pressure,* dan *personal financial need. Opportunity* yang diproksikan dengan *ineffective monitoring* dan kualitas auditor eksternal; *Rationalization* yang diproksikan dengan *change in auditor* dan opini audit*; Capability* yang diproksikan dengan pergantian direksi perusahaan*;* dan *Arrogance* yang diproksikan dengan *frequent number of CEO's picture* dan politisi CEO. Kelima faktor tersebut diindikasikan dapat menjadi pemicu terjadinya peningkatan *fraud* (Mehta, *et al*, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia menganalisa *fraud pentagon* terhadap kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan beneish model pada perusahaan yang menerapkan ASEAN CG Scorecard. *Fraud pentagon* diukur dengan arogansi, kompetensi peluang tekanan (stabilitas keuangan, rasio leverage dan rasio kepemilikan) dan rasionalisasi. Bahwa hanya stabilitas keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuagan yang ditunjukkan oleh Beneish Model. Sementara itu, variabel lain tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (Aprilia, 2017).

Teori Triangle terbarukan yang mengupas lebih mendalam mengenai factor - faktor pemicu fraud adalah teori fraud pentagon (Crowe's fraud pentagon theory). Teori ini dikemukakan oleh Crowe Howarth pada 2011.*Triangle theory* dikembangkan dengan Teori fraud pentagon merupakan perluasan dari teori fraud triangle yang sebelumnya dikemukakan oleh Cressey, dalam teori ini menambahkan dua elemen fraud lainnya yaitu kompetensi *(competence)* dan arogansi *(arrogance*). Kompetensi *(competence*) yang dipaparkan dalam teori fraud pentagon memiliki makna yang serupa dengan kapabilitas/kemampuan (*capability*) yang

sebelumnya dijelaskan dalam teori fraud diamond oleh Wolfe dan Hermanson pada 2014. Kompetensi/kapabilitas merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya (Crowe, 2011, 201 2). Anti korupsi juga menjadi program penelitian di Brazil, bahkan masalah korupsi ini menjadi topic penelitian dunia (Francisco, 2013)[i]

Penyebab Terjadinya Kecurangan

Model fraud setelah triangle muncul dengan berbagai temuan dan riset dengan model pengembangan yaitu pentagon oleh Crowe dengan *Crowe's pentagon theory* dengan model sebagai berikut:

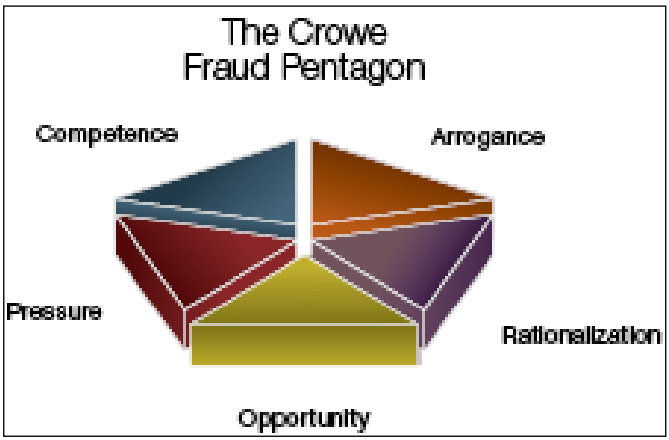

Gambar. Fraud pentagon Crowe

Lima elemen indikator di dalamnya yaitu: *Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability, dan Arrogance.* Lima elemen tersebut merupakan teori terbarukan yang sebelumnya diungkapkan oleh Cressey (1953. Crowe (2011) menemukan sebuah penelitian bahwa elemen arogansi (arrogance) juga turut berpengaruh terhadap dorongan terjadinya fraud. Lima elemen dari teori yang dikembangkan oleh Crowe (2011) ini dinamakan

dengan *Crowe's Fraud Pentagon Theory.* Teori ini yang lebih efektif digunakan dalam riset terkini terkait dengan kecurangan dan korupsi yang marak baik diperusahaan maupun di sektor pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Danuta, 2017), tentang pemanfaatan *e-procurement* dapat mencegah atau mengurangi hal-hal yang memicu terjadinya kecurangan atau korupsi, mengingat tingginya tingkat korupsi yang terjadi pada proses pengadaan barang jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang dilakukan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Inspektorat salah satu pemerintah daerah di Wilayah Yogyakarta. Penelitian ini fokus pada dua elemen tambahan dalam *crowe's fraud pentagon theory* yaitu arogansi dan kompetensi. Hasil analisis menunjukan *e-procurement* dapat mengurangi timbulnya arogansi dan kompetensi melalui transparansi yang diperoleh setelah menggunakan e-procurement. Keterbatasan dalam penelitianini adalah *e-procurement* yang hanya menjangkau bagian pemilihan penyedia yang tidak mencakup keseluruhan proses pengadaan barang jasa. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa pengadaan konvensional memiliki beberapa kelemahan, yaitu kurangnya transparansi dan efisiensi. Lebih lanjut, Restianto menyatakan kurangnya transparansi ini mengakibatkan persaingan penyedia menjadi terbatas dan minimnya pengawasan oleh publik (Danuta, 2017). Cara meminimalisir kecurangan pada bagian keuangan dengan meningkatkan peran auditor internal perusahaan.

Figure internal audit siklus

Siklus perencanaan audit dan pengawasan internal dimulai dengan perencanaan audit dan dilanjutkan dengan pelaksanaan audit. Tahap selanjutnya adalah rapat dengan mendengar pendapat atau respon *auditee* sebelum terbit naskah audit. Berikutnya adalah laporan audit yang selanjutnya membutuhkan tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi audit.

Standar audit telah membahas tentang bagaimana merespon kemungkinan resiko terjadinya fraud *(our results suggest that the benefits of brainstorming do not apply uniformly, because low-quality sessions likely incur the costs of such interactions without receiving the attendant ben efits. By documenting best practices from high-quality brainstorming sessions, our find ings can inform auditors on how to improve their consideration of fraud* (Brazel, Carpenter, & Jenkins, 2010). Kecurangan yang terjadi dalam organisasi dapat dideteksi oleh manajemen dengan menggunakan beberapa metode *detecting management fraud* sesuai penelitian yang dilakukan oleh

Cecchini dengan menguji *quantitative financial attribute*(Cecchini, Aytug, Koehler, & Pathak, 2010) .

corruption is a learned behaviour, this paper, thus, attempts to analyze it from a psychological perspective, using the relevant psychological theories for analysis. It is recommended that if we appreciate the relevance of Psychologists as professional human helpers and society builders, they would be handy in helping to reshape our orientations regarding value appreciation most especially in Nigeria, through their use of behavioural change interventions. Since (Ogunleye & Adebayo, 2012).

*****

SIMPULAN

Fraud merupakan tindak kecurangan, korupsi dan penyalah gunaan wewenang serta melanggar hukum. Hal tersebut banyak terjadi disebabkan olah perilaku yang menyimpang, gaya hidup materialistik dan hedinis. Gaya hidup dan perilaku korup telah menjadi masalah dan komoditi politik. Kasus *fraud* paling sering terjadi pada perusahaan milik negara sehingga memungkinka peneliti dan penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi masalah-masalah timbulnya kecurangan dan mengembangkan analisis terjadinya *fraud* dengan lebih komprehensif. Indikasi adanya kecurangan laporan keuangan dapat dibuktikan dengan adanya perubahan komposisi dewan direksi maupun auditor internal serta satuan pengendalian internal yang lemah. Korupsi hanya bisa diatasi dengan peningkatan integritas dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan karyawan, pemerintah untuk menerapkan sistem pengendalian yang efektif secara dini untuk mencegah terjadinya keurangan yang lambat laun akan merusak organisasi dan kepercayaan publik. Internal audit diharapkan peranan dan indepensinya dalam perusahaan untuk meminimalisir terjadinya tidakan korupsi serta dapat mendeteksi secara dini kecurangan yang terjadi. Hadirnya internal audit akan membuat sistem pengendalian internal yang baik bagi perusahaan dan membantu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Rekomendasi hasil audit akan menjadi prioritas perbaikan oleh pihak manajemen, dan jika sesuatu yang ditemukan telah baik,

maka diharapkan manajemen menjaga dan menentukan strategi selanjutnya.

TENTANG PENULIS

Dr. Rahmawati, SE, M. MSi, AK, CA, CSRS, CSRA dilahirkan di Ulusalu, pada tanggal 6 Februari 1976. Sejak tahun 2007 sampai sekarang merupakan dosen di Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo dalam bidang ilmu Akuntansi dengan matakuliah *Cost Accounting*, *Auditing* dan *CSR/ Corporate Sustainability*. Penulis memiliki keahlian *Chartered Accountant* IAI, *Speseialist* of CSRS and CSRA dan sebagai Auditor Internal Muhammadiyah Group. Penulis pernah menjabat sebagai wakil ketua 2 bidang administrasi dan keungan STIE Muhammadiyah Palopo masa jabatan 2010-2017. Sebagai wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo tahun 2018 sebelum melebur menjadi Universitas Muhammadiyah Palopo. Saat ini menjabat sebagai sekretaris Universitas Muhammadiyah Palopo.

Penulis telah melalui pendidikan formal Sarjana Ekonomi di STIE YPUP, Magister di FEB Universitas Hasanuddin, Doktor Ilmu Ekonomi dan Akuntansi di FEB Universitas Hasanuddin.

Pada tahun 2018 pernah menjadi Narasumber dalam Seminar Pendidikan yang diadakan oleh HMJ Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo dengan tema: "Simulacra Dunia Pendidikan : Paradoks Etika dan Moral Mahasiswa" Kampus STIE Muhammadiyah Palopo. Ditahun yang sama penulis mendapatkan penunjukan *"Certified Sustainability Reporting*

Specialist" With all its privileges and obligation. Tahun 2019 mendapatkan penunjukkan atas *"Certified Sustainability Reporting Assurer With all its privileges and obligations"*. Penulis juga ditunjuk sebagai dewan pakar dalam Pembentukan Majelis Agung Pengurus Daerah (MAPD) Majelis Agung Raja Sultan Indonesia (MARS) Indonesia Daerah Luwu Raya Prov. Sul- Sel. Penulis ditetapkan sebagai Tim Perpajakan dan Keuangan dalam Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Keuangan, Perpajakan dan Amal Usaha Muhammadiyah Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2016-2018 penulis ditunjuk sebagai Mitra Bestari Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL). Pada tahun 2019 penulis ditunjuk sebagai *Associate* Editor pada Juran STIEM Bongaya; Universitas Muhammadiyah Buton dan merupakan *reviewer* di Jurnal Fakultas Ekonomi IAIN Palopo.

Zikra Supri, SE.,M.Si lahir di Rumaju, 12 Oktober 1990. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, dan menjabat sebagai sekretaris Prodi Akuntansi. Penulis berdomisili di Pondok Merdeka Indah, Blok A2/ 16, Kota Palopo.

Penulis telah melalui Pendidikan formal

SMP Negeri 1 Bajo (2005), SMA Negeri 3 Palopo (2008) dan lulus S-1 di STIE Muhammadiyah Palopo pada tahun 2012. Pada tahun 2016 penulis menyelesaikan Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Hasanuddin Makassar. Dan telah melalui Pendidikan Magister (S-2) di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Abbass, D., & Aleqab, M. (2013). Internal Auditors' Characteristics And Audit Fees: Evidence From Egyptian Firms. *International Business Research* 6 (4). 67–80.

Albrecht, C., Holland, D., Malagueño, R., Dolan, S., & Tzafrir, S. (2015). The Role Of Power In Financial Statement Fraud Schemes. *Journal Of Business Ethics,* Vol 131(4), 803–813.

Albrecht, W.S., Albrecht, C.C., Albrecht, C.O. and Zimbelman, M. (2009), *Fraud Examination*,3rd ed., Thomson SouthWestern, Mason, OH.

Bernardi, R.A. 1994. Fraud Detection: The Effect of Client Integrity and Competence and Auditor Cognitive Style. *Auditing: A Journal of Theory and Practice*, 13 (supplement), 68-84.

Brazel, J. F., Carpenter, T. D., & Jenkins, J. G. (2010). Auditors' Use Of Brainstorming In The Consideration Of Fraud: Reports From The Field. *Accounting Review*, *85*(4), 1273–1301.

Cassel, C. K. (2007). Pay-For-Performance And Accountability. *Annals Of Internal Medicine* 146(11), 822.

Cecchini, M., Aytug, H., Koehler, G. J., & Pathak, P. (2010). Detecting Management Fraud In Public Companies. *Management Science* 56 (7). 1146–1160.

Diany, Y. A. & Dwi R. (2014). Determinan Kecurangan Laporan Keuangan: Pengujian Teori Fraud Triangle. Diponegoro

Journal Of Accounting. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol 3 (2).

Edmondson, A. C. (2002). *The Local And Variegated Nature Of Learning In Organizations: A Group-Level Perspective*. Organization Science.

Floyd, S. W., & Lane, P. J. (2000). *Strategizing Throughout The Organization: Managing Role Conflict In Strategic Renewal.* Academy Of Management Review.

Gomes, R. C., Alfinito, S., & Albuquerque, P. H. M. (2013). Analyzing Local Government Financial Performance : Evidence From Brazilian Municipalities 2005 - 2008. *Revista De Administração Contemporânea* 17 (6). 704–719.

Guinée, J. (2001). Handbook On Life Cycle Assessment - Operational Guide To The ISO Standards. *International Journal Of Life Cycle Assessment*, Vol 7, 311.

Hardiningsih, P. (2010). Pengaruh Independensi Corporate Governance, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Kajian Akuntansi* 2 (1), 61.

HKICPA.(2010). Code of ethics for professional accountants for HKICPA. China, Hong Kong: Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. Retrieved April 15, 2010, www.hkicpa.org.hk.

IIA. (2009). IIA Position Paper: *The Role Of Internal Auditing In Enterprise-Wide Risk Management*. Iia.

Johnson, E. N., Kuhn, J. R., Apostolou, B. A., & Hassell, J. M. (2013). *Auditor Perceptions Of Client Narcissism As A Fraud Attitude Risk Factor*. Auditing.

Kurniawati, E., & Raharja, S. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud Dalam Perspektif Fraud Triangle. *Diponegoro Journal Of Accounting* 1 (30).

Lastanti, H. S. (2005). T*injauan Terhadap Kompetensi Dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan*. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi.

Li, Y. (2010). The Case Analysis Of The Scandal Of Enron. *International Journal Of Business And Management* 5 (10

Lin, C. C., Chiu, A. A., Huang, S. Y., & Yen, D. C. (2015). *Detecting The Financial Statement Fraud: The Analysis Of The Differences Between Data Mining Techniques And Experts' Judgments*. Knowledge-Based Systems.

Lukman, H., & Harun, V. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Deteksi Kecurangan Dalam Persepsi Auditor Eksternal Dan Auditor Internal. *Jurnal Akuntansi* 22 (2), 255-256.

M.Hanafi, M. (2014). *Risiko, Proses Manajemen Risiko, Dan Enterprise Risk Management*. Management Research Review.

Mardianto, M., & Tiono, C. (2019). Analisis Pengaruh Fraud Triangle Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Benefita*: *Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi* 4 (1), 87-103.

Meikhati, E., & Rahayu, I. (2015). Peranan Audit Internal Dan Pencegahan Fraud Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada Yayasan Internusa Surakarta). *Jurnal Paradigma* 13 (1). 77–91.

Moyes, G. D., & Hasan, I. (1996). An Empirical Analysis Of Fraud Detection Likelihood. *Managerial Auditing Journal* 11 (3), 41-46.

Murphy, P. R., & Dacin, M. T. (2011). Psychological Pathways To Fraud: Understanding And Preventing Fraud In Organizations. *Journal Of Business Ethics* 101 (4), 601-618.

Nandari, A., & Latrini, M. (2015). Pengaruh Sikap Skeptis, Independensi, Penerapan Kode Etik, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. *E-Jurnal Akuntansi* 10 (1), 164-181.

Normile, D. (2001). J*apanese Fraud Highlights Media-Driven Research Ethic*. Science 291 (5501), 34-35.

Norsain. (2014). Peranan Audit Internal Ddalam Mendeteksi Dan

Mencegah Kecurangan (Fraud). *Jurnal Performance Bisnis Dan Akuntansi* 4 (1), 13-21.

NOVIAN TEDJASUKMA, F. (2012). *Pentingnya Red Flag Bagi Auditor Independen Untuk Mendeteksi Kecurangan Dalam Laporan Keuangan*. Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Widya Mandala.

Ogunleye, A.J. and S.O. Adebayo, 2012. Corruption and Development in Nigeria: A Psychological Perspective. Global *Journal of Human Social Science Arts and Humanities*, 12 (9), 6.

Palmer, A. J. (1993). Performance Measurement In Local Government. *Public Money & Management* 13 (4). 31–36.

Pertiwi, N., & Agusti, R. (2013). Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Se Sumatera). *Jurnal Ekonomi Universitas Riau* 21 (3).

Rafinda, A., Arofah, T., Mustafa, R. M., & Ompusunggu, H. (2015). Does An Ethic Matter To Predict Misreporting Behavior? *Journal Of Economics, Business, And Accountancy* | *Ventura* 18 (1), 133-144.

Rahman, F. (2011). Peran Manajemen Dan Tanggung Jawab Auditor. *Jurnal Eksis* 7 (2).

Roberts, J. (2009). *No One Is Perfect: The Limits Of Transparency And An Ethic For "Intelligent" Accountability*. Accounting, Organizations And Society.

Rustendi, T. (2018). Peran Audit Internal Dalam Memerangi Korupsi (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP). *Jurnal Akuntansi* 12 (2).

Wardana, M., & Ariyanto, D. (2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Objektivitas, Integritas Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit. *E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana* 14 (2), 948- 976.

Arens and K. Loebbecke. 2000*. Auditing: An Integrated Approach*. http://books.google.com (diakses pada 10

September 2019).

Arnold at all, 2006. Between-Country Variations In The Application Of The Principle Of Auditor Confidentiality: A European Setting. *Journal of Accounting, Ethics & Public Policy* 6 (1), 1-30.

Alek, 2010. Internal Control Peran dan Perkembangannya. *Jurnal Akuntansi & Investasi* 1 (1). 1-10. http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/download/455/610 (diakses pada 05 Agustus 2019).

Alleyne. P, 2005. An exploratory study of auditors' responsibility for fraud detection in Barbados. *Managerial Auditing Journal* 20 (3), 284-303.

Aprilia. 2017. Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model Pada Perusahaan Yang Menerapkan Asean Corporate Governance Scorecard. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset*) 9 (1), 101-132.

Arens, A. Elder, R. and Beasley, M. (2003). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach,* 9th ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Baotham, S. 2007. *The Impact of Proffesional Knowledge and Personal Ethics on Audit Quality*. International Academy Bisnis & Ekonomi.

Batubara, R.I. 2008. Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan, dan Independensi Pemeriksa terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris pada Bawasko Medan). *Tesis*. Medan: Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Boyton C.W. Johnson, N.R. & Kell, G.W. 2003. *edisi ketujuh, "Modern auditing"*. Jakarta: Erlangga.

Cressey, D.R. (1953). *Other people's money. A study of the social psychology of embezzlement*. New York, NY, US: Free Press.

Choo, F. & Tan, K. (2008). *The effect of fraud triangle factors on students' cheating behaviors", Schwartz, B. and Catanach, A. (Ed.)*. Advances in Accounting Education Advances in Accounting Education.

Coram, P. Ferguson, C. & Moroney, R. 2008. *Internal audit, alternative internal audit tructures and the level of misapropriation of assets fraud*. Accounting and Finance.

Danuta, 2017. Crowe's Fraud Pentagon Theory Dalam Pencegahan Fraudpada Proses Pengadaan Melalui E-Procurement. *Jurnal Kajian Akuntansi* 1 (2).161-171.

Futri, 2014. Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, Dan Kepuasan Kerja Auditor Pada Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik Di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7 (2). 444-461.

Georgoius, 2019. Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime* 26 (1), 372-381.

Haryono, M.E. 2017. Analisis *Fraud Triangle* Dalam Mendeteksi *Financial Statement Fraud.* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Halim, A. 2008. *Dasar-Dasar Prosedur Pengauditan Laporan Keuangan*, Edisi Empat. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Haryono Al. Jusup. 2014. *Auditing (Pengauditan Berbasis ISA)*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.

Hery. 2017. *Auditing dan Assurans Pemeriksaan Akuntansi Berbasisi Standar Audit Internasional*. Jakarta: Grasindo.

Hogan, C. E., Z. Rezaee., R. A. Riley., & U. K. Velury. 2008. Financial Statement Fraud: Insights From The Academic Literature. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 27 (2), 231-252.

Horwarth, Crowe. (2011). *The Mind Behind The Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Element*. USA: Crowe Horwarth International .

Jefri, R. & Mediyati, 2014. Pendeteksian Kecurangan *(fraud)* Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi* 1 (02), 56-64.

Jusup, Al-Haryono. 2011. *Auditing (Pengauditan Berbasis ISA*. Yogyakarta: YKPN.

Karyono. (2013). *Forensic Fraud*: CV Andi.

Kenneth, 2012. Audit Committee And Integrity Of Financial tatements: A Preventive Mechanism For Corporate Failure**.** Australian *Journal of Business and Management* 2 (8). 32-40.

Kumaat, 2010. *Internal Audit*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Minaryanti, 2015. Tanggung Jawab Pendeteksian Kecurangan sebagai Pencegahan Kegagalan Audit (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta).*Jurnal Trikonomika* 14 (1), 57-65.

Krambia-Kapardis, M. (2002), "A fraud detection model: A must for auditors", *Journal of Financial Regulation and Compliance* 10 (3), 266-278.

Marks, Jonathan. (2012). The Mind Behind The Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Elements. Crowe Howarth LLP (Presentation).

Milos, 2012. The Impact Of Ethics On Quality Audit Results. *International Journal for Quality research* 6 (4), 333-342.

Mulyadi, 2002. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi. 2002. *Auditing, Edisi Enam, Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat.

Olivia. 2015. *The Effect Of Experiencea, Competence, Motivation Accountability and Objectivity Toward Audit Quality*. Science Direct. Elsevier.

Pickett, KH. Spencer. 2010. *The Internal Auditing Handbook.* Edisi ke-3. John Wiley & Sons Ltd.

Prasetyani, Y.N. 2012. *Pengaruh Fraud Risk Assesment dan Kecakapan Auditor terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dan Jepara*. Kudus: Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.

Purba, B.P. 2015. *Fraud Dan Korupsi: Pencegahan, Pendeteksian, dan Pemberantasannya*. Lestari Kiranatama.

Rahman, A.T. 2009. *Persepsi Auditor Mengenai Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Due Professional Care terhadap Kualitas Audit*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Rizqy. 2013. Pengaruh Persepsi Profesi, Kesadaran Etis Dan Independensi Auditor Terhadap Komitmen Profesi Akuntan Publik Di Kota Medan. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 6 (2). 140-149.

Wardana. 2016. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Objektivitas, Integritas dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit. www.unud.ac.id (diakses 27 Juli 2019).

Senthivelmuguran., & Rajan, P. 2004. Anatomy of computer accounting frauds. *Managerial Auditing Journal*, 19 (8), 1055-1075.

Wiyandika, S.P.P. 2017. Keahlian Auditor Internal Dalam Mendeteksi *Fraud* Pada Pt Inti Dragon Suryatama. *Jurnal Ilmu dam Akuntansi Indonesia* 6 (1).

Siti, Z. 2017. Voluntary Disclosure Of Corporate Integrity In The Annual Report Of The Malaysian Federal Statutory Bodies. *Journal of Governance and Integrity (JGI)* 1, 54-66.

Suprajadi, L. 2009. *Teori Kecurangan, Fraud Awaeness, dan Metodologi untuk Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan,

Sunyoto, D. 2014. *Auditing Pemeriksaan Akuntansi*. Yogyakarta: CAPS.

Tuankotta, M.T. (2014). *Audit Berabsis ISA*. Jakarta: Salemba Empat.

Yusup, M. 2014. *Audit Manajemen*. STIE Pasundan Bandung: Majalah Bisnis dan Iptek.

Zainudin, E. & Hashim, H. (2016). Detecting fraudulent financial reporting using financial ratio. *Journal of Financial Reporting and Accounting* 14 (2). 266-278.

INTERNAL AUDIT &
PENDETEKSIAN KECURANGAN

Buku Internal Audit & Pendeteksian Kecurangan ini, berisi materi yang berhubungan dengan praktik dan teori dalam Audit yang lebih terkhusus pada Audit Internal. Audit Internal yang pada umumnya dibahas secara umum pada buku audit lainnya, akan dibahas lebih spesifik pada tiap bab dalam buku ini. Pembahasan tentang kecurangan (*fraud*) juga akan menjadi bagian dalam buku ini sebagai suatu hal yang berkaitan dengan audit.

Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup: Bab I. Audit Internal dan Auditor Internal: Upaya Mendeteksi Kecurangan (*Fraud)*, Bab II. Integritas Auditor Internal, Bab III. Kerahasiaan Dan Objektivitas Auditor Internal, Bab IV. Kompetensi Auditor dan Kedisiplinan Terhadap Kode Etik, Bab V. Pentingnya Melakukan Audit Manajemen Bagi Sebuah Institusi, Bab VI. Pemeriksaan Awal Prinsip Dasar Audit Manajemen, Bab VII Bukti: Pengujian Pemeriksaan Manajemen", Bab VIII. Audit Manajemen, Bab IX. Contoh Pedoman Internal Audit (IA) Perusahaan, Bab X. Riset Tentang Audit Kecurangan (Korupsi)

LPPI UM Palopo

LEMBAGA PENERBITAN DAN PUBLIKASI ILMIAH (LPPI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO
Jl. Jend. Sudirman Km. 03 Binturu
Kec. Wara Selatan Kota Palopo
Telp/Fax. (0471) 327429
E-mail: lppi@umpalopo.ac.id

ISBN 978-623-91725-6-5